"Saat hak anda dirampas, sangat sulit memperolehnya kembali. Para penulis Politik dan Kebebasan menjelaskan mengapa perlu berjuang bagi kebebasan anda"

—David Boaz,
Wakil Presiden Eksekutif, Cato Institute

POLITIK DAN KEBEBASAN

Editor: **Tom G. Palmer**

“*Libertarianisme itu Keren*”
—Washington Post, June 10, 2013

“*Why Liberty* menampilkan karya tokoh terkemuka *Students for Liberty*, gerakan kaum muda yang paling dinamis di dunia untuk kebebasan, bersama dengan esai oleh pejuang kebebasan ternama seperti Tom Palmer dan John Stossell. Segar dan baru, coba dan benar, *Why Liberty* memberi kita harapan untuk generasi penerus. “

—John Tomasi,
Department of Political Science, Brown University

“Kumpulan esai ini sangat informatif dan ditulis dengan baik sehingga akan memberi asupan keinginan Anda untuk membaca lebih banyak lagi - dan untuk mengetahui lebih banyak - tentang peran dasar kebebasan dalam tatanan sosial.”

—Lynne Kiesling,
Department of Economics, Northwestern University

“Buku ini mudah dibaca, bagus untuk dibaca, dan penting dibaca. Jika lebih banyak orang membacanya, dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih baik; Tidak akan ada kebutuhan untuk ‘Mengapa’ dalam *Why Liberty*.”

—Peter Kurrild-Klitgaard,
Department of Political Science, University of Copenhagen

“Panduan inspiratif yang akan menguntungkan orang yang awam terhadap libertarianisme dan mereka yang berpengalaman dalam tradisi. Meskipun kita sering tidak menyadarinya, libertarianisme adalah prinsip yang membuat kebanyakan orang menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Buku ini menjelaskan mengapa kita harus menerapkan prinsip itu pada politik kita juga.“

—Mark Pennington,
Department of Political Economy and Public Policy, King’s College, University of London

POLITIK DAN KEBEBASAN

Judul Buku:
Politik dan Kebebasan

Penulis:
Tom G Palmer (Eds)

Kontributor:
John Stossel, Clark Ruper, James Padilioni Jr., Alexander McCobin,
Sarah Skwire, Aaron Ross Powell, Olumayowa Okediran, Sloane Frost,
Lode Cossaer dan Martin Wegge

Judul Asli: *Why Liberty: Your Life Your Choice and Your Future*

Diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh
Atlas Network dan Students for Liberty (2013)

Diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh:

Suara Kebebasan (2017)

Penerjemah: Djohan Rady

Penyelaras Bahasa: Rofi Uddarojat dan Adinda Tenriangke Muchtar

Desain Layout: Harhar Muharam

Website: www.suarakebebasan.org

POLITIK DAN KEBEBASAN

Why Liberty

Your Life • Your Choice• Your Future

Editor: Tom G. Palmer
Students For Liberty & Atlas Network

Kontributor:

John Stossel, Clark Ruper, James Padilioni Jr.,
Alexander McCobin, Sarah Skwire, Aaron Ross Powell,
Olumayowa Okediran, Sloane Frost,
Lode Cossaer dan Martin Wegge

Daftar Isi

Kata Pengantar

Politik merupakan salah satu aspek penting dalam hidup manusia. Orang-orang berdebat tentang banyak hal, namun politik adalah salah satu hal yang diperdebatkan paling sengit. Semakin banyak orang memperbincangkan politik daripada hal yang lainnya, bukan hanya karena politik dianggap lebih penting daripada seni, olah raga, ilmu kimia, film, arsitektur, atau ilmu pengobatan, tetapi karena politik berbicara mengenai eksekusi kekuasaan terhadap orang lain.

Ketika sebuah solusi akan diterapkan di dalam masyarakat, banyak orang tentu ingin tahu isi dan bentuknya. Jika kamu tidak ingin dipaksa untuk melakukan sesuatu oleh pihak lain, entah itu partai politik, politisi, atau agen pemerintah, besar kemungkinan kamu akan membuat suatu perlawanan. Begitu juga sebaliknya apabila kamu adalah pihak yang ingin memaksa orang lain melakukan apa yang kamu perintahkan.

Makanan juga dapat menjadi suatu topik yang akan diperdebatkan dengan sengit layaknya politik apabila pilihan-pilihan kita atas makanan ditentukan secara kolektif dan kita dipaksa untuk terus mengkonsumsi makanan yang sama dengan orang lain. Bayangkan perdebatan, manuver, dan koalisi yang akan terjadi di antara para "*foodies*", penggemar *fast food*, vegetarian, pemakan daging, dan pelaku diet apabila pilihan makanan kita dibatasi pada satu jenis dan porsi makanan tertentu. Hal yang sama juga berlaku pada berbagai hal lain yang dianggap penting oleh banyak orang, bukan hanya makanan.

Ide yang ingin kami tawarkan dalam buku ini merupakan sebuah persepsi alternatif terhadap politik: politik bukan sebagai sebuah pemaksaan kehendak, tetapi persuasi. Kami ingin menawarkan politik sebagai sebuah antitesis atas penindasan dan dominasi.

Esai-esai yang terkumpul dalam buku ini kebanyakan ditulis oleh anak-anak muda yang aktif di dalam Students for Liberty, sebuah organisasi internasional yang dinamis dan menyenangkan. Anak-anak muda ini tidak berbicara dari sudut pandang nasionalisme yang sempit, tetapi berdasarkan perspektif kemanusiaan yang luas. Mereka menulis sebuah pengantar terhadap sebuah filosofi yang telah dipraktekkan oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Filosofi ini memiliki berbagai macam nama dan sebutan di seluruh dunia, termasuk liberalisme, liberalisme klasik (untuk membedakannya dengan "liberalisme" ala Amerika Serikat), dan libertarianisme. Filosofi ini merupakan sebuah pendekatan yang sederhana sekaligus kompleks, karena pendekatan ini berisi sebuah pemahaman bahwa *aturan sederhana* dapat menghasilkan *tata sosial kompleks*. Inilah salah satu pelajaran penting dari ilmu sosial modern. Tata sosial dapat muncul secara spontan, sebuah topik yang akan ditelusuri secara detail dalam buku ini.

Buku kecil ini adalah sebuah undangan bagi para pembaca untuk mulai memikirkan persoalan-persoalan penting kemanusiaan dengan cara baru. Buku ini ditujukan untuk para pemula maupun para sarjana yang sudah berpengalaman. Saya harap kedua jenis pembaca ini, dan mereka yang berada di antara keduanya, dapat mengambil manfaat yang besar dari buku ini. Para pembaca dapat mulai membaca dari bab manapun dan masing-masing bab dapat dibaca sebagai sebuah tulisan tersendiri. Bahkan, tidak ada kewajiban khusus bagi para pembaca untuk melahap semua isi buku ini. Anggap buku ini sebagai sebuah kudapan yang enak dan sehat bagi akal pikiran kamu. Selamat membaca.

Tom G. Palmer
Vilnus, Lithuania
3 Juni 2013

1.

Mengapa Menjadi Libertarian?

Oleh: Tom G. Palmer

Untuk sebuah buku berjudul Politik dan Kebebasan, maka sungguh masuk akal apabila kita mulai pembahasan dengan sebuah penjelasan mengenai apa itu libertarianisme dan mengapa kita harus menerima kebebasan sebagai prinsip tata sosial.

Sepanjang kamu menjalani hidup, besar kemungkinan kamu selalu bertindak layaknya seorang libertarian. Kamu tentu bertanya-tanya, apa maksudnya "bertindak layaknya seorang libertarian"? Jawabannya mudah saja. Kamu tidak serta-merta memukul orang lain ketika kamu tidak suka pada perilaku mereka. Kamu tidak mengambil barang-barang mereka. Kamu tidak membohongi orang lain agar kamu dapat mengambil barang-barang mereka, atau menipu mereka, atau memberikan tujuan jalan yang salah yang dapat mengarahkan mereka jatuh ke dalam jurang. Bertindak layaknya seorang libertarian artinya kamu tidak melakukan itu semua.

Kamu menghormati orang lain. Kamu menghormati hak-hak mereka. Kamu mungkin kadang-kadang merasa ingin menampar wajah orang lain atas perkataan mereka yang kamu anggap menyinggung perasaan, tetapi kamu mendahulukan akal sehat dan meninggalkan orang itu sendirian. Atau kamu hanya akan membalas kata-kata dengan kata-kata. Bertindak layaknya seorang libertarian artinya menjadi seseorang yang beradab.

Sampai sini saya ingin mengucapkan selamat. Kamu sudah menginternalisasi prinsip-prinsip dasar libertarianisme. Kamu menjalani hidup ini sesuai kehendakmu sambil terus menghormati kebebasan dan hak-hak orang lain. Kamu telah bertindak layaknya seorang libertarian.

Libertarian percaya pada asas voluntarisme atau kesukarelaan ketimbang pemaksaan. Dan besar kemungkinan kamu selalu menaati asas voluntarisme ini ketika berhadapan dengan orang lain dalam keseharianmu.

Tapi tunggu dulu. Bukankah libertarianisme adalah sebuah *filsafat politik* yang berbicara tentang pemerintah dan kebijakan publik? Itu betul. Lalu kenapa libertarianisme tidak berfokus pada apa yang seharusnya *pemerintah* lakukan tetapi malah fokus pada tindakan *individu*? Nah, di sinilah perbedaan mendasar antara libertarianisme dengan ide-ide politik yang lain. Para libertarian percaya bahwa pemerintah bukanlah institusi sakti. Pemerintah terdiri dari manusia biasa juga, sama seperti kita. Tidak ada sekelompok orang di dunia ini—entah itu raja, kaisar, pangeran, kanjeng, ulama, presiden, anggota dewan, atau perdana menteri—yang memiliki intelektualitas dan kebijaksanaan maha hebat yang membuat mereka berbeda dari orang kebanyakan. Para penguasa, bahkan jika mereka terpilih secara demokratis, tidak lebih "solider dan berjiwa sosial" ketimbang masyarakat biasa. Bahkan seringkali kesadaran sosial mereka lebih rendah dari orang-orang kebanyakan. Tidak ada jaminan bahwa para penguasa tidak lebih egois daripada rata-rata orang, dan mereka pun tidak lebih bijaksana. Dan tidak ada jaminan bahwa para penguasa lebih paham mana yang baik dan mana yang buruk daripada rata-rata orang. Mereka sama seperti kita.

Tapi tunggu dulu. Pada kenyataannya memang para penguasa politik memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki orang lain.

Mereka punya kekuasaan untuk memenjarakan orang, memulai perang dan membunuh bangsa lain. Mereka punya kuasa untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dibaca, bagaimana cara terbaik untuk menyembah Tuhan, siapa yang harus dinikahi, apa yang boleh dan tidak boleh dimakan atau dikonsumsi, pekerjaan apa yang harus dilakukan, di mana kita mesti tinggal, di mana kita harus bersekolah, ke mana saja kita boleh berpergian, barang dan jasa apa yang bisa kita jual dan pada harga berapa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Para penguasa memang memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki kebanyakan orang.

Benar sekali. Tugas mereka adalah mengeksekusi kekuasaan—inilah yang membedakan pemerintah dengan institusi-institusi lainnya. Tetapi pada dasarnya para penguasa tidak memiliki pengetahuan dan kecerdasan yang lebih tinggi dari kita. Tidak juga mereka memiliki standar moral yang lebih tinggi. Beberapa penguasa dan penasehat mereka mungkin lebih pintar daripada rata-rata orang, tetapi sama sekali tidak ada jaminan bahwa mereka memiliki kualitas yang melampaui manusia pada umumnya sehingga layak kita jadikan pemimpin.

Kalau begitu, kenapa mereka sibuk menerapkan kekuasaan, sementara kebanyakan dari kita mengandalkan prinsip voluntarisme (kesukarelaan – penerjemah) ketika berinteraksi dengan orang lain? Para pemegang kekuasaan politik bukan dewa atau malaikat, jadi kenapa mereka layak mengeksekusi kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lainnya? Jika saya tidak punya hak untuk masuk ke rumahmu untuk mengatakan kapan kamu harus makan, kapan harus tidur, kapan kamu boleh keluar rumah dan dengan siapa, lalu kenapa para politisi, birokrat, atau presiden punya hak untuk itu semua?

Bukankah Kita Setuju untuk Diatur-atur?

Tetapi tunggu: bukankah pada hakekatnya *kita* adalah pemerintah itu sendiri? Setidaknya, di dalam demokrasi, sebagaimana dikatakan oleh para filsuf seperti Jean-Jacques Rousseau, kita sebagai anggota masyarakat telah bersepakat untuk patuh terhadap semua aturan pemerintah. Pemerintah merupakan pengemban "kehendak umum" masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah sedang menjalankan kehendak dari kita sendiri sebagai masyarakat. Jadi ketika pemerintah menerapkan kekuasaannya terhadap kita, mereka sebetulnya sedang memaksa kita untuk menjadi bebas, dengan memaksa kita mengikuti kehendak umum, bukan sekedar mengikuti apa yang kita pikir merupakan kehendak semua orang. Rousseau menulis di dalam bukunya yang berpengaruh *The Social Contract*, "kehendak umum selalu bersifat benar dan cenderung mengarah pada kebaikan umum; tetapi mesti dipahami bahwa tidak semua kehendak dan keinginan masyarakat memiliki nilai kebenaran yang setara... . Ada perbedaan besar antara kehendak semua orang [*the will of all*] dengan kehendak umum [*the general will*]."[1]

Di dalam teorinya, Rousseau mencampuradukkan pemaksaan dengan kebebasan, karena, menurut Rousseau, "siapa saja yang menolak untuk mematuhi kehendak umum akan dipaksa untuk patuh oleh seluruh anggota masyarakat, yang tidak lain berarti dia akan dipaksa untuk menjadi bebas."[2] Lagipula, kamu tidak benar-benar tahu apa yang kamu inginkan sampai pemerintah yang menentukannya. Jadi ketika kamu melakukan apa yang ingin kamu lakukan tetapi kemudian ditangkap dan dipenjarakan oleh polisi, maka sebetulnya pemerintah sedang membuat kamu menjadi manusia bebas. Kamu sedang ditipu jika kamu punya keinginan untuk melanggar peraturan pemerintah, dan polisi-polisi yang menangkap kamu sebetulnya sedang membantu

kamu untuk menentukan apa yang benar-benar kamu inginkan. Kamu terlalu bodoh dan kekanak-kanakan untuk tahu apa yang sebetulnya benar-benar kamu inginkan.

Argumen Rousseau mungkin terdengar terlalu metafisis. Mari kita mundur sedikit dan pelajari argumen utama para pembela mayoritarianisme. Entah bagaimana, melalui proses pemilu atau prosedur lainnya, kita bisa menentukan “kehendak masyarakat”, meskipun ada beberapa orang yang tidak bersepakat (di setiap pemilu selalu ada pihak yang kalah). Orang-orang yang tidak bersepakat ini dipaksa untuk ikut suara mayoritas. Contohnya: mereka harus ikut aturan bahwa menghisap mariyuana itu termasuk tindakan kriminal, atau mereka dipaksa untuk membayar pajak demi membiayai program-program pemerintah yang tidak mereka sukai (misalnya kebijakan perang atau untuk memberikan subsidi pada kelompok-kelompok elit tertentu). Sekelompok orang yang kebetulan mayoritas memilih untuk melarang X dan mewajibkan Y, atau memilih politisi yang berjanji untuk melarang X dan mewajibkan Y, dan kemudian kita bisa tahu “kehendak masyarakat”. Jika ada orang yang masih menenggak bir atau menghisap mariyuana, atau menyembunyikan gaji mereka untuk menghindari pajak, maka orang tersebut tidak patuh terhadap kehendak masyarakat yang telah disepakati bersama. Mari kita elaborasi argumen ini lebih dalam.

Katakanlah ada sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk melarang penjualan produk minuman beralkohol dan kamu memutuskan untuk mendukung dan memilih politisi yang ingin menggolkan undang-undang tersebut. Para pendukung mayoritarianisme akan setuju apabila saya katakan bahwa dengan memilih politisi tersebut di dalam pemilu, maka kamu sudah memberikan komitmenmu untuk patuh pada aturan anti-miras tersebut. Namun, bagaimana bila kamu tidak setuju pada

undang-undang tersebut dan justru memilih politisi lain yang tidak ingin mengesahkan undang-undang itu? Para pendukung mayoritarianisme akan mengatakan: karena kamu sudah berpartisipasi di dalam proses pemilu, maka mau tidak mau kamu juga harus menerima hasil akhir pemilu tersebut dengan sukarela. Lalu bagaimana bila kamu memilih untuk menjadi golput, tidak memilih menjadi anti maupun kontra terhadap undang-undang anti-miras? Menurut para mayoritarian, kamu tidak berhak untuk protes terhadap hasil akhir dari pemilu, karena toh kamu sudah menyia-nyiakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemilu itu sendiri. Seorang filsuf libertarian asal Inggris, Herbert Spencer, mengatakan bahwa argumen semacam itu "sangat aneh, karena seorang individu dipaksa untuk bersepakat (pada kehendak mayoritas) apa pun pilihan dan tindakan si individu—entah menjadi pro, kontra, maupun menjadi netral! Ini adalah argumen yang menggelikan."[3] Memang menggelikan. Jika kamu selalu diasumsikan bersepakat, terlepas dari apapun pilihanmu, maka kata "bersepakat" (*to consent*) itu sendiri sudah kehilangan maknanya.

Faktanya, orang yang ditangkap polisi karena menghisap mariyuana di dalam rumahnya tidak pernah bersepakat untuk ditangkap. Itulah sebabnya kenapa polisi menggunakan baton dan pistol—yakni untuk mengancam orang dengan kekerasan.

Tetapi mungkin kekuasaan pemerintah didelegasikan oleh orang banyak, sehingga apabila orang-orang punya pilihan untuk tidak merokok mariyuana, maka mereka punya pilihan untuk memenjarakan diri mereka sendiri. Tetapi jika kamu tidak punya otoritas untuk masuk ke rumah tetanggamu sambil menodongkan pistol untuk menyeret mereka ke dalam penjara, lalu kenapa kamu bisa mendelegasikan kekuasaan tersebut kepada pihak lain? Dan kita kembali lagi ke argumen ajaib bahwa tetanggamu yang doyan menghisap mariyuana itu sudah menyepakati sendiri

penangkapan mereka, terlepas dari apapun pilihan mereka dalam pemilu sebelumnya.

Tetapi mungkin hanya dengan tinggal dan menjadi warga suatu negara, itu berarti kita memang sudah bersepakat untuk patuh pada aturan main yang ditetapkan pemerintah pada kita. Lagi pula, jika kamu datang ke rumah saya, bukankah kamu harus patuh pada aturan main saya sebagai tuan rumah? Sayangnya "negara" tidak sama dengan "rumah saya". Saya memiliki dan menguasai rumah saya, tetapi saya tidak "memiliki dan menguasai" negara saya. Negara terdiri dari banyak individu yang punya pandangan dan cara-cara mereka sendiri tentang bagaimana menjalani hidup yang paling ideal. Dan orang-orang ini bukan milik saya. Inilah yang membedakan cara berpikir orang dewasa dengan anak-anak: orang dewasa paham bahwa *orang lain bukan milik mereka*. Setiap orang punya hidup masing-masing yang ingin dijalani. Kamu, sebagai pribadi yang dewasa, memahami itu dan tindakan-tindakanmu merefleksikan pemahaman tersebut. Kamu tidak bisa serta-merta masuk ke dalam rumah orang lain untuk mengatur bagaimana mereka seharusnya menjalani hidup. Kamu tidak serta-merta mengambil barang orang lain meskipun kamu pikir barang tersebut akan lebih berguna jika menjadi milikmu. Kamu tidak memukul, menampar, menikam, atau menembak orang lain yang tidak sepaham dengan kamu, bahkan untuk urusan-urusan yang sangat krusial dan penting.

Jadi, jika kamu sudah sering bertindak layaknya seorang libertarian, mungkin ada baiknya untuk langsung saja *menjadi* seorang libertarian.

Apa Artinya *Menjadi* Seorang Libertarian?

Menjadi libertarian artinya bukan sekedar tidak melanggar hak orang lain, yakni, menghormati prinsip keadilan yang berkaitan dengan orang. Menjadi libertarian juga berarti mendidik diri

sendiri untuk memahami apa arti dan signifikansi hak, bagaimana hak dapat menciptakan fondasi bagi kooperasi sosial yang damai, dan bagaimana mekanisme sosial yang berbasis voluntarisme. Menjadi libertarian artinya tidak hanya berjuang membela kebebasan untuk diri sendiri, tetapi juga kebebasan untuk orang lain. Seorang pemikir libertarian dari Brazil mendedikasikan hidupnya untuk menghapus salah satu pelanggaran kebebasan terbesar umat manusia: perbudakan. Nama pemikir tersebut Joaquim Nabuco. Joaquim menyatakan kredo libertarianisme yang menjadi pedoman hidupnya sebagai berikut:

Didiklah anak-anakmu, didiklah dirimu untuk mencintai kebebasan orang lain, karena hanya dengan cara ini kebebasanmu sendiri tidak menjadi sebuah anugrah yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Dengan begini, kamu akan menyadari betapa berharganya kebebasanmu sendiri dan kamu akan punya keberanian untuk memperjuangkannya.[4]

Menjadi libertarian artinya menaruh kepedulian pada kebebasan semua orang, menghormati hak-hak mereka, meskipun apabila kita tidak setuju dengan pendapat-pendapat mereka. Menjadi libertarian artinya menolak menggunakan cara-cara kekerasan dan pemaksaan, tetapi justru menggunakan cara-cara damai dan voluntaristik dalam mencapai tujuan-tujuan pribadi, entah itu yang bersifat personal ataupun yang bersifat lebih luas seperti meningkatkan kondisi kemanusiaan, menyebarkan pengetahuan, dan sebagainya. Cara-cara damai dan voluntaristik ini harus terus diupayakan entah di dalam bingkai masyarakat "kapitalistik" di mana pertukaran dilaksanakan dengan bebas, atau dalam konteks wacana iptek, filantropi, seni, atau sekedar relasi persahabatan di antara umat manusia.

Kecurigaan Terhadap Kekuasaan dan Otoritas

Menjadi libertarian artinya memahami bahwa hak-hak individu hanya dapat diamankan apabila kekuasaan negara dibatasi. Hak memerlukan penegakan hukum. John Locke, filsuf radikal dan aktivis terkemuka Inggris, merumuskan fondasi awal bagi peradaban modern. Locke membangun filsafat yang menentang "absolutisme", yakni pemahaman yang menyatakan bahwa penguasa harus memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Para pembela absolutisme kerap mengejek para pengusung kebebasan individu dengan mengatakan bahwa "liberalisme" adalah paham yang membiarkan manusia untuk mengikuti kehendak "hewani" dirinya, tanpa memperdulikan konsekuensi dan hak-hak orang lain.

Locke merespon dengan mengatakan bahwa apa yang diinginkan para pengusung kebebasan adalah "Kebebasan untuk mengatur sendiri Diri, Tindakan, Harta Benda, dan seluruh Kepemilikan yang dipunyai, berdasarkan batas-batas yang diijinkan oleh Hukum; sehingga ia tidak menjadi subjek bagi Kehendak orang lain, tetapi menjadi subjek bagi kehendak dirinya sendiri."[5] Setiap orang punya hak untuk melakukan apapun yang ia inginkan—mengikuti kehendak dirinya sendiri, bukan mengikuti perintah orang lain, selama masih menghormati hak-hak orang lain.

Filsuf Michael Huemer menempatkan libertarianisme di atas apa yang ia sebut sebagai "moralitas akal budi", yang terdiri dari tiga elemen: "prinsip non-agresi" yang melarang individu untuk menyerang, membunuh, mencuri, dan memperdaya orang lain; "kesadaran terhadap sifat koersif sebagai sifat alami dari pemerintah … yang dibekingi oleh ancaman fisik bagi siapa saja yang tidak patuh terhadap ketentuan pemerintah"; dan "kecurigaan terhadap otoritas politik … bahwa pemerintan tidak boleh melakukan tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh entitas non-pemerintah seperti individu atau organisasi

lain”.[6] Huemer juga mengatakan, “titik tolak perbedaan antara libertarianisme dengan ideologi-ideologi yang lain terletak pada kata *otoritas*.”[7]

Kebebasan, Kemakmuran, dan Tata Sosial

Menjadi libertarian artinya memahami bagaimana kemakmuran tercipta; bukan oleh para politisi yang merumuskan undang-undang, tetapi oleh individu-individu bebas yang saling bekerja, mencipta, berkreasi, menabung, berinvestasi, menjual dan membeli, dan kesemuanya dilakukan berdasarkan penghormatan terhadap properti atau hak milik orang lain. “Properti” tidak hanya berarti “barang milikku” sebagaimana dipahami saat ini, tetapi, mengutip Locke, mencakup juga “Hak Hidup, Hak untuk Bebas, dan Hak Kepemilikan”.[8] Sebagaimana dikatakan oleh salah satu *founding father* Amerika Serikat, James Madison, “seseorang dapat dikatakan berhak atas harta bendanya, tetapi bisa juga dikatakan bahwa ia memiliki hak-hak selayaknya harta bendanya sendiri.”[9]

Empati dan kepedulian sosial mungkin cukup bagi sekelompok kecil orang untuk berinteraksi secara damai dan efisien, tetapi libertarian memahami bahwa keduanya tidak cukup untuk menciptakan kedamaian dan kerja sama yang harmonis di dalam skala masyarakat yang lebih besar di mana tidak semua orang dapat dan perlu berinteraksi secara tatap muka. Libertarian percaya pada penegakan dan supremasi hukum yang menerapkan aturan hukum tanpa pandang bulu kepada setiap orang dan tidak dapat dibengkokkan demi kepentingan segolongan orang. Hukum di dalam masyarakat yang bebas tidak diciptakan demi keuntungan golongan tertentu; hukum harus menghormati hak setiap individu tanpa kecuali, terlepas dari identitas jender, warna kulit, agama, bahasa, klan, atau identitas primordial lain.

Hak milik (properti) merupakan salah satu fondasi paling penting bagi terciptanya kerja sama berbasis voluntarisme di antara individu yang tidak saling mengenal. Properti tidak hanya berarti harta benda yang bisa kamu pegang ditanganmu; properti juga merupakan relasi yang kompleks antara hak dan kewajiban, yang dapat menuntun individu-individu yang tidak saling kenal agar dapat melaksanakan kerja sama dan pertukaran yang saling menguntungkan satu sama lain, karena melalui properti mereka memahami batasan-batasan mainnya—mana milik saya dan mana milik kamu—agar kemudian individu-individu ini dapat meningkatkan taraf hidupnya masing-masing. Hak properti yang terdefinisikan secara jelas, dijamin oleh hukum yang adil, dan dapat dipindahtangankan (*transferrable*) merupakan fondasi dasar bagi terjadinya kerja sama berbasis voluntarisme, bertumbuhnya kesejahteraan, kemajuan, dan kedamaian.[10] Oleh sebab itu, hak milik tidak hanya mencakup benda-benda yang bisa kamu pegang, tetapi mencakup juga seluruh entitas bisnis miliaran komoditas yang proses penciptaannya membutuhkan kerja sama ribuan bahkan puluhan ribu orang, entah itu produksi obat-obatan, pesawat terbang, sampai nasi yang terhidang di meja makan anda.

Ahli hukum yang juga seorang libertarian Richard Epstein menamakan salah satu bukunya dengan judul *Simple Rules for a Complex World* (*Kaidah Sederhana untuk Dunia yang Kompleks*).[11] Judul tersebut menjelaskan isi bukunya dengan sangat tepat: kita tidak memerlukan prinsip atau kaidah yang kompleks untuk menciptakan tata sosial yang kompleks pula. Kaidah sederhana saja cukup. Bahkan, kaidah atau aturan yang sederhana, mudah dimengerti, dan stabil lebih mungkin menghasilkan tata sosial ketimbang kaidah yang kompleks dan *njelimet* yang justru cenderung menghasilkan kekacauan.

Hak properti yang terdefinisikan dengan jelas dan kebebasan untuk melakukan pertukaran berdasarkan kesepakatan antara individu-individu yang terlibat akan berujung pada kooperasi berskala besar yang bebas dari pemaksaan. Pasar bebas menciptakan lebih banyak tata sosial ketimbang masyarakat yang aktivitasnya dikomandoi dan diatur-atur oleh politisi. Tata sosial yang muncul secara spontan dari pasar bebas jauh lebih efektif ketimbang rencana pembangunan lima tahunan yang dirancang pemerintah. "Institusi harga" yang timbul sebagai akibat dari perdagangan bebas antar individu akan menuntun sumber daya kepada tempat di mana ia akan digunakan paling optimal, tanpa memerlukan hadirnya otoritas birokrasi.[12] "Rencana" yang diterapkan melalui koersi atau pemaksaan pada hakekatnya justru bertentangan dengan makna perencanaan itu sendiri: ia tidak lain adalah semacam distorsi terhadap proses koordinasi harmonis yang tercipta akibat interaksi individu-individu yang tinggal di dalam institusi masyarakat yang bebas.

Tata sosial muncul akibat dari interaksi bebas di antara orang-orang yang dapat menikmati hak-hak mereka dengan aman. Tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga bahasa, adat istiadat, kebiasaan sosial, ilmu pengetahuan, bahkan hingga fashion dan gaya berpakaian. Segala bentuk upaya penggunaan kekuasaan untuk mengintervensi itu semua melalui, misalnya, perintah diktator, presiden, atau anggota legislatif, adalah upaya mengganti tata (*order*) dengan kekacauan (*chaos*), kebebasan dengan pemaksaan, dan harmoni dengan perselisihan.

Libertarian percaya pada, dan terus mengupayakan, dunia yang lebih damai, di mana hak masing-masing orang dihargai dan dihormati, sebuah dunia di mana pemerataan kesejahteraan terjadi berkat kerja sama antar individu yang berbasis voluntarisme, dengan sebuah sistem hukum yang melindungi dan memfasilitasi terjadinya aktivitas pertukaran yang saling menguntungkan satu

sama lain. Libertarian percaya pada, dan terus mengupayakan, pembatasan kekuasaan, penghapusan hukum dan undang-undang yang semena-mena, dan minimalisasi segala bentuk kekerasan. Libertarian percaya dan terus membela kebebasan untuk berpikir, untuk bekerja, dan untuk bertindak sesuai dengan pilihan masing-masing individu, selama terus menghormati dan memahami kebebasan orang lain. Libertarian percaya pada, dan terus mengupayakan, dunia di mana setiap orang dapat mengejar kebahagiaannya masing-masing, tanpa harus mendapatkan ijin dari pihak lain.

Jadi ... Kenapa Menjadi Libertarian?

Kenapa menjadi libertarian? Mungkin jawaban saya akan terdengar sepele, tetapi jawaban paling tepat untuk pertanyaan tersebut adalah: kenapa tidak? Sebagaimana beban pembuktian ada di pundak si penuduh, bukan yang dituduh, maka beban pembuktian bahwa manusia tidak boleh bebas ada pada orang-orang yang menyangkal kebebasan manusia, bukan para pembelanya. Seseorang yang ingin bernyanyi dan menari tidak perlu menjelaskan kenapa ia harus bernyanyi dan menari kepada semua orang di seluruh dunia hanya agar ia dapat bernyanyi dan menari. Tidak pula orang ini harus menyiapkan bantahan pada setiap argumen mengenai kenapa bernyanyi dan menari harus dilarang. Jika ia memang harus dilarang untuk bernyanyi dan menari, maka argumentasi dan penjelasan harus datang dari orang-orang yang melarang, bukan sebaliknya. Beban pembuktian ada pada pundak di pelarang. Dan pelarangan tersebut dapat saja kita terima apabila, misalnya nyanyian dan tariannya terlalu bersemangat sehingga menggangu ketenangan dan kenyamanan orang lain. Ini alasan yang masuk akal untuk melarang nyanyian dan tarian. Tetapi, lagi-lagi, dasar pelarangan tersebut adalah hak dan kebebasan orang lain, bukan untuk melarang kebebasan menyanyi dan menari itu sendiri.

Seorang libertarian adalah seseorang yang percaya pada asas kebebasan. Dan dengan menjalankan asas tersebut, kita dapat menciptakan suatu dunia di mana masing-masing orang dapat merealisasikan kebahagiaannya masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri, di mana orang-orang dapat dengan bebas melakukan pertukaran atau perdagangan yang saling menguntungkan, di mana perselisihan dan perbedaan diselesaikan dengan kata-kata, bukan dengan pentungan. Dunia tersebut tidak akan menjadi sebuah utopia yang ideal, tetapi akan tetap layak untuk kita perjuangkan.

2.

Seharusnya Tidak Perlu Undang-Undang

Oleh: John Stossel

Ketika dihadapkan pada masalah, orang-orang cenderung mengambil cara yang paling praktis: buat undang-undang. Tetapi undang-undang tidak selamanya efektif, karena pemaksaan jarang sekali mengubah keadaan menjadi lebih baik. Dan itulah hakekat undang-undang yang sebenarnya: pemaksaan dan eksekusi kekuasaan. John Stossel memulai karirnya sebagai jurnalis investigasi di ABC News, salah satu penggagas acara televisi 20/20, dan saat ini memandu acara Stossel *pada saluran* Fox Business News. Stossel *sendiri sudah pernah ditayangkan dua kali pada Konferensi Internasional Students for Liberty yang dihadiri oleh anggota Students for Liberty dari berbagai negara di dunia.*

Saya menjadi libertarian karena, salah satunya, saya melihat pilihan keliru yang ditawarkan oleh kelompok kiri dan kanan: kontrol pemerintah terhadap ekonomi—atau kontrol pemerintah terhadap kehidupan personal kita.

Masing-masing orang di kedua kubu merasa diri merekalah para pejuang kebebasan yang sesungguhnya. Aktivis kiri mengatakan peran pemerintah dapat mengurangi tingkat ketimpangan sosial. Sedangkan para konservatif kanan percaya peran pemerintah dapat membuat rakyat Amerika lebih bermoral. Saya berpendapat akan jauh lebih baik apabila kedua kubu tidak berupaya menggolkan agenda mereka melalui peran pemerintah.

Biarkan kedua kubu saling berdebat mengenai isu-isu seperti legalisasi narkoba dan kemiskinan, tetapi jangan sampai satu orang pun di antara mereka yang dipaksa tunduk oleh pemerintah kecuali dia telah mencuri atau menganiaya orang lain. Kecuali untuk membiayai ongkos yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan yang minimal, jangan biarkan siapapun mengambil uang orang lain secara paksa. Jika dihadapkan pada situasi yang meragukan, tinggalkan saja—atau serahkan pada mekanisme pasar atau institusi lain yang berbasis pada prinsip suka rela atau voluntarisme.

Sayangnya tidak semua orang berpikir seperti itu. Kebanyakan orang justru berpikir seluruh persoalan di dunia ini bisa selesai melalui undang-undang. Mereka menganggap para politisi tidak dapat menyelesaikan persoalan masyarakat karena para politisi tersebut malas dan bodoh. Padahal, kekuatan pemerintah berdasar pada asas pemaksaan, dan pemaksaan tidak pernah efisien.

Itulah sebabnya mengapa sebaiknya pemerintah tidak perlu bersusah-payah berupaya menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di dunia.

Kebanyakan orang percaya bahwa “pemerintah mampu!” Ketika dihadapkan pada persoalan, mereka mengatakan, “bikin undang-undang!”

Bahkan runtuhnya Uni Soviet, yang terjadi akibat terlalu mengandalkan perencanaan terpusat (*central planning*), tidak berhasil membuat orang-orang menjadi alergi terhadap pemerintahan besar. Orang-orang di Eropa sekarang mulai membicarakan “sosialisme pasar”. Para politisi di Amerika Serikat memimpikan “jalan ketiga” antara kapitalisme dan sosialisme, dan sebuah “kapitalisme terkelola”--di mana kebijakan para politisi kerap menggantikan kerja *invisible hand*.

George W. Bush berjanji akan membentuk pemerintahan yang ramping, tetapi kemudian ia mengesahkan program subsidi obat sebesar $50 miliar per tahun dan mendirikan birokrasi baru bernama No Child Left Behind. Di bawah pemerintahan Bush, Partai Republik menaikkan belanja diskresioner hingga dua kali lipat (tertinggi sejak Lyndon B. Johnson), menggalakan *drug war* (perang terhadap narkoba), dan merekrut 90.000 regulator baru.

Semua kebijakan ekspansionis ini tidak meredakan tuntutan media agar peran pemerintah terus ditambah.

Lalu datang masa pemerintahan Barack Obama yang membelanjakan banyak uang negara hingga cukup untuk membuat bangkrut anak-anak kita. Kebijakan ini memicu lahirnya gerakan Tea Party di pemilu tahun 2010.

Saya sempat sedikit berharap pada Tea Party, tetapi kemudian lagi-lagi saya harus kecewa. Hanya dalam beberapa bulan, para aktivis Tea Party yang seharusnya mewakili kelompok paling konservatif di tubuh Partai Republik ini justru mendukung kebijakan subsidi pertanian dan berjanji akan mempertahankan Medicare. Saya bergidik mendengar kandidat wakil presiden pasangan Mitt Romney, Paul Ryan, memaparkan rencana kebijakan defisit anggaran.

Sungguh menyedihkan bahwa Amerika Serikat, negara yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip libertarianisme, nampak ketakutan untuk mengakui bahwa pemerintah telah menjadi begitu besar. Negara-negara Asia Timur membuka pasar dan mereka tumbuh makmur. Swedia dan Jerman meliberalisasi sektor tenaga kerja dan perekonomian mereka tumbuh.

Tetapi Amerika Serikat terus saja mengesahkan undang-undang baru.

Persoalannya ada di persepsi kita sebagai manusia. Di tengah begitu banyaknya aktivitas dan transaksi pasar bebas, kita

menjadi begitu abai dan tidak acuh terhadap manfaat yang telah diberikan pasar bebas kepada kita. Saya bisa pergi ke suatu negara asing dan tetap bisa menarik dana hanya dengan menempelkan secarik kartu ke mesin ATM. Saya bisa berikan kartu yang sama kepada seseorang, dan orang tersebut akan menyewakan mobilnya kepada saya. Ketika saya pulang, Visa dan MasterCard akan mengirimkan tagihan atas semua transaksi tersebut hingga ke detail-detail yang paling kecil. Kita melihat keajaiban semacam ini sebagai hal kecil belaka.

Sebaliknya, pemerintah bahkan tidak mampu menghitung suara di hari pemilihan dengan benar.

Tetapi orang-orang terus mengandalkan pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat. Meski telah gagal berkali-kali sepanjang sejarah, masih banyak orang yang percaya pada peran perencana terpusat (*central planners*), dan hanya sedikit dari kita yang berani berpikir bahwa jangan-jangan sumber semua persoalan kita selama ini adalah pemerintahan yang terlalu eksesif.

Pemikir libertarian abad ke-20, H.L. Mencken, pernah berujar, “Para politisi (di pemerintahan) pada dasarnya hanyalah sekumpulan manusia biasa. Bahkan untuk urusan-urusan praktis posisi mereka jauh di bawah kebanyakan orang... . Namun para politisi ini, akibat kemalasan berpikir dan kebodohan kebanyakan orang ... ditempatkan pada posisi yang harus dipatuhi ... [dan] mereka dianggap memiliki kebijaksanaan dan kepintaran yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang.”

Tidak ada yang dapat dilakukan pemerintah yang tidak dapat kita lakukan sebagai individu-individu yang bebas—dan sebagai sekelompok individu yang saling bekerja sama dalam kebebasan.

Tanpa pemerintahan yang besar, kita bisa menggapai banyak hal. Kemungkinannya tak terbatas.

3.

Libertarianisme Sebagai Sentrisme Radikal

Oleh: Clark Ruper

Biasanya kita membayangkan spektrum ideologi politik sebagai sebuah garis lurus antara "kiri" dan "kanan". Apakah libertarianisme masih dapat dimasukkan ke dalam kategorisasi semacam itu? Clark Ruper, wakil presiden Students for Liberty, menawarkan cara pandang baru dalam melihat spektrum topologi politik dan bagaimana libertarianisme dapat menyediakan basis bagi perdebatan dan diskusi mengenai isu-isu kontemporer. Ruper mendapatkan gelar sarjana dalam bidang sejarah dari Universitas Michigan di Ann Harbor.

Spektrum kiri-kanan merupakan standar pemetaan topologi ideologi politik: jika kamu percaya X, maka kamu ada di kiri, dan jika kamu percaya Y maka kamu ada di kanan. X dan Y sendiri maknanya dapat berbeda-beda tergantung dengan siapa kamu bicara; opini kita terhadap suatu isu mendorong kita untuk menempatkan diri pada satu tempat di antara spektrum tersebut, meski pandangan kita terhadap banyak hal lainnya mungkin berada pada satu sisi spektrum yang berbeda. Lebih *absurd* lagi: sekarang banyak orang bilang bahwa "kedua ujung ekstrem dari spektrum tersebut bertemu, menjadikannya sebuah lingkaran penuh," di mana sebentuk kolektivisme ekstrem berada di kedua sisi spektrum tersebut. Maka ketika kamu mendengar istilah liberalisme klasik atau libertarianisme untuk pertama kali, kamu

mungkin bertanya-tanya ada di sisi mana ideologi ini di dalam spektrum "kiri-kanan" politik? Jawabannya: tidak keduanya.

Salah satu ide sentral di dalam ideologi kebebasan adalah penolakan kategorisasi standar kanan dan kiri di dalam politik. Libertarianisme adalah ideologi yang mempertanyakan dan menentang penggunaan kekuasaan politik. Daripada memilih untuk mendukung intervensi pemerintah di isu ini dan itu, libertarianisme memandang politik sebagai sebuah perjuangan kebebasan melawan kekuasaan. Para libertarian percaya sepenuh hati kutipan Lord Acton: "Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula."[13] Libertarianisme menolak untuk dimasukkan ke dalam kategori yang sama dengan kelompok yang mengadvokasi kekuasaan koersif di sisi kiri maupun kanan.

Spektrum tradisional kanan dan kiri biasanya mewakili komunisme di sisi kiri dan fasisme di sisi kanan, pelarangan tembakau di satu sisi atau pelarangan mariyuana di sisi lain, pelarangan bicara di satu sisi ... dan pelarangan bicara dalam bentuk lain di sisi yang lain. Mana yang koheren dan mana yang tidak koheren: libertarianisme atau spektrum kanan-kiri? Silakan dijawab sendiri.

Namun, jika kita paksakan libertarianisme untuk masuk ke dalam spektrum linier kanan-kiri, maka bisa dibilang bahwa libertarianisme menempati posisi tengah atau sentris yang radikal. Dalam analisis saya, libertarianisme bersifat radikal karena menelusuri persoalan sampai ke akarnya (dari asal kata *radix* di dalam bahasa Latin yang berarti 'akar') dan libertarian percaya pada prinsip kebebasan. Libertarianisme itu sentris karena dari tengah mereka memproyeksikan ide-ide mereka ke luar dan mempengaruhi partai dan ideologi-ideologi di spektrum yang lain. Oleh karena itu, bisa dibilang bahwa libertarianisme

menempati juga posisi kiri-tengah dan kanan-tengah. Lebih jauh, mayoritas penduduk negara-negara di dunia lebih tepat dikategorikan sebagai libertarian ketimbang ditempatkan pada kategori "kiri" atau "kanan".[14]

Libertarianisme adalah sebuah filosofi politik yang berlandaskan pada kebebasan individu. Seorang libertarian bisa menjadi "konservatif" maupun "progresif", relijius maupun irelijius, berpendidikan rendah atau tinggi, berstatus *single* atau berpasangan, dan seterusnya dan seterusnya. Yang menyatukan orang-orang yang masuk ke dalam kategori libertarian adalah penghargaan pada kebebasan individu di dalam berbagai isu kemanusiaan dan sosial. Kata David Boaz, salah seorang peneliti di Cato Institute: "yang membutuhkan pembenaran adalah kekuasaan, bukan kebebasan."[15] Libertarian adalah orang-orang yang konsisten dalam mempertahankan prinsip kebebasan dan mampu bekerja sama dengan kelompok lain dalam mengadvokasi isu kebebasan individu, perdamaian, dan pembatasan kekuasaan pemerintah.

Posisi libertarian sebagai sentris radikal telah banyak membentuk wajah peradaban dunia kontemporer. Jurnalis terkemuka Fareed Zakaria menulis:

> Mereka bilang liberalisme klasik sudah mati. Jika benar begitu, maka tulisan di batu nisan liberalisme klasik kurang lebih akan berbunyi seperti kutipan Sir Christopher Wren di salah satu dinding Katedral St. Paul: "*Si monumentum requiris, circumspice*." Jika kamu ingin melihat monumen(ku), lihat sekelilingmu. Perhatikan dunia yang kita tinggali saat ini—sekuler, saintifik, demokratis, kelas menengah. Suka atau tidak, inilah dunia yang diwariskan oleh liberalisme. Selama lebih dari dua ratus tahun, liberalisme (dengan sekutunya yang paling kuat, kapitalisme) berhasil meruntuhkan tata

> sosial lama yang berdiri selama lebih dari dua milenia: otoritas penguasa, dominasi agama, tuan tanah, dan raja-raja. Dari tempat lahirnya di Eropa, liberalisme menyebar di Amerika Serikat, dan sekarang sibuk mengubah wajah Asia.[16]

Libertarianisme (istilah kontemporer untuk menyebut liberalisme klasik) telah banyak membentuk wajah peradaban modern umat manusia secara signifikan. Di berbagai belahan dunia, telah banyak pertarungan ide yang dimenangkan libertarianisme: pemisahan otoritas agama (gereja) dari negara; pembatasan kekuasaan melalui undang-undang; kebebasan berbicara; mengganti sistem merkantilisme dengan perdagangan bebas; penghapusan perbudakan; penghargaan hak-hak terhadap kelompok minoritas, baik itu minoritas agama, etnis, dan jender; perlindungan terhadap hak milik; serta kekalahan fasisme, Jim Crow, apartheid, Nazi, dan komunisme. Terlalu banyak nama untuk disebutkan sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi perubahan tersebut, baik itu dari kalangan intelektual maupun aktivis. Tapi yang pasti mereka telah membuat dunia ini menjadi lebih baik—lebih adil, lebih damai, dan lebih bebas. Orang-orang ini menjadikan prinsip-prinsip dasar libertarianisme sebagai panduan dalam aktivitas politik mereka. Tetapi perjuangan belum usai. Generasi libertarian muda saat ini masih memiliki banyak hal yang mesti dilakukan untuk mempertahankan dan memperjuangkan kebebasan.

Bagaimana kelompok libertarian mampu memberikan banyak perubahan sosial tanpa menceburkan diri ke dalam sistem politik kepartaian? Kadang-kadang, kelompok libertarian membentuk partai mereka sendiri. Ini bisa dilihat dari eksistensi sejumlah partai liberal di Eropa dan sejumlah negara lain di dunia. Terkadang kelompok libertarian bekerja dalam partai-partai minor, seperti Partai Libertarian di Amerika Serikat, di

mana kandidat presidennya untuk pemilu presiden 2012, Gary Johnson, berhasil mendidik jutaan pemilih mengenai bahayanya program "perang narkotika" (*war on drugs*) dan berbagai inisiatif pemerintah yang lain. Namun kadang-kadang para libertarian juga berjuang lewat partai-partai arus utama, seperti pencalonan Ron Paul sebagai kandidat presiden di pemilu AS tahun 2008 dan 2012. Ron Paul berhasil mempromosikan ide-ide libertarianisme kepada ribuan anak-anak muda di AS dan berbagai negara lain lewat aktivitas kampanye dan debat. Bentuk aktivisme dan perjuangan libertarianisme memang bermacam-macam, tergantung konteks dan situasi politik di tiap-tiap negara. Tetapi, tiap kali kehadiran libertarianisme selalu memberikan nafas dan perspektif yang segar bagi spektrum politik di masing-masing negara.

Ambil contoh Amerika Serikat di tahun 1960-an, yang oleh banyak orang dianggap sebagai masa keemasan gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa di Amerika Serikat. Di spektrum kanan ada kubu konservatif Young Americans for Freedom (YAF). Di dalam AD/ART pendirian YAF tahun 1960, dinyatakan bahwa "kebebasan adalah (prinsip) yang tidak bisa ditawar-tawar, dan bahwa kebebasan politik tidak bisa berumur panjang tanpa hadirnya kebebasan ekonomi; Bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi kebebasan tersebut melalui upaya menjaga dan melestarikan ketertiban internal, memperkuat pertahanan nasional, dan penegakan keadilan; bahwa apabila pemerintah melakukan sesuatu yang di luar fungsinya, mereka akan mengakumulasi kekuasaan, di mana hal ini akan mengancam ketertiban dan kebebasan masyarakat;"[17] Anggota YAF yang paling dihormati, Senator Barry Goldwater, menyatakan bahwa "sikap esktrem dalam membela kebebasan bukanlah kejahatan, dan sikap moderat dalam menegakkan keadilan bukanlah sikap bijaksana."[18]

Di saat yang sama, Students for a Democratic Society (SDS) muncul sebagai representasi kubu kiri dan kelompok-kelompok yang menyuarakan kampanya anti-perang. Di dalam AD/ART pendirian SDS dinyatakan bahwa “kami memandang setiap insan manusia sebagai makhluk mulia yang memiliki potensi dan kapasitas akal budi, kebebasan, dan cinta kasih. Lunturnya utopia dan harapan merupakan salah satu karakteristik kehidupan masyarakat kita saat ini. Alasannya bermacam-macam: impian dan cita-cita pergerakan kiri telah diselewengkan oleh rejim Stalin ... tragedi kemanusiaan di abad dua puluh yang disimbolisasikan dengan kamar gas, kamp konsentrasi, dan bom nuklir. Saat ini, menjadi seorang idealis dapat dianggap sebagai seorang ekstremis dan berbahaya.”[19]

Mantan Presiden SDS, Carl Ogesby, menulis di dalam memoarnya yang berjudul *Ravens in the Storm*, “Libertarianisme adalah satu-satunya posisi politik yang dapat dengan luwes berbicara kepada kelompok kanan dan kiri, sesuatu yang telah saya upayakan sejak dulu ... Kenapa saya giat berkomunikasi dengan kelompok kanan apabila lebih banyak orang kiri yang setuju dengan pesan-pesan saya? Karena kampanye anti-perang akan lebih berhasil apabila kami berhasil menunjukkan bahwa kampanye ini didukung oleh kelompok kiri maupun kanan.”[20] Lebih jauh, “Sejak awal saya sadar bahwa lebih masuk akal untuk berbicara mengenai ‘sentris radikal’ dan ‘moderasi militan’. Maksudnya, kita harus radikal dalam analisis, tetapi harus mengambil posisi tengah atau moderat ketika berbicara dengan kelompok konservatif.”[21]

Meski berbeda posisi dalam berbagai hal dan isu—YAF menekankan kebebasan ekonomi dan oposisi terhadap sosialisme; SDS menekankan pentingnya hak-hak sipil dan perdamaian—namun secara menyeluruh keduanya dapat dikatakan sebagai pionir gerakan libertarianisme di era modern. Para pendiri dan petinggi pergerakan tersebut kemudian banyak yang berkarir

sebagai guru, jurnalis, profesor, politisi, dan berbagai posisi penting lain di dalam masyarakat. Mereka bersumpah setia pada nilai-nilai politik kiri atau kanan, tetapi seluruh argumen dan energi intelektual mereka berasal dari impuls-impuls libertarianisme.

Banyak pihak menganggap program perang terhadap *drugs* yang dicanangkan pemerintah sebagai sebuah kegagalan besar. Organisasi *think tank* libertarian seperti Cato Institute sejak lama telah mendokumentasikan efek buruk yang ditimbulkan dari program anti-narkotika dan membandingkannya dengan efek positif yang muncul dari tanggung jawab dan kebebasan personal. Ekonom libertarian, seperti Milton Friedman, telah banyak menjelaskan insentif yang salah akibat kebijakan pelarangan.[22] Ada banyak pula filsuf moral yang menjelaskan bagaimana masyarakat yang bebas dan menekankan tanggung jawab individual akan menghapus pelarangan terhadap kriminalitas tanpa korban, salah satunya Lysander Spooner yang menulis pamflet berjudul *Vices Are Not Crimes: A Vindication of Moral Liberty* [*Tindakan Imoral Bukan Kejahatan: Sebuah Pembelaan Terhadap Kebebasan Moral*] pada tahun 1875.[23] Berkat upaya kelompok libertarian dalam menunjukkan efek buruk dari kebijakan pelarangan—dalam hal moralitas, hukum, tingkat kriminalitas, dan banyak hal lainnya—semakin banyak pemimpin politik yang berani menentang program *war on drugs* tanpa merasa takut dicap “antek mafia narkoba”. Contohnya adalah presiden Meksiko, Guatemala, Kolombia, dan Brazil. Kesemuanya adalah negara-negara yang menderita akibat tindakan kriminal, kekerasan, dan korupsi yang diakibatkan oleh kebijakan pelarangan.[24]

Satu hal yang membuat kelompok libertarian unik adalah sikap mereka yang menjadikan kebebasan sebagai prinsip utama, sementara banyak kelompok lain yang mendukung kebebasan

ala kadarnya atau dengan syarat-syarat tertentu. Libertarianisme bukanlah filosofi kanan atau kiri. Libertarianisme adalah sentrisme radikal, sebuah ideologi bagi mereka yang mencintai kehidupan dan ingin hidup sepenuhnya, yang mencintai kebebasan bagi dirinya dan orang lain, dan yang menolak keras bentuk-bentuk kolektivisme klise dari kelompok kiri maupun kanan.

Ada di mana libertarianisme dalam spektrum politik kanan-kiri? Libertarianisme melampaui kategorisasi tersebut.

4.
Sejarah dan Struktur Pemikiran Libertarianisme

Oleh: Tom G. Palmer

Sejarah dapat menunjukkan bagaimana sebuah ide lahir dan saling berkaitan dengan ide-ide yang lainnya. Pada bab ini Tom Palmer akan menjabarkan ide kebebasan dari perspektif historis dan konseptual untuk menunjukkan bagaimana pemikiran libertarianisme dapat menghadirkan suatu pemahaman mengenai dunia yang koheren dan bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesamanya.

Meski elemen-elemen dasar libertarianisme dapat kita temukan di sepanjang sejarah peradaban manusia, tetapi libertarianisme sebagai sebuah filosofi politik muncul di abad modern. Libertarianisme adalah produk filsafat modern mengenai kebebasan individu, sebagai antitesis bagi ide mengenai penghambaan (*serfdom*) dan kepatuhan (*subservience*); mengenai sistem hukum yang berbasis pada hak individu, sebagai antitesis dari eksekusi kekuasaan yang semena-mena; mengenai penciptaan kemakmuran secara mutualistik melalui kebebasan untuk bekerja, kerja sama voluntaristik, dan pertukaran, sebagai antitesis dari kerja paksa, kerja berdasarkan tekanan, dan eksploitasi; dan mengenai toleransi dan koeksistensi antar agama, gaya hidup, kelompok etnis, dan berbagai identitas kemanusiaan lain, sebagai antitesis dari konservatisme agama,

tribalisme, dan etnisisme. Libertarianisme adalah filosofi dunia modern dan saat ini sedang berkembang pesat di kalangan anak-anak muda di seluruh dunia.

Untuk memahami fenomena tumbuhnya gerakan libertarianisme di berbagai negara di dunia, pertama-tama kita harus memahami ide utama yang menjadi basis bagi filsafat politik dari libertarianisme. Kita bisa memahami berbagai ide dan filsafat politik dengan berbagai macam cara. Kita bisa mempelajarinya secara historis untuk memahami bagaimana ide tersebut muncul sebagai respon terhadap suatu persoalan atau isu. Dalam banyak hal, ide itu mirip dengan perkakas kerja—bedanya: ide adalah perkakas mental yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain dan dengan dunia secara keseluruhan. Untuk memahami suatu perkakas, kita bisa mempelajari persoalan-persoalan yang menjadi alasan mengapa perkakas-perkakas tersebut diciptakan. Studi historis dapat membantu kita memahami ide-ide. Kita juga bisa mempelajari ide dan filsafat politik dengan mempelajari relasi logis di antara konsep-konsep atau ide-ide yang ada. Misalnya, kita mempelajari bagaimana keadilan, hak, hukum, kebebasan, dan tatanan sosial saling berinteraksi dan memberikan makna satu sama lain.[25] Pembahasan di dalam bab ini merupakan sebuah pengantar singkat mengenai dua pendekatan tersebut dalam memahami ide dan filsafat politik libertarianisme.

Libertarianisme Dipahami Secara Historis

Dilihat secara historis, libertarianisme adalah bentuk modern dari liberalisme. Istilah “liberalisme”, terutama di Amerika Serikat, telah kehilangan makna awalnya. Sebagaimana dikatakan oleh ekonom Joseph Schumpeter, “seolah-olah sebentuk pujian tertinggi, meski mungin tidak disengaja, musuh-musuh dari sistem usaha privat justru sekarang menggunakan label yang mereka musuhi.”[26] Istilah liberalisme sendiri masih

banyak digunakan di berbagai belahan dunia dalam makna yang sama dengan libertarianisme atau "liberalisme klasik" di AS. Namun, karena adanya pergeseran makna, orang-orang di AS mengadopsi nama libertarianisme, yang memiliki akar kata yang sama dengan *liberty* dalam bahasa Latin, untuk membedakan diri dengan "liberalisme" ala Amerika Serikat. Istilah libertarianisme juga kerap digunakan untuk membedakan jenis liberalisme yang konsisten dari jenis liberalisme yang fleksibel dan pragmatik. (Di banyak negara, masyarakatnya menggunakan satu istilah untuk menerjemahkan liberalisme ala AS dengan libertarianisme; di Hungaria, misalnya, menggunakan kata szabadelvűség dan liberalizmus untuk liberalisme/libertarianisme).

Jadi dari mana asal-usul liberalisme? Liberisme lahir di Eropa dan beberapa wilayah lain di dunia sebagai respon pertahanan bagi sebuah cara baru hidup bermasyarakat yang berlandaskan pada nilai perdamaian, toleransi, dan kerja sama serta pertukaran yang saling menguntungkan dan bersifat suka rela. Liberalisme mencoba mempertahankan nilai-nilai kehidupan tersebut dari doktrin absolutisme yang mendukung peran penuh pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat. Melalui perdebatan dan perang ide yang sengit mengenai lingkup dan peran kekuasaan, ide liberalisme menjadi semakin tajam, radikal, dan kokoh.

Perdagangan dan aktivitas komersial mulai meningkat sejak Abad Pertengahan, khususnya karena munculnya komune-komune independen, yakni kota-kota otonom yang terlindung dari serangan pembajak, perompak, dan musuh-musuh lainnya berkat tembok pembatas yang tinggi.[27] Kota-kota baru—tempat terjadinya produksi dan perdagangan—mulai banyak didirikan di seluruh Eropa. Di masa tersebut, kota dan peradabannya dianggap sebagai tempat bagi kebebasan personal, sebagaimana diekspresikan di dalam slogan Jerman kuno "*Stadtluft macht frei*" ("Udara kota membuatmu bebas"), dan perdamaian.[28]

Seorang sejarawan menulis, "Tanpa kebebasan, yakni tanpa kemampuan untuk datang dan pergi, melakukan (transaksi) bisnis, untuk menjual barang-barang, singkatnya: kemampuan yang tidak dimiliki di dalam masyarakat yang tidak bebas, maka perdagangan dan aktivitas komersial menjadi tidak mungkin."[29] *Civil society* (berasal dari kata *civitas* yang berarti kota) atau masyarakat beradab merujuk pada karakteristik masyarakat yang muncul di kota-kota tersebut. Lebih jauh, istilah *civil* juga digunakan untuk merujuk pada bagaimana kita seharusnya memperlakukan orang lain: secara *civil* atau beradab. Menjadi beradab berarti berperilaku sopan kepada orang asing, bersikap jujur, dan menghargai hak orang lain. Kota-kota baru tersebut juga ditandai dengan hadirnya semacam lembaga perwakilan atau dewan masyarakat yang berdiskusi dan berdebat mengenai hukum dan peraturan publik. Seiring dengan itu, berkembang pula konsep baru mengenai "*civil rights*" atau hak-hak sipil, yakni hak-hak yang dibutuhkan agar tercipta sebuah *civil society*.

Ketika perdagangan makin marak dan kemakmuran mulai terakumulasi, raja-raja mulai mengembangkan sistem militerisme modern untuk melindungi kekuasaan mereka terhadap aristokrasi feodal (yang tumbuh berkat perang dan kekerasan) dan kota-kota baru (yang tumbuh berkat aktivitas bebas dan voluntaristik). "Revolusi militer" ini yang kemudian menjadi basis bagi lahirnya "negara modern", di mana kekuasaan diberikan kepada satu orang raja atau pemimpin negara.[30]

Sistem politik tersentralisasi dan monarkis semacam itu berhasil menggantikan, menguasai, dan mengasimilasi sistem-sistem politik lain di wilayah Eropa, termasuk sistem "negara-kota", kota-kota perdagangan Perserikatan Hanseatic, Kekaisaran Romawi, dan berbagai asosiasi politik lainnya. Ketika "kedaulatan" negara modern semakin berkembang, mereka mengklaim diri mereka "berada di atas hukum" dan mulai mengeksekusi kekuasaan

absolut terhadap berbagai aktivitas masyarakat.[31] Lebih jauh, para raja kemudian mengklaim bahwa mereka memiliki "hak ilahiah" untuk menjalankan kekuasaan secara absolut. Pada titik ini, kekuasaan sekuler dan hierarki religius saling berkelindan. Seringkali kekuasaan sekuler yang mendominasi aspek religius, namun tidak jarang pula yang sebaliknya. Yang terakhir ini disebut sebagai kekuasaan teokratik.

Doktrin absolutisme menyatakan bahwa posisi penguasa berada di atas hukum. Ini berkebalikan dengan tradisi sebelumnya yang menyatakan bahwa hukum, bukan kekuasaan personal, yang seharusnya berada di tempat tertinggi. Raja James VI dan I (awalnya Raja James VI di Skotlandia, lalu menjadi Raja James I di Inggris pada tahun 1603), berkata pada tahun 1598, "Raja merupakan penguasa seluruh wilayah; maka ia juga merupakan penguasa atas setiap orang yang mendiami wilayah tersebut, ia memiliki kuasa untuk menentukan hidup matinya orang-orang tersebut. Meskipun raja yang adil dan bijaksana tidak akan pernah mencabut nyawa seseorang tanpa dasar hukum yang jelas, tetapi patut diketahui bahwa hukum tersebut dibuat oleh sang raja atau para pendahulunya, sehingga kekuasaan selalu berasal dari sang raja itu sendiri ... Saya sudah sering membuktikan bahwa Raja berdiri di atas hukum."[32]

Sistem politik absolutisme memiliki teori ekonomi yang menyertainya: merkantilisme, yakni ide bahwa raja dan birokrasinya harus mengarahkan aktivitas industri, melarang usaha ini dan menyubsidi yang lainnya, memberikan hak monopoli pada perusahaan-perusahaan tertentu (praktek yang sekarang disebut kroniisme), "melindungi" pengusaha lokal dari serbuan barang impor asing yang murah, dan secara umum mengelola perdagangan demi keuntungan penguasa negara.[33]

Liberalisme muncul sebagai sebuah pembelaan terhadap kebebasan masyarakat sipil terhadap klaim kekuasaan absolut, monopoli, privilese, merkantilisme, proteksionisme, perang, dan hutang pemerintah, sambil terus memperjuangkan hak-hak sipil dan supremasi hukum. Gerakan liberalisme sendiri mengambil inspirasi dan ide dari banyak pihak. Salah satu yang paling terkenal adalah para cendekiawan Skolastik Salamanca di Spanyol, yang pro terhadap pasar bebas dan membela hak masyarakat Indian yang dijajah oleh para penjelajah Spanyol. Para cendekiawan Salamanca juga menganut doktrin hukum alamiah (*natural law*) dan hak alamiah (*natural rights*) yang dirumuskan oleh para pemikir Belanda dan Jerman. Tetapi, banyak pihak sepakat bahwa gerakan libertarian yang utuh pertama muncul pada saat periode perang sipil di Inggris: kubu the Levellers.[34] Para aktivis the Levellers berada pada pihak parlemen selama Perang Sipil Inggris (1642-1651). Mereka memperjuangkan pemerintahan konstitusional terbatas, kebebasan beragama, kebebasan berdagang, perlindungan terhadap hak milik, hak untuk bekerja, dan kesetaraan untuk semua. Mereka adalah kelompok radikal, abolisionis, dan pembela perdamaian dan hak asasi manusia. Mereka adalah libertarian.

Ide-ide tersebut—hak-hak individu, pemerintahan terbatas, kebebasan berpikir, berkeyakinan, berbicara, berdagang, berproduksi, dan berpindah tempat—membuka banyak pikiran, memutus tradisi-tradisi kuno, dan melahirkan kemakmuran yang luar biasa bagi masyarakat biasa. Perbudakan berhasil dihapuskan di Eropa, di Amerika Utara, dan di Amerika Latin. Puncaknya adalah penghapusan perbudakan di Brazil pada 3 Mei 1888. Feodalisme runtuh. Rakyat jelata mulai berkuasa atas diri mereka masing-masing, terkadang sekaligus, terkadang bertahap: Austria di tahun 1781 dan 1848; Denmark di tahun 1788; Serbia di tahun 1804 dan 1830; Bavaria di tahun 1808;

Hungaria dan Kroasia di tahun 1848; Russia di tahun 1861 dan 1866; dan Bosnia dan Herzegovina di tahun 1918.

Gerakan kebebasan tidak hanya menyebar di Eropa dan negara-negara koloninya, tetapi juga di negara-negara Islam, China, dan lainnya. Konsep kebebasan bukan merupakan produk dari satu kebudayaan tertentu; setiap kebudayaan dan tradisi memiliki narasi kebebasannya masing-masing, selain juga narasi tentang kekuasaan. Sejarah Eropa melahirkan sosok seperti Adam Smith dan Voltaire, tetapi melahirkan juga Mussolini, Lenin, dan Hitler. Marx, yang doktrin dan idenya mengenai pertentangan kelas menyebar di China selama puluhan tahun, bukan keturunan China, melainkan Jerman. Kebijaksanaan dan ide-ide libertarianisme dapat ditemukan di berbagai kebudayaan di dunia, sebagaimana ide-ide tentang kekuasaan absolut. Libertarianisme mengakarkan diri di seluruh dunia, menjalin koneksi dengan tradisi libertarian lokal, khususnya di Afrika dan Asia, selain juga merestorasi koneksi di Eropa, Amerika Latin, dan Amerika Utara.

Gerakan libertarian kontemporer tidak saja mengambil pelajaran dari pengalaman para aktivis liberal era awal dalam melawan absolutisme, tetapi juga belajar dari pengalaman buruk banyak negara-negara di dunia ketika bereksperimen dengan salah satu ancaman paling mengerikan bagi kebebasan dan peradaban: totalitarianisme kolektivis. Pada abad kesembilan belas, gelombang pemikiran libertarianisme mulai mencapai titik puncaknya. Berbagai ideologi politik baru, terinspirasi dari tradisi lama mengenai kekuasaan, mulai muncul untuk menantang liberalisme. Imperialisme, rasisme, sosialisme, nasionalisme, komunisme, fasisme, dan berbagai kombinasi dari ideologi-ideologi tersebut, kesemuanya berdasar pada premis fundamental mengenai kolektivisme. Di dalam doktrin kolektivisme, individu tidak dilihat sebagai subjek yang otonom;

jauh lebih penting daripada hak individu, kata para koletivis, adalah hak dan kepentingan bangsa, kelas sosial, atau ras, yang diekspresikan melalui kekuasaan negara.

Tahun 1900 editor *The Nation*, E. L. Godkin, menulis di dalam sebuah tajuk, “Hanya segelintir orang, dan mayoritas orang tua, yang masih menjunjung tinggi doktrin-doktrin liberalisme. Jika orang-orang ini sudah tiada, tidak ada lagi yang akan membela liberalisme.” Lebih jauh, Godkin juga meramalkan opresi dan perang besar yang akan memakan jutaan nyawa di abad berikutnya: “Tidak lagi kita dengar argumen mengenai hak-hak alamiah, kecuali terkait dengan ras-ras minoritas, di mana mereka harus tunduk pada pemerintah yang dikelola oleh sekelompok ras yang dianggap lebih superior. Miskonsepsi mengenai hak ilahiah lagi-lagi menunjukkan kekuatan merusaknya, dan sebelum kita bisa mengalahkan miskonsepsi ini sekali lagi, tampaknya harus ada perlawanan besar berskala internasional terlebih dahulu.”[35] Prediksi ini benar adanya. Di abad berikutnya kita melihat pembunuhan massal dalam skala yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, sistem perbudakan massal, dan perang dunia mengkoyak-koyak Eropa, Eurasia, Asia, dan meleber hingga Amerika Latin, Afrika, dan Timur Tengah.[36]

Tantangan yang dihadapi oleh kebebasan individu dari ide kolektivisme secara signifikan juga mempengaruhi respon para libertarian sendiri. Salah satunya adalah penekanan kembali kepada elemen-elemen penting di dalam pemikiran libertarianisme, yang kesemuanya ditolak oleh ideologi kolektivis seperti sosialisme, komunisme, Sosialisme Nasionalis, dan fasisme:

- Keutamaan manusia individu sebagai unit moral paling fundamental ketimbang kelompok kolektif seperti negara, kelas sosial, atau bangsa;

- Individualisme dan hak setiap insan manusia untuk mengejar kebahagiannya sendiri-sendiri dengan caranya masing-masing;
- Hak properti privat dan ekonomi pasar sebagai mekanisme pengambilan keputusan dan koordinasi yang damai dan terdesentralisasi, di mana pengambilan keputusan diambil secara parsial oleh jutaan bahkan miliaran orang yang saling berinteraksi;
- Pentingnya prinsip kesukarelaan atau voluntarisme di dalam berserikat atau menjalin relasi, misalnya dalam berkeluarga, komunitas keagamaan, bertetangga, membangun bisnis, membuat serikat pekerja, asosiasi profesional, dan berbagai relasi sosial lainnya sebagai tempat bagi individu untuk berkumpul dengan individu-individu lain yang memiliki kesamaan identitas;
- Pentingnya untuk terus curiga dan was-was terhadap negara dan konsentrasi kekuasaan di tangan militer dan eksekutif negara.

Banyak tokoh yang sangat berperan dalam menghidupkan kembali pemikiran libertarianisme pasca berakhirnya Perang Dunia II. Di tahun 1943, ada tiga buku yang diterbitkan di Amerika Serikat yang berhasil mengembalikan ide-ide libertarianisme ke dalam diskusi publik: *The Discovery of Freedom* karya Rose Wilder, *The God of the Machine* karya Isabel Paterson, dan novel bestseller *The Fountainhead* karya Ayn Rand. Pada tahun 1944 di Amerika Serikat Ludwig von Mises menerbitkan buku *Omnipotent Government: The Rise of the Total State and the Total War*, dan di Britania Raya F. A. Hayek menerbitkan buku bestseller-nya *The Road to Serfdom*. Buku Hayek kemudian diterbitkan juga di negara-negara lain dan mendapatkan banyak pujian. Hayek juga membentuk Mont Pelerin Society, sebuah perhimpunan internasional yang terdiri dari para cendekiawan

liberal klasik yang mengadakan pertemuan pertamanya pada tahun 1947 di Swiss. Selain itu juga banyak bermunculan buku-buku, perhimpunan, organisasi, rumah-rumah penerbit, *think tank*, organisasi mahasiswa, partai politik, dan banyak lagi yang lainnya.[37]

Banyak *think tank* dibentuk untuk mempromosikan ide-ide liberalisme klasik. Gelombang pertama muncul di tahun 1940-an dan 1950-an, dengan berdirinya organisasi yang penuh semangat seperti Institute for Public Affairs di Australia (1943), Foundation for Economic Education di Amerika Serikat (1946), dan Institute of Economic Affairs di Britania Raya (1955). Cato Institute didirikan di AS pada tahun 1977 dan Timbro di Swedia pada tahun 1978, sebagai bagian dari gelombang kedua perkembangan gerakan libertarian di Eropa dan Amerika. (Setelahnya, ada ratusan *think tank* dan organisasi lainnya yang didirikan yang hampir kesemuanya berafiliasi dengan Atlas Network, yang didirikan oleh Sir Antony Fisher, yang juga merupakan pendiri Institute of Economic Affairs.) Muncul juga intelektual terkemuka yang mengikuti jejak Paterson, Lane, Rand, Mises, dan Hayek, seperti filsuf Robert Nozick, H. B. Acton, dan Anthony Flew, serta banyak ekonom pemenang Nobel seperti James Buchanan, Milton Friedman, Ronald Coase, George Stigler, Robert Mundell, Elinor Ostrom, dan Vernon Smith, yang terus mengembangkan argumen-argumen libertarian dan mengaplikasikan ide-ide libertarian untuk menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi, hukum, dan politik.

Ide libertarian kemudian mendapatkan banyak pengikut dan pengagum di wilayah Timur Tengah, Afrika, Asia, Amerika Latin, dan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet, dan lagi-lagi libertarianisme beradaptasi dengan persoalan-persoalan baru, terutama terkait pembangunan dan penguatan institusi masyarakat sipil yang sesuai dengan konteks dan tradisi

masyarakat setempat. Contohnya adalah pembentukan kebiasaan untuk berdiskusi secara damai; penghormatan terhadap individu lain, terlepas dari identitas jender, ras, agama, seksualitas, dan bahasa; sistem peradilan yang independen sebagai mekanisme penyelesaian konflik secara damai; sistem perlindungan hak milik pribadi yang terdefinisikan secara jelas, aman, dan mudah dipindahtangankan, sebagai cara untuk menciptakan kemakmuran melalui perdagangan; kebebasan pers dan diskusi publik; serta tradisi dan institusi untuk terus mengawasi penerapan kekuasaan.

Itulah ikhtisar singkat dari sejarah perkembangan ide libertarianisme. Sekarang mari kita pelajari libertarianisme dari aspek konseptualnya.

Libertarianisme Dipahami Secara Konseptual: Tiga Tiang Penyangga Libertarianisme

Kursi yang hanya memiliki satu kaki tidak akan bisa berdiri. Tambahkan satu kaki lagi dan kursi tersebut bisa didirikan, meski tetap akan terjatuh. Tambahkan kaki ketiga untuk membuat *tripod* dan kursi tersebut dapat berdiri stabil dan digunakan untuk duduk. Ide juga seperti itu. Ide—mengenai hak, keadilan, tatanan sosial, hukum—tidak dapat berdiri sendiri. Mereka saling mengisi makna satu sama lain. Seperti sebuah *tripod*, mereka saling menyangga satu sama lain.

Libertarianisme didasarkan pada ide fundamental mengenai kebebasan; para libertarian percaya bahwa kebebasan merupakan nilai politik yang paling tinggi. Namun itu tidak berarti bahwa kebebasan menjadi nilai yang paling penting dalam hidup: kehidupan manusia begitu kompleks. Kita jatuh cinta, menyukai seni dan keindahan, memegang teguh iman religius, dan banyak hal lainnya. Politik tentu saja bukan satu-satunya aspek kehidupan yang penting bagi manusia. Tetapi bagi libertarian,

kebebasan merupakan tujuan utama yang ingin direalisasikan di dalam politik. Aspek politik adalah soal menegakkan keadilan dan perdamaian, juga soal bagaimana mendistribusikan kemakmuran, dan para libertarian memiliki tradisi panjang dari liberalisme klasik yang melihat seluruh prinsip dan nilai-nilai tersebut sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan.

Tripod libertarianisme terdiri dari tiga pilar utama:

Hak individu: individu memiliki hak yang sudah ada sebelum hadirnya asosiasi politik; hak bukan merupakan dispensasi dari kekuasaan, tetapi dapat digunakan melawan kekuasaan; sebagaimana Nozick memulai karya klasiknya *Anarchy, State, and Utopia*, "Individu memiliki hak, dan ada hal-hal yang tidak seorang pun dapat melakukan sesuatu terhadapnya (tanpa melanggar hak-hak orang tersebut)."[38]

Spontaneous Order: banyak orang berasumsi bahwa semua tatanan (*order*) pasti berasal dari perencanaan atau desain yang teliti. Tetapi jenis ketertiban atau tatanan di dalam masyarakat bukan merupakan hasil dari perencanaan dan desain yang disengaja, tetapi muncul dari interaksi suka rela di antara orang-orang yang bebas mengeksekusi hak-hak mereka;

Peran pemerintah yang terbatas secara konstitusional: hak individu membutuhkan perlindungan dari institusi yang diberikan mandat untuk melaksanakan perlindungan tersebut, tetapi institusi ini juga dapat menjadi ancaman yang paling berat dan serius bagi hak-hak individu. Oleh karena itu, institusi ini mesti dibatasi melalui mekanisme konstitusional, misalnya pemisahan dan kompetisi di antara pemegang kekuasaan, sistem hukum yang independen dari pemerintah eksekutif, dan penerapan prinsip supremasi hukum di atas kekuasaan.

Masing-masing dari ketiga pilar di atas saling meyokong satu sama lain. Hak mesti terdefinisikan dengan jelas dan dilindungi

oleh institusi hukum; ketika hal terdefinisi secara jelas dan dilindungi undang-undang, tatanan atau ketertiban akan muncul secara spontan; ketika tatanan sosial muncul tanpa arahan atau desain sekelompok orang, masing-masing anggota masyarakat akan cenderung menghormati hak-hak individu lainnya; dan ketika masing-masing individu terbiasa menghormati hak-hak dirinya dan orang lain, mereka akan cenderung meminta kekuasaan pemerintah dibatasi.

Hak-hak Individu

Ide libertarianisme mengenai hak muncul sebagai perjuangan kebebasan beragama dan kebebasan kelompok masyarakat lemah yang lama menderita penindasan dari kelompok yang lebih kuat. Pemikir Spanyol, Fransisco de Vitoria, menulis di dalam bukunya yang terkenal yang terbit pada tahun 1539 mengenai suku Indian di Amerika untuk membela hak-hak suku asli Amerika terhadap brutalitas dan penindasan yang dibawa oleh Kerajaan Spanyol. Fransisco de Vitoria mengatakan bahwa suku Indian memiliki tanggung jawab moral terhadap tindakan mereka masing-masing ("dominium") dan menyimpulkan bahwa,

> Kelompok barbar [istilah yang lazim digunakan pada zaman itu untuk merujuk orang-orang non-Eropa dan non-Kristen] tidak diragukan lagi bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri (*possessed as true dominion*), baik secara publik maupun privat sebagaimana orang-orang Kristen. Artinya, tidak ada seorang pun yang dapat merampas properti mereka, entah oleh masyarakat sipil maupun oleh pangeran, atas alasan bahwa orang-orang barbar bukan tuan yang sejati bagi diri mereka sendiri (*ueri dominion*).[39]

Suku Indian, menurut Vitoria dan para pengikutnya, memiliki hak terhadap hidup, properti, dan tanah leluhur mereka

sebagaimana masyarakat Spanyol. Mereka memiliki hak, dan pelanggaran terhadap hak tersebut merupakan ketidakadilan yang mesti dilawan. Ide mengenai tanggung jawab moral dan hak memiliki dampak yang mendalam terhadap diskursus mengenai kemanusiaan secara umum; yang terpenting bukan persoalan anda lahir dalam situasi atau kondisi macam apa. Setiap orang adalah agen moral, makhluk yang bertanggung jawab terhadap tindakan dan pilihan yang dia ambil.

Pada saat yang hampir bersamaan, para pembela kebebasan beragama berpendapat, kadang dengan berkorban nyawa, bahwa karena manusia adalah makhluk yang memiliki tanggung jawab dan mampu berpikir, bertindak, dan memilih untuk dirinya sendiri, maka pilihan beragama harus berasal dari pilihan masing-masing individu, bukan berasal dari pemaksaan. Hak untuk memeluk suatu kepercayaan atau agama itu adalah sebuah hak, bukan privilese yang diberikan oleh penguasa. Teolog terkemuka John Calvin pernah mendukung dan membela pembunuhan terhadap pengkritiknya yang paling tajam, Servetus, di Jenewa karena Servetus menyebarkan pemahaman yang berbeda mengenai gospel. Alasan Calvin: pihak penguasa memiliki kewajiban untuk mempertahankan pemahaman agama yang paling benar dan sejati. Pendukung kebebasan beragama terkemuka abad keenam belas, Sebastian Castellio, memberikan respon langsung kepada Calvin: "Pembunuhan terhadap seseorang bukanlah tindakan untuk membela doktrin, pembunuhan adalah pembunuhan. Ketika warga Jenewa membunuh Servetus, mereka tidak sedang membela suatu doktrin, mereka sedang membunuh seseorang."[40] Doktrin seharusnya disebarkan dan dibela menggunakan argumen dan kata-kata untuk mengubah pikiran orang lain, bukan dengan senjata dan api untuk menghanguskan tubuh individu lain yang tidak sepaham. Penyair Inggris, John Milton, menulis di dalam argumen pembelaannya terhadap kebebasan pers, *Aeropagetica*,

"seninya ada di kemampuan kita untuk memahami hal-hal apa saja yang dilarang dan dijatuhi sanksi oleh hukum, dan apa saja yang berfungsi melalui persuasi."[41]

Para pendukung kebebasan individu di periode-periode awal ini, yang memperjuangkan kesetaraan hak terlepas dari agama, ras, jender, atau karakteristik aksidental lainnya, mendapatkan tantangan serius dari para pendukung aboslutisme dan teokrasi, bahwa jika masing-masing orang diberikan hak untuk mengatur hidupnya masing-masing, maka tidak akan ada perencanaan yang matang bagi pembangunan masyarakat dan akan terjadi kekacauan sosial. Para pendukung absolutisme mengatakan bahwa harus ada seorang pemimpin, seseorang yang memiliki kuasa untuk memaksakan tata tertib kepada masyarakat yang hiruk-pikuk. Jika tidak, kamu tidak akan tahu harus melakukan apa, bekerja sebagai apa, bagaimana seharusnya menyembah Tuhan, baju apa yang harus dikenakan, atau seberapa banyak uang yang harus dibelanjakan atau ditabung.

Tatanan Spontan

Prinsip moral penghormatan terhadap hak-hak individu tidak bisa dengan sendirinya menjawab tantangan tersebut, sampai ketika para ilmuwan sosial mulai berhasil menjawab rahasia dari tatanan sosial kompleks. Sebagaimana para entomologis menemukan bahwa tatanan relasi yang kompleks pada komunitas lebah tidak "diatur" oleh seekor ratu lebah yang mengeksekusi kekuasaan absolut dan menyebarkan perintah kepada lebah-lebah lain, para ilmuwan sosial menemukan bahwa tatanan sosial di dalam masyarakat manusia yang kompleks juga tidak "diatur" oleh seorang atau segelintir penguasa yang memerintahkan para peternak sapi kapan harus memerah susu dan pada harga berapa susu tersebut harus dijual, menetapkan jumlah uang, dan secara umum memberikan perintah untuk mewujudkan sebuah

masyarakat yang tertib dan teratur. Para ilmuwan sosial ini justru menemukan bahwa jika kita ingin membentuk masyarakat yang tertib dan teratur, maka kita harus berpegang pada maksim "*Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même!*" ("*Biarkan dan lepaskan, dunia bekerja dengan sendirinya!*") sebagaimana dikutip dari pemikir libertarian awal Jacques Claude Marie Vincent de Gournay pada abad ke delapan belas.[42]

Tatanan yang kompleks tidak bisa begitu saja diatur-atur. Bahasa, pasar ekonomi, hukum masyarakat, dan banyak bentuk-bentuk koordinasi kompleks lain di antara manusia yang tidak saling mengenal dapat muncul, bukan sebagai akibat dari rencana dan desain yang dibikin oleh otak seorang pemimpin (beserta penasehat-penasehatnya), tetapi sebagai efek samping dari interaksi jutaan orang yang mengikuti prinsip-prinsip sederhana, sebagaimana gerombolan burung, ikan, dan lebah dapat membentuk koordinasi kompleks tanpa ada arahan dari siapa pun.

Ini memang sulit dimengerti. Ketika kita melihat tatanan yang tertib dan harmonis, secara instingtif kita akan mencari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas ketertiban tersebut. Jika saya melihat kursi-kursi berbaris rapi, saya akan bertanya "siapa yang menyusun kursi-kursi ini?" Tetapi kebanyakan tatanan tertib, termasuk ketertiban di dalam pasar ekonomi, mengutip ekonom pemenang Nobel James Buchanan, hanya dapat terdefinisikan melalui proses kemunculannya: "'tatanan' pasar hanya muncul dari proses pertukaran suka rela di antara individu-individu yang terlibat. 'Tatanan' itu merupakan hasil dari proses yang menghasilkannya. 'Hasil' tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses pertukaran yang terjadi. Hilangkan prosesnya, maka tidak akan ada 'tatanan' tersebut."[43] Ini bukan merupakan hal yang mudah dipahami manusia, karena kita cenderung mencari pencipta ketertiban ketika kita menemukan tatanan. Tetapi jika

diperhatikan baik-baik, apa yang kita anggap sebagai tatanan yang kompleks muncul dari prinsip-prinsip yang sederhana. Ini berlaku juga bagi tatanan kompleks terkait kooperasi tindakan manusia.

Jika kita memahami bagaimana perlindungan terhadap hak-hak individu dapat menghasilkan tatanan sosial yang tertib, maka ide mengenai hak individu dapat lebih mudah kita terima. Lalu, bagaimana cara melindungi hak-hak individu? Di sinilah peran pilar libertarianisme yang ketiga.

Pemerintahan yang Terbatas Secara Konstitusional

Hak dapat direalisasi dan dilindungi dengan berbagai macam cara. Seseorang yang menggunakan kepalan tinjunya untuk melawan balik tindakan agresi atau menggunakan kakinya untuk berlari dari penindasan dapat dikatakan sedang melindungi hak dirinya terhadap hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Kita juga sebetulnya sedang melindungi hak-hak kita ketika membekali rumah dan kendaraan kita dengan kunci gembok atau sistem keamanan lainnya. Tetapi di sebuah dunia yang mana kita hanya dapat mengandalkan kekuatan dan kecerdikan kita sendiri untuk melindungi diri, maka dunia semacam itu akan didominasi oleh yang kuat belaka. Itulah sebabnya orang-orang membentuk asosiasi untuk melindungi diri. Di dalam masyarakat modern, kita nyaris tidak memerlukan kekerasan untuk melindungi diri (meski terkadang masih diperlukan); sebabnya, keuntungan yang didapat oleh pelaku kekerasan di masyarakat modern menjadi lebih kecil daripada keuntungannya. Bagi kebanyakan orang, kekerasan menjadi semakin tidak relevan dalam membangun interaksi satu sama lain (kecuali kekerasan yang dilakukan oleh negara, di mana korbannya bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan jiwa). Saat ini kita mengandalkan institusi khusus untuk menyelesaikan perseteruan (lembaga pengadilan) dan untuk

melindungi diri (kepolisian). Resikonya adalah, ketika kita memberikan wewenang kepada orang lain untuk menggunakan kekerasan, bahkan dengan maksud untuk melindungi hak-hak individu, kita bisa menjadi korban kekerasan oleh orang yang kita berikan wewenang tersebut. Persoalan ini tergambar dengan lugas dalam kutipan terkenal dari penyair Romawi, Juvenal: "*Quis custodiet ipsos custodes?*" ("Siapa yang mengawasi para pengawas?")

Inilah salah satu pertanyaan penting dalam diskursus ilmu politik, dan selalu menjadi penekanan bagi kelompok libertarian yang terdepan dalam upaya membatasi kekuasaan. Cara-cara yang sering digunakan untuk membatasi kekuasaan di antaranya adalah: pembentukan konstitusi yang berpihak pada penegakan hukum dan pada saat yang bersamaan menempatkan para penguasa di bawah hukum yang dimaksud; pembentukan sistem *check and balances* atau mekanisme koreksi berdasarkan pembagian cabang kekuasaan; penyediaan hak untuk keluar dari segala bentuk kesepakatan politik dan hukum yang tidak adil atau tidak dapat disepakati; perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk menyimpan dan membawa senjata, hak untuk mendapatkan proses pengadilan, hak untuk menikmati properti masing-masing; serta berbagai cara-cara lain tergantung pada konteks negara, budaya, dan waktu tertentu.

Tradisi pembatasan kekuasaan semacam ini dapat kita telusuri pada hukum-hukum "purba" seperti Magna Carta di Inggris dan Golden Bull di Hungaria. Namun kita juga bisa menemukannya pada federalisme modern seperti di Swiss, Australia, Amerika Serikat, serta Jerman dan Austria pasca-Perang Dunia Kedua. Dua negara yang disebut terakhir mengimplementasikan federalisme sebagai upaya pencegahan terulangnya "bencana sosial" masa perang seperti bangkitnya sosialisme nasional ala Third Reich.

Implementasi pembatasan kekuasaan tidak akan pernah bisa sempurna dan kesuksesannya sangat bergantung pada konteks historis dan kekuatan institusi masing-masing negara. Meskipun begitu, pembatasan kekuasaan melalui konstitusi merupakan salah satu pilar penting bagi libertarianisme.

Kebebasan, Tatanan, Keadilan, Perdamaian, dan Kesejahteraan

Ketika peran pemerintah dibatasi hanya pada perlindungan hak-hak individu dan penegakan hukum yang adil, masing-masing anggota masyarakat akan menikmati kebebasan untuk meraih kebahagiaan dan kemakmurannya sendiri-sendiri. Dari sini akan terbentuk sebuah tatanan sosial kompleks yang tidak akan mungkin terjadi seandainya pemerintah memutuskan untuk membangun tatanan kompleks itu sendirian. Ketiga pilar libertarianisme dibangun oleh elemen-elemen—hak-hak individu, tatanan spontan, dan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi—yang mempunyai sejarah yang panjang.

Sebuah dunia yang bebas, tentu saja, tidak akan menjadi sebuah dunia yang sempurna, karena manusia bukanlah makhluk yang sempurna pula. Tidak ada satu individu pun yang dapat kita percaya untuk memegang penuh kekuasaan secara koersif. Bahkan orang paling baik dan berbudi pun dapat tergoda untuk menggunakan kekuasaan tersebut secara semena-mena. Itulah sebabnya mekanisme konstitusional dibutuhkan untuk membatasi kekuasaan.

Tetapi libertarianisme bukanlah sekedar soal pembatasan kekuasaan. Libertarianisme juga berbicara mengenai kemajuan, baik dalam aspek sosial, saintifik, maupun artistik; libertarianisme juga berbicara mengenai koeksistensi damai dan penghargaan terhadap berbagai gaya hidup dan kebudayaan yang berbeda; mengenai industri, perdagangan, dan teknologi untuk

menghapus kemiskinan dan kebodohan; mengenai kebebasan individu dan hak untuk menikmati kebebasan tersebut.

Libertarianisme menawarkan proyek intelektual, yakni sebuah cara untuk memahami dan menghubungkan ide-ide penting satu sama lain, dan proyek praktis, yakni upaya realisasi dunia yang bebas, adil, dan damai. Bagi siapa saja yang punya keberanian untuk ambil bagian di dalam dua proyek tersebut, visi libertarianisme bisa menjadi sangat menginspirasi.

5.

“The Times, They Are A-Changin’”: Libertarianisme sebagai Spirit Abolisionisme

Oleh: James Padilioni, Jr.

Salah satu upaya terbesar kelompok libertarianisme adalah upaya menghapus pelanggaran kebebasan terbesar bagi manusia: perbudakan. Spirit ini terus menjadi pegangan bagi libertarianisme sebagai ideologi politik bagi anak-anak muda saat ini. James Padilioni, wakil ketua Dewan Eksekutif Students for Liberty Amerika Utara dan salah seorang anggota Dewan Eksekutif Internasional, adalah mahasiswa pasca-sarjana Studi Amerika pada College of William and Mary.

“Saya percaya dengan sepenuh dan segenap hati bahwa upaya ini layak diperjuangkan dengan nyawa sekalipun,” Angelina Grimke menutup suratnya pada tahun 1835. Surat itu ditujukan kepada William Lloyd Garrison, editor *The Liberator*, salah satu media massa pendukung kebjiakan abolisionis (penghapusan perbudakan di Amerika Serikat) paling terkenal di masanya. “Upaya” yang dimaksud Grimke adalah penghapusan perbudakan. Grimke mengingatkan Garrison bahwa isu yang mereka perjuangkan adalah isu yang luhur: “jangan pernah menyerah.”[47] Gerakan abolisionisme bukanlah sekedar tren gerakan sosial. Perjuangan tersebut merefleksikan keputusan sadar dari jutaan individu yang ingin mengubah arah sejarah

kemanusiaan. Perbudakan telah dipraktekkan sejak awal manusia mengenal peradaban, dan sebagaimana ditulis oleh Orlando Patterson, “(Di dalam sejarah) tidak ada yang aneh mengenai institusi perbudakan... . Tidak ada wilayah di muka bumi ini yang pada suatu masa tidak mempraktekkan perbudakan. Bahkan sangat mungkin tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang kakek-nenek moyang mereka bukan budak atau pelaku perbudakan.”[48] Banalitas perbudakan ini memberikan semacam legitimasi dan kesan wajar bagi praktek itu sendiri.

Namun, sejak menyebarnya ide mengenai hak individu, pemerintahan terbatas, dan ekonomi politik semenjak era Pencerahan, konsep mengenai koersi, hukum rimba, dan perbudakan menjadi semakin tidak bisa diterima oleh orang banyak.[49] Hal ini semakin ditegaskan dengan lahirnya *Declaration of Independence* dan penekanannya pada frasa “semua manusia diciptakan setara.” Terinspirasi dengan kesadaran moral baru semacam ini, para pelopor gerakan libertarianisme awal, termasuk para pemimpin gerakan abolisionis, kemudian berupaya membangun sebuah dunia baru di mana institusi hukum, politik, dan budayanya lebih harmonis dengan ide-ide kebebasan. Bagi para abolisionis, impian mengenai kebebasan jauh lebih penting dan berharga untuk diperjuangkan ketimbang resiko yang menyertainya; bahkan, kenyataan sosial yang suram mengenai perbudakan menjadi katalis bagi aktivisme kemanusiaan. Bagi para abolisionis ketika itu, “kebebasan personal satu orang tidak akan pernah bisa dijadikan properti bagi orang yang lainnya.” Dengan itu mereka melancarkan kampanye hak asasi kemanusiaan paling besar dalam sejarah.[50]

Terinspirasi oleh kesuksesan gerakan abolisionisme, kelompok liberal kemudian menyasar isu ketidaksetaraan status perempuan di dalam masyarakat, yang digambarkan oleh Mary Wollstonecraft sebagai “(perempuan) diperlakukan seperti makhluk rendahan, dan bukan bagian dari spesies manusia.”[51] Pada tahun 1848, abolisionis terkemuka Elizabeth Candy Stanton, Lucretia Mott,

dan Frederick Douglas melakukan pertemuan di New York, tepatnya di Seneca Falls Convention, untuk membicarakan persoalan ini secara langsung. Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Sentimen (*Declaration of Sentiments*). Menggemakan isi dari Deklarasi Kemerdekaan (*Declaration of Independence*), Deklarasi Sentimen menyatakan:

> Kami percaya bahwa pernyataan ini sebagai kebenaran sahih: bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara; ... Sejarah kemanusiaan adalah sejarah luka dan perebutan kuasa yang berulang oleh laki-laki kepada perempuan, (di mana perempuan) menjadi objek langsung dari sebuah tirani absolut ... oleh karena ketidakadilan tersebut, dan karena kelompok perempuan itu sendiri merasa dirugikan, ditindas, dan secara tidak adil dirampas dari hak-hak mereka yang paling sakral, maka kami menuntut perempuan untuk segera mendapatkan akses kepada semua hak dan privilese yang seharusnya menjadi milik mereka sebagai warga negara Amerika Serikat.[52]

Mereka tidak naif mengenai tugas berat yang akan mereka hadapi. Mengedukasi masyarakat untuk mengadopsi nilai baru dan meninggalkan kebiasaan lama bukan merupakan pekerjaan mudah. Frederick Douglas menekankan:

> Ijinkan saya memberikan sepatah-dua patah kata mengenai filosofi perubahan. Seluruh sejarah kemajuan dan pembebasan kemanusiaan menunjukkan bahwa semua konsesi yang diraih merupakan hasil dari perjuangan yang sungguh-sungguh. Konflik-konflik yang terjadi sungguh menggairahkan dan mengagitasi, menyerap semua perhatian, dan di saat yang bersamaan, membekap semua hal lain dalam kesunyian. Jika tidak seperti itu, maka konflik- konflik tersebut tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada kemajuan tanpa perjuangan. Barang siapa yang menginginkan kebebasan tanpa agitasi adalah seperti orang yang menginginkan panen tanpa menyebarkan

> benih; mereka menginginkan hujan tanpa badai dan petir. Mereka menginginkan lautan tanpa deburan ombak. Perjuangan tersebut dapat berbentuk perjuangan moral atau bahkan perjuangan fisik, atau keduanya sekaligus. Apapun bentuknya, perjuangan tetaplah perjuangan. Kekuasaan tidak akan hilang tanpa tuntutan. Tidak untuk saat ini, tidak untuk selamanya.[53]

Begitulah para pembaharu di Seneca memahami dengan sungguh-sungguh bahwa "dengan mengambil alih kerja perubahan ini, kami mengantisipasi kemungkinan kami akan disalahpahami, dihina, dan mungkin diolok-olok." Meskipun begitu mereka tetap maju, tanpa sedikitpun merasa gentar dan justru terdorong oleh cita-cita luhur mengenai keadilan dan kesetaraan di antara umat manusia.[54]

Jangan sampai lupa bahwa perjuangan melawan perbudakan tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Perlawanan serupa juga terjadi di berbagai belahan dunia lain. (Dengan berat hati pula saya harus katakan bahwa perjuangan ini masih harus dilakukan di beberapa daerah di dunia hingga saat ini) Di beberapa negara penghapusan perbudakan terjadi secara berangsur-angsur, sedangkan di beberapa tempat lainnya secara cepat. Di Inggris Raya, perbudakan dan perdagangan budak berhasil dihapuskan berkat gerakan boikot produk-produk yang dihasilkan oleh budak, serta berkat agitasi yang tak kenal lelah oleh aktivis seperti William Wilberforce, yang perjuangannya selama lima puluh tahun telah diabadikan dalam film *Amazing Grace*. Berbagai bentuk jerat dan hambatan kebebasan lainnya juga berhasil disingkirkan oleh gerakan libertarianisme. Salah satunya adalah kondisi ketertundukan pada rejim otoriter (*serfdom*), baik di Eropa Barat maupun di Eropa Timur. Pembebasan etnis Yahudi dari status subordinasi hingga mereka bisa mendapatkan hak-hak sipil mereka secara utuh juga merupakan salah satu buah dari perjuangan kelompok liberal.

Seiring dengan menyebarnya gagasan liberalisme ke seluruh penjuru dunia, berbagai bentuk tradisi anti-kebebasan terus-menerus mengalami pengikisan. Berkembangnya kepercayaan pada perdagangan dan pasar bebas, misalnya, memicu gerakan Anti-Liga Jagung di Inggris pada awal abad ke sembilan belas. Gerakan ini sukses menghapus tarif impor yang telah membuat harga jagung di Inggris menjadi mahal. Dengan adanya tarif impor tersebut, para pemilik ladang jagung di Inggris (yang punya koneksi politik) diuntungkan secara ekonomi di atas penderitaan rakyat miskin Inggris yang harus membelanjakan sebagian besar uang mereka untuk membeli jagung. Sebagaimana dikatakan dengan tegas oleh Richard Cobden, Undang-Undang Jagung bertanggung jawab terhadap "kesusahan dan kemiskinan ... yang melanda seluruh negeri," dan akhirnya pada tahun 1849, setelah berupaya selama lebih dari tiga puluh tahun, Cobden dan rekan-rekannya berhasil menghapus undang-undang tersebut dan menyaksikan kemenangan perdagangan bebas terhadap proteksionisme.[55]

Ide kebebasan, entah menggunakan nama liberalisme, liberalisme klasik, libertarianisme, atau apapun, telah mengubah wajah peradaban kita. Para aktivis kebebasan telah sukses membawa perubahan yang permanen karena mereka tidak bergantung pada hanya satu strategi perjuangan belaka. Sebaliknya, mereka percaya bahwa ada banyak cara yang bisa diambil untuk melakukan perubahan sosial.

Sebagai contoh: meski beberapa aktivis pro-abolisi membentuk Partai Kebebasan pada tahun 1848 (mengadopsi argumen dalam pamflet "*The Unconstitutionality of Slavery*" karangan Lysander Spooner sebagai landasan partai mereka), namun ada banyak pula aktivis pro-abolisi yang memilih jalur non-pemilu dalam perjuangan mereka. Para abolisionis non-elektoral ini percaya bahwa "reformasi politik hanya dapat dilakukan melalui perubahan visi moral masyarakat;—bukan dengan menunjukkan

bahwa semua abolisionis wajib menjadi pemilih dalam pemilu, tetapi justru menunjukkan bahwa semua pemilih dalam pemilu memiliki kewajiban untuk menjadi abolisionis."[56] Dan meskipun banyak pemimpin gerakan abolisionis seperti Wendell Phillips mengatakan "kami tidak *bermain* politik," pada akhirnya gerakan pro-abolisi sukses secara moral maupun politik.[57] Sebagaimana ditulis oleh sejarawan Louis Menand: "Gerakan pro-abolisi bukan gerakan apolitis. Rahasia kekuatan politik mereka justru terletak pada penolakan terhadap politik."[58]

Perubahan institusional dan politik memang berat untuk dilakukan, tetapi hal ini diperlukan agar kita dapat menikmati kebebasan. Hukum yang tidak adil serta tindakan opresi harus dihapuskan agar manusia dapat hidup dengan bebas. Semua perubahan tersebut merupakan sebab sekaligus akibat dari perubahan di alam pikiran atau mental manusia; perubahan dalam cara berpikir, serta perubahan dalam bertindak dan pengambilan keputusan. Para reformis libertarian dapat menetapkan fokus untuk melakukan perubahan ide, undang-undang, institusi, atau elemen-elemen lain di dalam masyarakat. Tidak ada resep khusus untuk menyebarkan kebebasan; ada banyak cara dan metode tergantung kapabilitas dan kreativitas kita sebagai pembela kebebasan. Perubahan persepsi atau paradigma terkadang memiliki dampak yang luas terhadap perubahan institusi. Motto pengusaha besar Josiah Wedgwood "*Am I not a man and a brother?* (Bukankah aku juga manusia dan saudaramu?)" berhasil mengubah paradigma para budak tentang diri mereka masing-masing dan berdampak besar terhadap perubahan institusi perbudakan di seluruh negeri. Perubahan persepsi kelompok gay di Amerika Serikat yang terjadi baru-baru ini telah mendorong perubahan besar, pertama di sektor privat, di mana mulai banyak perusahaan menerima dan merekrut pekerja gay, dan kemudian di sektor politik, di mana negara mulai mendekriminalisasi hubungan sesama-jenis (sungguh sulit dipercaya bahwa sudah bertahun-tahun lamanya negara melarang individu mencintai

individu lainnya hanya karena alasan orientasi seksual). Sebagai contoh: Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa “undang-undang sodomi” sebagai undang-undang non-konstitusional, dan mulai banyak negara bagian yang memberikan kesetaraan hak bagi pasangan gay untuk melaksanakan pernikahan.

Kembali pada pergerakan penghapusan perbudakan: kita harus ingat bahwa para pejuang abolisi melakukan apa yang mereka lakukan bukan karena sekedar sok-sokan anti-kemapanan. Mereka memahami sepenuh hati bahwa perjuangan mereka akan sangat panjang dan berat. Mereka rela melakukan berbagai macam cara seperti anjuran moral, edukasi sosial, dan agitasi politik, dan berbagai teknik lainnya untuk melawan perbudakan. Banyak dari para reformis tersebut yang memulai perjuangan mereka sejak masih usia belia, dan mereka tidak membiarkan idealisme mereka redup oleh konformisme, oleh “persoalan-persoalan praktis”, oleh dorongan untuk menjadi realistis. Mereka tidak menggadaikan idealisme mereka demi mendapatkan pekerjaan yang bagus, reputasi akademik, jabatan di kantor pemerintahan, dan berbagai kenyamanan hidup lainnya yang dapat mengalihkan mimpi mereka mewujudkan kebebasan dan menghapuskan ketidakadilan. Para reformis ini adalah orang-orang yang terbuka matanya. Mereka melihat kondisi tidak ideal di sekitar mereka, dan mereka menolak itu semua. Kita adalah pewaris dari dunia yang mereka ciptakan.

Filosofi dari ide kebebasan didirikan di atas keyakinan bahwa ketidakadilan hari ini dapat dan harus diganti dengan keadilan di hari esok. Kebudayaan berubah. Ide-ide berubah. Politik dan institusi berubah. Keyakinan inilah yang menyatukan para liberal di masa lalu dan masa kini. Energi pendorong gerakan libertarianisme adalah semangat anak muda digabungkan dengan kematangan intelektual mengenai hakekat kebebasan individu manusia, serta didorong oleh keinginan untuk melihat ketidakadilan ditumpaskan dari muka bumi. Para libertarian muda saat ini menyusuri jalur yang telah lama dibuka oleh para

pendahulunya. Kita mewarisi banyak hal dari para pendahulu tersebut, tetapi kerja masih jauh dari kata usai. Setiap undang-undang yang disahkan oleh para politisi untuk membatasi transaksi dan perdagangan voluntaristik mesti kita lawan. Begitu juga setiap tindakan perampasan, koersi, dan kekerasan terhadap kebebasan dan kemanusiaan. Tugas kita adalah mengikuti jalur yang sudah dibuka oleh para pendahulu kita. *Status quo* tidak akan selamanya menjadi *status quo*. Hukum perubahan adalah kekal. Masa depan yang hadir di hadapan kita adalah masa depan yang kita pilih dan bentuk sendiri. Generasi pendahulu kita sukses memobilisasi diri menentang perang dan berbagai kejahatan segrerasi rasial. Gerakan ini kemudian menginspirasi lirik salah satu lagu Bob Dylan: "*Your old road is rapidly agin' / Please get out of the new one / If you can't lend your hand / For the times they are a-changin'*."[59]

Determinasi seperti di dalam lirik lagu itulah yang mendorong William Lloyd Garrison pada usia dua puluh lima tahun menulis lantang di dalam *The Liberator*:

Aku akan berbicara selantang kebenaran, dan tidak akan kenal kompromi layaknya keadilan. Aku tidak akan berpikir, berbicara, maupun menulis dengan lemah lembut. Tidak! Tidak! Katakan pada seseorang yang rumahnya sedang terbakar untuk berbicara pelan-pelan; katakan pada seseorang untuk tidak grasa-grusu menyelematkan istrinya dari cengkraman pemerkosa; katakan pada seorang ibu untuk pelan-pelan saja menyelematkan bayinya yang terjatuh ke sumur;--tapi jangan pernah katakan padaku untuk berbicara pelan-pelan saja pada situasi semacam ini. Perjuanganku ini tulus—aku tidak akan berbasa-basi—aku tidak akan bilang permisi—aku tidak akan mundur meski cuma sejengkal—DAN AKU AKAN DIDENGAR.[60]

Kami, para anggota Students for Liberty, adalah para abolisionis. Dan kami akan didengar.

6.

Prinsip Politik Libertarianisme

Oleh: Alexander McCobin

Teori politik atau ideologi memiliki tiga komponen: justifikasi, prinsip, dan kebijakan. Liberalisme berdiri pada level prinsip, sehingga libertarianisme dapat banyak mengambil inspirasi dari berbagai tradisi filosofis, religius, dan adat-istiadat. Alexander McCobin, presiden dan salah satu pendiri Students for Liberty, dan juga lulusan program doktoral dalam bidang filsafat dari Universitas Georgetown, menunjukkan bagaimana dan mengapa libertarianisme memiliki nilai-nilai yang universal.

Apa itu libertarianisme? Apa-apa saja yang *bukan* libertarianisme? Apakah libertarianisme merupakan sistem filsafat yang menyediakan jawaban bagi persoalan eksistensi, kebenaran, keindahan, dan hidup secara umum? Apakah libertarianisme merupakan filsafat politik yang memungkinkan terjadinya koeksistensi di antara berbagai filosofi dan ajaran moral, sebuah kerangka bagi interaksi sosial yang berbasis voluntarisme? Kita perlu mengklarifikasi istilah libertarianisme itu sendiri demi kejelasan bagi kelompok libertarianisme itu sendiri maupun bagi orang-orang yang menolaknya.

Secara singkat, libertarianisme adalah sebuah filosofi politik yang memprioritaskan prinsip kebebasan.

Dalam bahasa yang sederhana, kamu dapat menjadi libertarian dan beragama Hindu sekaligus, atau beragama Kristen, Yahudi,

Islam, Buddha, Deis, agnistik, atheis, atau segala bentuk persepsi teologis lain selama kamu menghormati kesetaraan hak orang lain. Kamu mungkin penyuka musik hip hop, concerto Rachmaninoff, reggae, Brahms, opera China, atau jenis-jenis musik lainnya, atau bahkan tidak menyukai musik sama sekali. Saya bisa sebutkan contoh-contoh lain, tetapi sampai di sini kamu pasti paham maksud saya. Libertarianisme *bukan* merupakan filosofi tentang kehidupan atau cinta, bukan pula ajaran metafisika mengenai agama, seni, ataupun nilai, meskipun tentu saja libertarianisme dapat beririsan dengan hal-hal tersebut.

Lalu apa filsafat politik itu? Filsafat politik memiliki tiga komponen: justifikasi, prinsip, dan kebijakan. Justifikasi di dalam filsafat politik merupakan argumentasi standar yang digunakan banyak orang untuk menjustifikasi keyakinannya masing-masing: mencapai kebaikan tertinggi untuk sebanyak mungkin orang, menghormati otonomi orang lain sebagai makhluk moral, keadilan dalam distribusi tanggung jawab dan sumber daya, dan lain sebagainya. Sedangkan prinsip adalah pernyataan abstrak yang menjelaskan bagaimana justifikasi itu direalisasi. Sementara kebijakan adalah aplikasi praktis dari prinsip-prinsip tersebut ke dalam persoalan yang spesifik dan konkret. Di dalam kehidupan politik sehari-hari, persoalan mengenai kebijakan merupakan persoalan yang paling banyak diperbincangkan dan didiskusikan, seperti misalnya pertanyaan “apakah kita harus menaikkan atau menurunkan pajak?” “apakah kita harus melakukan invasi terhadap negara X?” dan “apakah pemerintah harus melarang peredaran ganja?”

Prinsip-prinsip yang mendasari sebuah kebijakan yang diambil oleh seseorang biasanya menjadi lebih gamblang ketika ditanya “apakah kita seharusnya lebih mendahulukan Konstitusi atau mendahulukan membantu orang-orang yang lemah dan tak berdaya?” Pertanyaan semacam ini terkadang mengungkapkan

prinsip-prinsip yang dipegang seseorang dalam mengambil kebijakan politik. Sedangkan justifikasi untuk prinsip-prinsip tersebut biasanya dibicarakan dalam konteks filosofis, misalnya dalam bentuk pertanyaan seperti “apakah kita sebaiknya mendahulukan kebebasan atau kesetaraan?” dan “dengan standar apa kita harus memutuskan antara konstitusi atau membantu orang lemah?”

Libertarianisme bukanlah sebuah filosofi politik komprehensif yang menawarkan pedoman komplit bagi semua persoalan kemanusiaan, mulai dari aspek prinsip hingga kebijakan-kebijakannya. Libertarianisme didefinisikan oleh komitmennya terhadap prinsip-prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan ini dapat dijustifikasi secara berbeda oleh masing-masing individu libertarian itu sendiri. (Pada kenyataannya, prinsip kebebasan dapat—dan seringkali—dijustifikasi oleh standar yang berbeda-beda; prinsip kebebasan, misalnya, dapat dijustifikasi oleh penghormatan terhadap otonomi individu. Bisa juga prinsip ini dijustifikasi karena seseorang percaya bahwa kebebasan individu dapat mendatangkan kemakmuran sosial yang lebih merata dalam masyarakat. Rasa-rasanya tidak perlu kita memilih justifikasi mana yang lebih tepat selama semua justifikasi itu bermuara pada satu prinsip yang sama, yakni kebebasan.) Lebih jauh, penerapan prinsip kebebasan ke dalam kebijakan konkret dapat menghasilkan perdebatan dan perseteruan di antara para libertarian sendiri, karena kebijakan yang paling tepat terkadang sangat bergantung pada situasi dan kondisi tertentu yang hidup dalam masyarakat.

Perlu ditekankan pula bahwa komitmen para libertarian terhadap prinsip kebebasan berarti pula bahwa para libertarian tidak perlu mengatur-atur atau mengurusi apa yang akan dilakukan orang lain dengan kebebasannya masing-masing. Kamu boleh saja mengutuk tindakan orang lain yang kamu anggap tercela dan

tidak bermoral sambil pada saat yang bersamaan kamu tetap membela hak orang tersebut untuk melakukan tindakan tersebut dengan suka rela. Dengan catatan: tindakan tersebut tidak melanggar hak individu lain.

Prinsip Politik Libertarianisme

Komitmen libertarianisme dibatasi hanya pada tingkat prinsip saja. Secara spesifik, libertarianisme berkomitmen pada prinsip kebebasan: setiap orang harus bebas untuk melakukan apa pun dengan hidup dan hak-hak mereka, kecuali ada alasan khusus (pelanggaran terhadap hak individu lain) untuk melarang kebebasan tersebut. Setiap insan manusia memiliki hak untuk bebas. Para penganut filosofi politik lain mendasarkan kebijakan sosial mereka di atas prinsip-prinsip lain, seperti misalnya:

- Persaudaraan – prinsip yang menyatakan bahwa tiap-tiap orang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan hidup orang lain.
- Kesetaraan penghasilan – prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan posisi, kekayaan, keuntungan, penghasilan, dan berbagai hal lainnya secara setara dengan orang lain.[45]

Kamu mungkin bertanya: apakah ada cara lain yang lebih baik untuk mengartikulasikan prinsip kebebasan? Mungkin saja. Motto dari Cato Institute adalah “kebebasan individu, pemerintahan terbatas, pasar bebas, dan perdamaian.” Apakah motto ini merangkum semua aspek penting dari prinsip kebebasan atau justru salah kaprah (misalnya, “pasar bebas” dan “perdamaian” hanyalah aspek turunan dari prinsip kebebasan)? Artikulasi atau formulasi terbaik mengenai prinsip kebebasan akan sangat bergantung pada konteks tertentu. Motto dan formulasi prinsip kebebasan milik Cato Institute bisa jadi sangat tepat dan berguna bagi Cato Institute sebagai lembaga riset kebijakan publik.

Justifikasi Kebebasan

Setiap filosofi politik yang mengedepankan satu prinsip dan menolak prinsip-prinsip yang lainnya harus dapat memberikan pembenaran kenapa ia memilih prinsip tersebut. Memilih satu prinsip di antara puluhan prinsip lain membutuhkan suatu justifikasi. Seseorang boleh saja memegang prinsip bahwa "setiap orang memiliki hak pada dirinya sendiri dan oleh karena itu bebas untuk mengambil keputusan apa pun yang ia anggap terbaik bagi dirinya", namun prinsip ini membutuhkan tidak hanya artikulasi mendalam (misalnya sekedar penjelasan apa itu "hak"), tetapi juga membutuhkan justifikasi atau pembenaran atas prinsip tersebut. Tanpa justifikasi, sebuah prinsip hanya akan menjadi klaim kebenaran sepihak. Ada banyak justifikasi yang berbeda bagi prinsip kebebasan. Selama bertahun-tahun, justifikasi-justifikasi ini telah banyak dikembangkan, diperdebatkan, dikritisi, dan dipertahankan (dari kritik) oleh para libertarian dan masih diperdebatkan hingga hari ini. Berikut adalah sedikit contoh justifikasi terhadap prinsip kebebasan, diikuti oleh satu nama pemikir yang mewakili justifikasi tersebut:

- Prinsip utilitas (kegunaan) – Kebebasan harus menjadi prinsip kehidupan politik karena kebebasan memberikan manfaat dalam jumlah tertinggi kepada sebanyak mungkin orang (Jeremy Bentham);
- Otonomi – Pemerintahan terbatas dan penghormatan terhadap kesetaraan hak merupakan kerangka paling pas untuk menghormati otonomi agen moral (Robert Nozick);
- Hak untuk Mengejar dan Mencari Kebahagiaan Masing-masing – Kebebasan merupakan syarat penting bagi seseorang untuk dapat mengejar dan mencari kebahagiaan dirinya masing-masing sesuai dengan kodrat alamiahnya (Ayn Rand);
- Hukum dan Hak Alamiah – Kebebasan merupakan karakteristik alamiah dari manusia sebagai makhluk yang

otonom dan sosial sekaligus (John Locke);

- Teologis – Kebebasan merupakan anugerah dari Tuhan, dan oleh sebab itu tidak ada satu orang pun yang berhak mencabut ataupun menghalang-halangi kebebasan orang lain (John Locke dan Thomas Jefferson);
- Simpati – Kebebasan muncul sebagai sebuah "sistem sederhana" yang sesuai dengan kemampuan manusia untuk membayangkan dirinya berada pada situasi yang dialami orang lain (Adam Smith);
- Kesepakatan – Prinsip kebebasan dapat dijustifikasi sebagai sebuah hasil yang tak terelakkan dari kesepakatan yang dibuat di antara individu-individu rasional (Jan Narveson);
- Kerendahan Hati – Kebebasan diperlukan sebagai prinsip organisasi sosial karena tidak ada satu orang pun yang memiliki pengetahuan yang sahih untuk mengatur perilaku dan hidup orang lain (F. A. Hayek);
- Kesemerataan dan Keadilan – Kebebasan merupakan cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa orang-orang yang paling tidak berdaya di dalam masyarakat dapat meraih kesempatan untuk menjadi lebih baik (John Tomasi).

Patut diingat bahwa daftar di atas bukanlah daftar yang komprehensif. Daftar di atas hanya ingin menunjukkan bahwa kita bisa memiliki banyak justifikasi untuk satu prinsip politik tertentu. Poinnya adalah: meskipun libertarianisme tidak cuma memiliki satu justifikasi khusus, tetapi ia bukanlah ideologi tanpa justifikasi sama sekali. Libertarianisme tidak memiliki komitmen pada satu justifikasi tertentu untuk prinsipnya terhadap kebebasan.

Prinsip kebebasan memberikan pedoman bagi perilaku manusia, tetapi pedoman ini bukanlah dogma tanpa justifikasi yang rasional. Meskipun libertarianisme bukan sebuah filosofi

politik yang komprehensif, masing-masing orang dapat menjadi seorang libertarian karena komitmennya terhadap justifikasi yang tersedia bagi prinsip kebebasan, seperti misalnya kemajuan kemanusiaan, otonomi, akal sehat, kebahagiaan, alasan relijius/ teologis, simpati, dan keadilan.

Satu Prinsip, Berbagai Varian Kebijakan

Sebagaimana ada berbagai macam justifikasi untuk satu prinsip kebebasan, maka ada berbagai macam pula penerapan atau kebijakan dari prinsip kebebasan tersebut. Ada banyak perdebatan di antara kelompok libertarian mengenai berbagai topik kebijakan tertentu, misalnya soal hak cipta (perlindungan terhadap hak milik atau sebentuk monopoli terhadap ide?), hukuman mati (hukuman yang setimpal atau pelanggaran hak asasi?), aborsi (apakah janin sudah dapat dianggap sebagai agen moral yang memiliki hak hidup atau belum?), pajak (pencurian legal atau mekanisme distribusi kemakmuran yang efisien untuk membangun fasilitas publik?), kebijakan luar negeri dan militer (apakah agresi militer ke negara lain dapat dijustifikasi?), dan bahkan tentang pernikahan sesama-jenis (apakah negara harus memfasilitasi pernikahan sesama jenis atau biarkan saja urusan pernikahan menjadi urusan kontraktual di antara individu?). Masing-masing orang punya pandangannya sendiri-sendiri tentang kebijakan mana yang paling sesuai dengan prinsip kebebasan.

Ini bukan berarti libertarianisme tidak memiliki kebijakan yang khas. Peraturan untuk menghukum pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan, dan pencurian merupakan hukum yang fundamental bagi masyarakat beradab manapun; peraturan tersebut bahkan juga harus berlaku bagi pemerintah dan penguasa. Meskipun begitu, seringkali kita berbeda pendapat tentang langkah-langkah spesifik untuk menegakkan peraturan-peraturan tersebut. Langkah-langkah yang harus diambil pemerintah atau

masyarakat untuk melindungi diri mereka sendiri dari tindak kekerasan, misalnya, bisa menjadi topik perdebatan yang tidak berujung.

Mengambil jalan tengah atau menjadi kompromis juga persoalan tersendiri. Ambil contoh isu legalisasi ganja untuk keperluan medis atau pengobatan. Para libertarian tentu saja mendukung ide legalisasi tersebut, meskipun berdasarkan prinsip kebebasan seharusnya para libertarian mendukung legalisasi ganja terlepas dari apapun tujuan dan penggunaan ganja tersebut (tidak hanya untuk tujuan medis). Jika seorang libertarian mendukung legalisasi ganja hanya untuk tujuan medis, apakah ia sedang menggadaikan prinsip kebebasan? Atau mendukung legalisasi ganja demi tujuan medis adalah langkah strategis awal untuk proses legalisasi yang lebih utuh? Tiap orang akan punya pandangan yang berbeda-beda.

Perbedaan Antara Politik dan Etika

Libertarianisme adalah filsafat politik, bukan filsafat etis. Etika membicarakan baik dan buruk berdasarkan prinsip baik dan buruk. Etika berupaya menelisik kualitas "baik" dan "buruk" pada dirinya sendiri. Meski masih berhubungan, filsafat politik berfokus pada lingkup yang agak berbeda, yakni soal dimensi hubungan sosial yang layak atau patut antara manusia. Antara filsafat politik dan etika memang sering saling tumpang-tindih satu sama lain. Ini wajar karena keduanya berbicara soal bagaimana seharusnya manusia harus bertindak bagi dirinya sendiri dan ketika berhadapan dengan orang lain. Namun, keduanya dipisahkan oleh justifikasi atau argumentasi yang diberikan bagi tindakan tersebut.

Tindakan etis dijustifikasi berdasarkan argumen bahwa pelakunya adalah makhluk bermoral. Manusia bertindak berdasarkan pedoman moral yang ia pegang. Etika bermula

dari asumsi bahwa manusia adalah agen moral kemudian bertanya: “bagaimana seharusnya manusia bertindak *sebagai makhluk yang bermoral?*” Sementara filsafat politik dijustifikasi berdasarkan asumsi bahwa tiap-tiap orang harus bertindak sambil mempertimbangkan keberadaan orang lain sebagai agen moral lain yang terpisah. Filsafat politik pada dasarnya adalah filsafat sosial yang berupaya mengartikulasikan bagaimana seseorang seharusnya memperlakukan orang lain dalam bingkai relasi antar manusia. Filsafat politik bertanya: “bagaimana seseorang seharusnya bertindak *ketika berinteraksi dengan orang lain?*”

Dengan kata lain, asal-usul moralitas adalah diri sendiri: bagaimana seseorang seharusnya bertindak karena diri mereka sendiri adalah manusia. Sedangkan asal-usul filsafat politik adalah orang lain: bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik karena mereka adalah manusia.

Namun ini tidak berarti bahwa pertimbangan etis mengabaikan eksistensi orang lain dalam merumuskan perilaku yang baik dan benar. Untuk menentukan tindakan etis yang paling tepat, seringkali kita harus mempertimbangkan dampak dari tindakan kita terhadap orang lain. Namun, pertimbangan ini masih bergantung pada konsep moralitas diri si pelaku. Bagaimana kita memperlakukan orang lain di dalam diskursus etis masih merupakan bagian dari moralitas diri masing-masing. Sebaliknya, bagaimana kita seharusnya memperlakukan orang lain di dalam diskursus filsafat politik adalah dengan menempatkan mereka sebagai agen moral tersendiri yang hak-haknya harus kita hormati, dan oleh karena itu kita perlu membatasi dan mengukur eksekusi moralitas diri kita sendiri.

Dan karena sebagian besar aktivitas manusia selalu melibatkan orang lain, maka kita bisa menerapkan prinsip-prinsip filsafat politik dan etika pada banyak kasus dan situasi. Akibatnya, banyak orang menyamaratakan filsafat politik dengan diskursus etika.

Beberapa orang, misalnya, berupaya mengundang-undangkan moralitas, karena mereka percaya bahwa sesuatu yang tidak bermoral harus menjadi ilegal. Jika ada orang yang tidak ingin melakukan suatu aktivitas, maka orang-orang lain harus dilarang untuk melakukan aktivitas serupa. Respon yang umum diberikan terhadap paradigma semacam ini adalah: “masing-masing orang punya standar moralnya sendiri-sendiri, sehingga tidak baik untuk memaksakan standar moral kita kepada orang lain.” Tetapi kita tidak perlu pula terjatuh kepada “relativisme moral” (bahwa moralitasku sama baiknya dengan standar moralitas orang lain). Relativisme moral semacam itu akan menjadi fondasi yang rapuh bagi prinsip kebebasan, karena jika memang semua standar moralitas sama baiknya, lalu buat apa kita lebih memilih kebebasan daripada koersi dan otoritarianisme?

Salah satu varian dari argumen yang anti terhadap legislasi moral adalah bahwa, meskipun memang ada standar moralitas universal yang berlaku bagi setiap orang, tidak ada satupun orang yang tahu standar universal tersebut seperti apa, maka jalan yang paling bijaksana adalah tidak memaksakan satu standar moral tertentu menjadi aturan publik. Meskipun lebih kuat daripada argumen relativisme moral, tetapi argumen ini masih mengimplikasikan bahwa kita bisa mengundang-undangkan standar moralitas tertentu apabila kita bisa “menemukan” standar moralitas universal. Menurut penulis, bahkan apabila kita berhasil menemukan satu standar moralitas universal yang diterima oleh orang banyak, mengundang-undangkan standar moralitas tersebut tetap akan menjadi bermasalah karena diskursus moralitas berbicara tentang hal yang sama sekali berbeda dengan diskursus filsafat politik, yakni tindakan yang benar dalam bingkai relasi sosial. *Moralitas dapat menjadi pedoman perilaku yang bagi bagi diri sendiri. Sedangkan hukum adalah pedoman bagaimana berperilaku secara adil dengan orang lain.*

Beberapa orang mungkin akan berkata bahwa filsafat politik yang tidak berdasar pada satu standar etis tertentu adalah filsafat politik yang buruk. Tetapi patut diingat bahwa filsafat politik libertarianisme berfokus pada satu prinsip nilai yang definitif. Prinsip ini punya berbagai macam justifikasi, tetapi tidak ada satu justifikasi yang dianggap paling tepat. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, orang-orang dengan justifikasi yang berbeda masih dapat bersepakat terhadap satu prinsip yang sama. Dalam konteks ini, toleransi terhadap perbedaan justifikasi juga merupakan penerapan dari prinsip kebebasan itu sendiri. Pada banyak kasus, moralitas dan filsafat politik sering berujung pada kesimpulan yang sama: membunuh, memerkosa, atau mencuri jelas-jelas perbuatan immoral dan mesti dihukum. Tetapi terkadang ada kasus-kasus yang mana moralitas (etika) mewajibkan atau melarang suatu tindakan, sedangkan filsafat politik bersifat netral. Contohnya: moralitas mengatakan bahwa kamu harus mencintai tetanggamu (orang lain) sebagaimana kamu mencintai saudara-saudaramu. Filsafat politik tidak mewajibkan hal tersebut. Bahkan St. Thomas Aquinas sendiri mengatakan: "hukum buatan manusia dibuat hanya untuk sejumlah orang belaka, yakni mayoritas orang yang kebajikannya tidak sempurna. Oleh sebab itu hukum manusia tidak melarang semua perbuatan jahat, yang mana orang-orang bajik bersikap netral, tetapi hanya perbuatan jahat yang benar-benar membahayakan, yang mana ada kemungkinan mayoritas orang bersikap netral; dan khususnya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain, karena tanpa larangan semacam itu masyarakat tidak akan dapat bertahan hidup; oleh karena itu hukum manusia hanya melarang pembunuhan, pencurian, dan sejenisnya."[46] Ada banyak hal yang dianggap oleh banyak orang sebagai imoral dan jahat dilihat dari perspektif etika, tetapi, dilihat dari filsafat politik, tindakan tersebut hanya dianggap sebagai sesuatu yang netral, bahkan diperbolehkan. Satu-satunya

ukuran dalam menentukan apakah suatu tindakan harus dilarang secara legal/hukum adalah: apakah tindakan tersebut berpotensi melanggar hak orang lain?

Kesimpulan

Libertarian adalah orang-orang yang berasal dari banyak tradisi keagamaan atau bahkan ateis, mereka dapat memegang argumen filosofis yang berbeda-beda, memiliki gaya hidup yang berbeda-beda, berasal dari etnis atau kelompok budaya yang berbeda-beda pula, namun mereka semua disatukan oleh prinsip yang sama mengenai kebebasan. Mereka dapat berbeda pendapat terkait penerapan prinsip kebebasan tersebut, sehingga terkadang mereka berada pada kubu yang berseberangan dalam isu-isu tertentu. Prinsip kebebasanlah yang menyatukan mereka ketika berhadapan dengan tirani, melawan tindakan kekerasan, membela perdagangan bebas, dan menyerukan kebebasan yang sama bagi semua orang.

Saya mengundang kamu semua yang tertarik dengan prinsip kebebasan untuk menelusuri ide-ide libertarianisme secara lebih mendalam, membela dan mendukung prinsip kebebasan berarti menjadi seorang libertarian. Alasan kamu untuk membela prinsip tersebut bisa jadi berbeda dengan libertarian lain; tetapi justru inilah salah satu karakteristik yang membedakan libertarianisme dengan ideologi-ideologi politik lain yang menuntut banyak kesamaan dan kesepahaman. Seorang libertarian bisa berbeda paham dengan libertarian lain dalam banyak isu, terutama soal bagaimana penerapan yang paling tepat terhadap prinsip kebebasan itu sendiri. Tetapi itu tidak masalah. Prinsip kebebasanlah yang mendefinisikan filosofi dari libertarianisme dan menyatukan para libertarian bersama-sama. Hanya itu saja. Tetapi itu pun lebih dari cukup.

7.

Tak Ada Seni Tanpa Kebebasan, Tak Ada Kebebasan Tanpa Seni

Oleh: Sarah Skwire

Kebebasan merupakan aspek penting bagi seni, sebagaimana telah sering dikatakan oleh banyak orang, tetapi seni juga penting bagi kebebasan. Seni mampu mengguncang status quo dan memaksa kita untuk berpikir. Seni menjadi mustahil tanpa kebebasan, tetapi kebebasan juga mustahil tanpa seni. Sarah Skwire adalah anggota Liberty Fund dan penulis dari buku panduan menulis populer Writing with a Thesis. Sarah mendapatkan gelar PhD dalam bidang Sastra Inggris dari Universitas Chicago.

Pada tahun 380 BCE, Plato menyatakan bahwa penyair terlalu berbahaya untuk tinggal di dalam republik yang "ideal".

Pada tahun 8 Masehi, Ovid diusir dari Roma karena apa yang dikatakannya merupakan "syair dan kesalahan".

Pada 722 M, penyair Jepang Asomioyu Hozumi diasingkan ke Pulau Sado karena mengkritik kaisar.

Pada tahun 1642 M, pemerintahan Oliver Cromwell memerintahkan penutupan semua teater yang ada di London.

Pada tahun 1815 M, Goya dibawa ke muka pengadilan inkuisisi untuk menjelaskan siapa yang mengutusnya melukis "The Naked

Maja". Sesudah pengadilan, Goya dicopot dari posisinya sebagai pelukis istana Spanyol.

Pada tahun 2012 M, band punk-rock asal Rusia, Pussy Riot, diadili dan dihukum penjara dua tahun hanya karena menyanyikan lagu protes terhadap pemerintah di sebuah katedral.

Menjadi seniman seringkali berarti menjadi pihak yang rapuh di hadapan tangan-tangan kekuasaan negara. "*Great Purge*" ("Pembersihan Besar") oleh Stalin di tahun 1920-an dan 30-an telah memenjarakan tidak kurang dari dua ribu penulis, seniman, dan intelektual. Sekitar 1.500 dari mereka mati di dalam penjara. Pemerintah Nazi Hitler menyita dan merampas semua karya seni yang ada di Jerman melalui Kementerian Propaganda pada tahun 1933, dan kamp konsentrasi Theresienstadt didirikan khusus untuk memenjarakan dan membunuh seniman dan intelektual. Dan kita tidak akan pernah tahu berapa banyak seniman yang mati, menghilang, atau karya-karyanya dihancurkan selama masa Revolusi pimpinan Mao Zedong pada tahun 1966 hingga 1976.

Bagi kita yang merasakan nikmatnya kebebasan berkarya dan berekspresi di negara-negara Barat abad ke-21, rasa-rasanya tidak perlu berpikir terlalu banyak soal kebebasan artistik. Jika pun harus dipikirkan, seringnya kita menganggap soal kebebasan artistik sebagai isu estetis—yakni soal kebebasan kreatif untuk memilih medium atau gaya berekspresi macam apa yang kita inginkan. Kita menerima kebebasan artistik sebagai pemenuhan atas keinginan kita untuk mengekspresikan diri secara bebas dengan gaya atau medium apa pun yang kita mau tanpa adanya restriksi terhadap pilihan gaya atau medium tersebut. (Fotografer Ben Shahn pernah mengatakan bahwa jika disuruh untuk memilih sendiri label yang tepat untuk menggambarkan dirinya sendiri, kebanyakan seniman tidak akan memilih label apa pun.)

Kita masih ingat pada tahun 2011 sebuah stasiun radio dikenakan denda sebesar $7.000 oleh FCC hanya karena memutar lagu Sarah Jones yang berjudul “Your Revolution Will Not Happen Between These Thighs” (“Revolusimu Tidak akan Terjadi Di Antara Kedua Paha Ini”). Kamu mungkin akan tertawa pada ironi yang terjadi: sebuah lagu rap yang ditulis untuk melawan objektifikasi perempuan di dalam hip hop malah dituding sebagai sebuah lagu yang “porno dan mesum”, serta “ditulis dengan sengaja untuk menimbulkan efek kejut dan kontroversi”.

Kita cenderung mengabaikan contoh-contoh minor seperti di atas. Di negara-negara Barat di abad ke-21, kita tahu bahwa sensor hanyalah untuk orang-orang pandir yang gampang tersinggung. Sensor adalah untuk para orang tua yang ingin melarang buku Harry Potter dengan alasan novel fiksi tersebut mengajarkan Satanisme, atau untuk asosiasi orang tua pengawas musik pop yang membuat daftar “Lima Belas Lagu Imoral” yang harus dijauhi dari anak-anak. Penulis dan penyair Eugene O’Neill mengatakan, “Sensor, apa pun alasan dan tujuannya, adalah senjata pamungkas yang paling sering digunakan oleh para bigot dan pandir”.

Kita memahami itu semua, dan kita tertawa. Tetapi, mungkin seharusnya kita tidak tertawa. Para seniman mungkin cenderung mudah beradaptasi dengan denda kecil dan label peringatan yang ditempelkan pemerintah di karya-karya mereka, tetapi kita harus sadar bahwa ini semua dapat membuat para seniman untuk membatasi topik yang ingin mereka bicarakan, atau membuat mereka salah menilai potensi diri mereka yang sesungguhnya. Dan ini adalah langkah awal yang buruk bagi kebebasan.

Kita jangan lupa: meski kita memiliki kebebasan artistik, tetapi kebebasan berkarya dan berekspresi adalah kebebasan yang rapuh. Kita tidak boleh lupa betapa rapuhnya kita. Dan kita tidak

boleh melupakan bahwa di sepanjang sejarah kebebasan artistik sudah pernah dihancurkan berkali-kali.

Melupakan itu semua akan berujung pada tragedi. Bukan hanya karena itu berarti kita telah mengabaikan semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh banyak pendahulu kita demi kebebasan seni dan berekspresi. Tetapi juga karena itu berarti kita telah melupakan arti penting kesenian bagi kebebasan.

Saya ingin ingatkan di sini bahwa ketika saya menyebutkan "peran penting kesenian bagi kebebasan", saya tidak hanya sedang merujuk pada aktivitas-aktivitas kesenian didaktik—yakni bentuk-bentuk ekspresi seni yang secara eksplisit mempromosikan ide-ide kebebasan dan mengkritik kekuasaan. Tentu saja bentuk ekspresi seni semacam itu jauh lebih menarik dan efektif. Seni jalanan kontemporer yang dibuat oleh seniman seperti Banksy dan penyanyi folk Frank Turner, misalnya, merupakan contoh sempurna bagaimana sebuah aktivitas atau karya seni dapat membawa dampak sosial yang besar jika dilakukan dengan benar.

Tetapi bahkan karya seni yang tidak dibuat untuk mempromosikan ide-ide kebebasan pun sebetulnya merupakan karya yang penting bagi kebebasan. Penahanan dan penjatuhan hukuman kepada band rock asal Ceko "The Plastic People of the Universe" memicu gerakan Revolusi Beludru bukan karena lagu-lagu yang dibawakan mereka merupakan lagu politik, tetapi, sebagaimana dikatakan Vaclav Havel, "kebebasan untuk memainkan musik rock dipahami sebagai kebebasan yang asasi dan oleh sebab itu dianggap sama dengan kebebasan untuk berbicara soal-soal filosofis dan politik, kebebasan untuk menulis, serta kebebasan untuk mengekspresikan dan mempertahankan berbagai kepentingan sosial dan politik di dalam masyarakat". Hidup "di

dalam kebenaran" menjadi mustahil apabila anggota masyarakat tidak bebas untuk membuat karya seni.

Anggota Monty Python, Eric Idle, menjelaskan poin ini dengan gamblang: "salah satu cara mengukur tingkat kebebasan suatu masyarakat adalah seberapa banyak komedi yang beredar dan diijinkan; dan jelas masyarakat yang sehat lebih banyak mengijinkan komentar-komentar satiris ketimbang masyarakat yang represif," tulis Idle. Meski kita bisa melihat pesan-pesan politis di dalam karya-karya Monty Python—khususnya *Life of Brian* dan *Monty Python and the Holy Grail*—pernyataan Idle mengimplikasikan bahwa komedi itu sendiri sebetulnya sudah menjadi tindakan yang politis, sebuah tindakan yang pada hakekatnya "bekerja" untuk kebebasan. *The Parrot Sketch* (Sketsa Burung Beo) yang non-politis merupakan sebuah upaya kebebasan sebagaimana komedi mengenai legitimasi berbagai bentuk pemerintahan di film *Holy Grail*. "Sikap kurang ajar," tulis Mark Twain, "merupakan jawara bagi kebebasan dan bentuk pertahanannya yang terbaik".

Seni dapat menggoncang kemapanan. Apa pun bentuknya, seni dapat memaksa penikmatnya untuk memikirkan ulang ide-ide dan cara-cara berpikir tertentu. Emily Dickinson mengatakan, "Jika saya merasakan seluruh tempurung kepala saya dilepas, maka aku tahu bahwa itulah rasanya puisi". e. e. cummings mendeskripsikan perasaan yang sama ketika mengatakan bahwa teknik puisi dapat diekspresikan "dalam enam belas kata, mengutip Pertanyaan Kekal dan Jawaban Abadi ala burlesk, yakni 'Maukah kamu memukul seorang ibu dengan seorang anak?--Tentu tidak, saya akan memukulnya dengan batu bata'". Dan Margaret Atwood menggambarkan pengalaman tersebut di dalam puisinya, "*You Fit Into Me*" ("Kau Cocok Denganku"):

You fit into me
like a hook into an eye

a fish hook
an open eye

Kau cocok denganku
seperti kail dengan mata

kail ikan
mata kail

Seni terjadi pada saat persepsi kita berubah: lukisan pointilis dilihat dari jarak satu meter dan dari jarak sepuluh meter; kontras antara Laurence Olivier dan Kenneth Branagh ketika menyutradarai film *Henry V* yang diadaptasi dari drama Shakespeare; para seniman Pop Art yang terus meyakinkan kita bahwa objek sehari-hari dapat dilihat sebagai karya seni; John Cage ketika mempertunjukkan bahwa kesunyian adalah bagian dari seni musik. Seni memaksa kita untuk terus-menerus mengoreksi dan mengubah pemahaman kita tentang segala hal yang kita ketahui. Pengalaman artistik, entah dilihat dari sudut pandang pencipta atau penonton, melatih cara berpikir fleksibel. Dan itu merupakan bagian dari kebebasan.

Tetapi bukan itu saja yang membuat saya percaya bahwa seni penting bagi kebebasan. Seni menuntut kita untuk berpikir. Tetapi seni juga tidak menuntut kita untuk hanya berpikir mengenai satu hal saja. Seni memberi kita ruang untuk mengekspresikan opini kita beserta kompleksitasnya. Seni, sebagaimana kebebasan, tidak punya cukup kesabaran bagi ideologi. Walt Whitman menulis:

Apakah aku mengontradiksi diriku sendiri?
Baiklah kalau begitu: aku mengontradiksi diriku sendiri,
(Aku besar, aku mengandung kemajemukan)

Ralph Waldo Emerson juga mengatakan bahwa "konsistensi yang naif adalah momok dari orang-orang pandir, dan disukai oleh para negarawan dan filsuf medioker. Dengan konsistensi, orang-orang dengan pikiran besar akan menganggur." Bagi banyak seniman, memiliki opini yang final dan tetap mengenai suatu hal sering dirasa tidak masuk akal. Pemahaman muncul melalui proses penciptaan karya seni—sebagaimana pengetahuan muncul dari interaksi di dalam komunitas yang bebas, atau harga dapat muncul dari interaksi di dalam pasar bebas. Graham Wallas, salah satu pendiri dari London School of Economics, pernah menulis, "Seorang anak memiliki bakat menjadi seorang seniman/penyair ketika disuruh untuk selalu waspada dan memikirkan kata-kata yang keluar dari mulutnya ia berkata 'bagaimana aku tahu apa yang aku pikirkan tentang kata-kataku sampai aku mengucapkannya?'" Seni memberi ruang bagi kita untuk berpikir *odi et amo* pada saat yang bersamaan—cinta dan benci sekaligus. Seni membuat kita merasakan heroisme Henry V sambil pada saat yang bersamaan merenungi dampak buruk peperangan. Seni juga menunjukkan bahwa bisa ada banyak hal yang bernilai benar pada saat yang bersamaan, bahwa ada banyak perspektif dalam melihat realitas di sekitar kita.

Seni membuat ide dapat diutak-atik secara kreatif. Melalui kreatifitas semacam inilah berbagai inovasi dan penemuan dapat terjadi. Kreatifitas semacam ini pula yang dimaksud oleh ilmuwan Matt Ridley ketika ia mengatakan "kamu harus memahami bagaimana manusia menggunakan otaknya dan membiarkan ide-ide saling berkombinasi, berinteraksi, dan, tentu saja, saling berkembang biak. Dengan kata lain, kamu harus memahami bagaimana ide bersetubuh satu sama lain." Kreatifitas ini pulalah yang dipuji oleh Ronald Reagan—yang berprofesi sebagai aktor jauh sebelum menjadi politisi—ketika ia mengatakan, "di dalam atmosfer kebebasan, seniman dan para

patron memiliki kebebasan untuk bertindak dan memikirkan hal-hal yang tak terpikirkan; mereka bebas untuk berbuat kesalahan yang paling buruk dan merayakan kejayaan yang paling tinggi."

Proses penciptaan semacam itu—persetubuhan pikiran dan ide—dapat terjadi di mana saja, bahkan di tempat dan situasi yang paling buruk. Banyak karya seni tercipta di bawah tekanan rejim yang opresif atau di dalam sel penjara yang paling gelap. Musisi libertarian Lindy Vopnfjord mengatakan, "hasrat terhadap kebebasan adalah kekuatan terbesar bagi kreatifitas; itulah sebabnya mengapa karya seni paling indah dan paling kuat dapat lahir di tempat yang paling opresif." Bahkan ada beberapa seniman yang mengatakan bahwa untuk menciptakan karya seni yang terbaik dibutuhkan sedikit tirani. Federico Fellini mengatakan, "dibiarkan bebas sendiri, seniman justru tidak akan menghasilkan apa-apa. Jika ada suatu hal yang berbahaya bagi seorang seniman, itu adalah kebebasan total." Jika seniman tidak memiliki suatu apa pun untuk diprotes dan dikritisi, bagaimana impuls kreatif dapat muncul?

Itu hanyalah pandangan sebagian seniman. Albert Camus mengatakan bahwa hambatan mesti muncul dari diri sendiri. Camus mengatakan, "Tanpa kebebasan, tidak ada seni; seni hidup dari hambatan yang ia ciptakan sendiri, dan mati karena hambatan yang ditimpakan oleh orang lain." Hambatan yang diterima sebagai sebuah tantangan artistik berbeda seratus delapan puluh derajat dari tirani eksternal. Keats mengatakan hal yang sama dalam puisinya "*On the Sonnet*" ("Mengenai Soneta"): "... jika kita terpaksa dibatasi, / ... jika kita tidak boleh membiarkan Inspirasi berlari bebas, / maka Ia akan diikat oleh mahkota yang dikenakan-Nya sendiri." Itulah sebabnya kita harus melindungi seni dari pihak-pihak yang ingin memberikan

batasan yang tidak perlu bagi proses “persetubuhan ide”--meski pun orang-orang ini mengatakan bahwa batasan tersebut demi “kebaikan kita sendiri” atau demi “kebaikan masyarakat yang lebih luas.”

Ivan Grigoryevich, tokoh utama dalam novel karangan penulis Rusia, Vasily Grossman, berjudul *Forever Flowing*, berkata bahwa adalah sebuah kesia-siaan menganggap kebebasan artistik, sosial dan politik sebagai suatu yang terpisah.

> Aku dulu berpikir bahwa kebebasan adalah kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan hati nurani. Tetapi kebebasan adalah keseluruhan hidup setiap orang. Maksudnya adalah ini: kamu memiliki hak untuk menebar apa pun yang kamu mau, untuk membuat sepatu, jaket kulit, membuat roti dari tepung yang dibuat dari gandum yang kamu tanam, dan untuk menjualnya atau tidak menjualnya sekehendak hatimu; karena bagi para pekerja mesin bubut, pandai besi, atau para seniman, kebebasan adalah soal menjalani hidup dan bekerja sebagaimana kamu inginkan dan bukan berdasarkan apa yang diperintahkan kepadamu. Dan di negara kita ini tidak ada kebebasan—tidak bagi para penulis buku, bagi petani gandum, atau pun bagi para pembuat sepatu.

Telah banyak seniman yang mati karena menggunakan kamera, kuas, pena, alat pahat, sepatu balet, dan berbagai instrumen lain yang sering kita gunakan untuk membuat karya seni. Sekarang pilihannya ada di diri kita masing-masing untuk menggunakan instrumen-instrumen tersebut untuk membuat seni dan berkarya sesuai dengan kehendak dan kemampuan, memungkinkan lahirnya seni dan kebebasan bagi diri sendiri dan orang lain. Seni lahir dari kebebasan, dan pada gilirannya seni akan melahirkan

kebebasan. Seni itu remeh sekaligus vital, fantastis, sekaligus indah. Seni, pada dirinya sendiri, tidak mampu menyelematkan kita. Tetapi tanpa seni kita tidak akan bisa diselamatkan. Seni, sebagaimana dikatakan Richard Wilbur, “adalah soal hidup dan mati, sayangku. / Aku sering lupa itu.”

8.

Libertarianisme dan Sikap Rendah Hati

Oleh: Aaron Ross Powell

Libertarianisme adalah filosofi dengan implikasi yang radikal. Implikasi tersebut berasal bukan dari sebuah klaim bahwa libertarian tahu apa yang terbaik bagi orang lain, tetapi justru dari sikap skeptis terhadap pengetahuan sendiri, terutama terhadap kemampuan diri sendiri untuk mengatur-atur hidup orang lain. Kerendahan hati, sikap yang muncul dari skeptisisme, merupakan fondasi bagi kebebasan. Aaron Ross Powell bekerja sebagai peneliti di Cato Institute dan editor Libertarianism.org, yakni portal web terbesar mengenai ide-ide dan gagasan libertarianisme di internet. Aaron mendapatkan gelar JD (Juris Doctor, doktor bidang hukum) dari Universitas Denver.

Sejauh yang saya tahu, saya bisa salah mengenai banyak hal. Apa yang tidak saya tahu jauh melebihi apa yang saya tahu, sehingga kalau dibayangkan, pengetahuan saya tampak seperti rakit di tengah samudera ketidaktahuan yang maha luas.

Saya tidak malu mengakui fakta tidak mengenakan ini. Bukan hanya karena memang tidak ada yang perlu disesali dari kenyataan tersebut, tetapi juga karena semua orang yang lain juga berada pada posisi yang sama dengan saya. Ketidaktahuan kita selalu jauh melebihi apa yang kita tahu. Hal ini juga berlaku pada individu-individu yang dianggap cerdas dan berpendidikan.

Menyadari fakta tersebut dapat membuat kita menjadi lebih rendah hati. Dan sikap rendah hati ini, ditambah dengan sedikit pengetahuan tentang bagaimana pemerintah bekerja, dapat membuat kita menjadi seorang libertarian. Libertarianisme adalah filsafat kerendahan hati, sejenis filosofi yang menerima manusia sebagaimana adanya dan memberikan kebebasan untuk memperbaiki diri semampunya. Libertarianisme menyadari betapa berbahayanya kesalahan yang mampu dibuat oleh manusia, apalagi jika dikombinasikan dengan kekuatan koersif pemerintah. Libertarianisme ingin membatasi kekuasaan pemerintah karena menyadari bahwa pemerintah dijalankan oleh orang-orang biasa yang memegang kekuasaan luar biasa—dan bahwa kerugian yang muncul dari kekuasaan tersebut biasanya lebih besar daripada benefit yang dapat diraih. Libertarianisme berdasar pada kerendahan hati dan menolak untuk mentolerir segala bentuk keangkuhan sesiapapun juga yang merasa dirinya lebih tinggi dan lebih hebat dari orang lain.

Mari melihat lebih mendalam apa artinya menjadi lebih rendah hati terhadap pengetahuan kita sendiri. Masing-masing dari kita memiliki pengetahuan yang cukup banyak, mulai dari makanan yang kita makan pagi ini sampai jumlah bulan yang mengedari planet Mars. Kita tahu bahwa George Washington adalah presiden pertama Amerika Serikat, bahwa Boris Yeltsin adalah presiden pertama federasi Rusia, dan bahwa mengendarai mobil di bawah pengaruh minuman beralkohol adalah ide buruk.

Tetapi jika kita lihat sejarah pemikiran secara utuh, kita akan melihat bahwa tidak ada pengetahuan yang abadi: keyakinan hari ini bisa dibatalkan oleh pengetahuan baru. Apa yang dianggap benar secara ilmiah tiga ratus tahun yang lalu sekarang dianggap omong kosong. Para ilmuwan paling cerdas dalam sejarah pernah percaya bahwa kita bisa memahami pikiran dan karakter orang lain hanya dengan melihat dan mempelajari benjolan di kepala

(ilmu ini diberi nama ilmiah "*phrenology*"). Para begawan dan cendikiawan paling cemerlang dalam sejarah pernah percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta.

Bukan hanya di bidang sains, banyak filsuf yang berdebat mengenai persoalan-persoalan paling pelik dri filsafat semenjak mereka menjadi orang cerdas. Sekitar dua millennia lalu, Plato mengklaim bahwa ia berhasil mendefinisikan keadilan. Banyak filsuf sesudahnya mengajukan bantahan—namun tak ada satu pun dari mereka yang berhasil memberikan jawaban yang final dan pasti.

Kita harus selalu skeptis terhadap klaim pengetahuan absolut. Jika kamu melihat orang mengatakan bahwa ia berhasil menyelesaikan suatu persoalan filosofis, besar kemungkinan orang itu salah besar. Jika kamu melihat ilmuwan mengatakan bahwa mereka berhasil memahami sebuah topik secara komprehensif, dapat dipastikan dalam beberapa tahun ke depan bahwa klaim tersebut akan runtuh oleh persoalan baru. Jika kita mampu bersikap skeptis terhadap pengetahuan manusia secara umum, akan lebih mudah bagi kita untuk menepis klaim-klaim kepastian dari orang per orang.

Tetapi itu semua tidak cukup bagi kebanyakan orang untuk berhenti merasa bahwa mereka tidak pernah bisa salah.

Saya mulai menyadari betapa umumnya gejala keangkuhan intelektual tersebut semenjak duduk di bangku kuliah. Saya melihat banyak dosen-dosen yang memandang kepakaran mereka secara berlebihan. Seorang doktor di bidang kritik seni kadang tidak segan mengkritik riset di bidang fisika dan kedokteran. Hal semacam ini terjadi juga di luar lingkungan akademis, khususnya di bidang politik. Berapa banyak warga Amerika Serikat yang melihat betapa kompleksnya sistem layanan kesehatan di negaranya dan berkata, "oh, aku tahu

solusinya”? Berapa banyak pemilih di dalam pemilu yang tidak memiliki pengetahuan dasar mengenai ekonomi tetapi dengan yakin memilih kandidat karena percaya janji-janji si kandidat dapat membawa kemakmuran bagi negara? Perlu upaya yang tidak kecil untuk mengakui bahwa kita bisa saja salah mengenai hal-hal yang kita pikir kita tahu. Tetapi, paling tidak, seharusnya jauh lebih mudah untuk menyadari ketika kita tidak tahu apa-apa mengenai suatu topik.

Lebih jauh lagi, banyak dari kita yang sama sekali tidak merasa skeptis untuk beralih dari pengetahuan mengenai fakta (*facts*) menuju pengetahuan mengenai nilai (*value*). Ambil contoh mengenai nutrisi makanan. Banyak orang tahu makanan apa yang paling sehat, yakni makanan yang mengandung paling banyak gizi dan paling sedikit zat-zat yang berpotensi membawa penyakit. Jika kita mengkonsumsi makanan X, maka hasilnya pada kesehatan kita adalah Y. (Tentu saja, pengetahuan ini terus berubah seiring perkembangan riset-riset terbaru). Tetapi, perhatikan bahwa pengetahuan mengenai fakta kesehatan ini tidak serta-merta menghasilkan pengetahuan mengenai apa yang seharusnya saya makan. Makanan apa yang sehat sama sekali urusan yang berbeda dengan makanan apa yang *seharusnya* saya makan.

Saya bisa saja mengakui bahwa kentang goreng tidak sesehat brokoli rebus, namun sama sekali tidak salah apabila saya berpikir bahwa saya harus makan kentang goreng malam ini. Itu karena apa yang seharusnya saya makan tidak sama dengan makanan apa yang paling sehat bagi saya. “Seharusnya” mengimplikasikan banyak nilai (*values*): kenikmatan, harga, daya beli, dan sebagainya. Nutrisi atau kandungan gizi hanya berbicara mengenai satu *value* saja, yakni kesehatan, namun tidak mempertimbangkan berbagai *value* yang lain.

Skeptisisme terhadap pengetahuan berlaku bagi diri sendiri dan orang lain. Saya harus bersikap skeptis terhadap klaim kebenaran dari orang lain dan juga klaim kebenaran dari diri sendiri.

Tentu saja itu tidak berarti bahwa kita harus meragukan semua bentuk pengetahuan. Apa yang ingin saya sampaikan adalah: skeptisisme seharusnya membuat kita menjadi lebih rendah hati. Kita juga seharusnya berharap orang lain bersikap rendah hati pula, karena kita tahu mereka pun tidak punya klaim yang valid atas pengetahuan yang final dan absolut.

Pada titik inilah sikap rendah hati seharusnya membawa kita kepada libertarianisme. Jika kita sudah terbiasa bersikap skeptis terhadap pengetahuan diri sendiri, baik pengetahuan mengenai fakta maupun nilai, kita tidak akan mudah memaksa orang lain untuk menerima dan mempraktekkan keyakinan kita. Dengan kata lain, kita tidak akan mudah mengambil pentung atau memanggil polisi untuk menggebuk orang lain yang berseberangan.

Mengapa? Setiap kebijakan publik punya potensi untuk gagal dan berdampak buruk bagi masyarakat, tetapi bukankah kita selalu bisa mengoreksi dan mengubah kebijakan tersebut? Apa salahnya memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, entah melalui pemaksaan personal ataupun melalui kebijakan publik, selama kita yakin bahwa keyakinan kita benar adanya dan dijamin oleh fakta dan bukti yang mendukung?

Untuk menunjukkan di mana letak kesalahan cara berpikir semacam itu, ada baiknya kita memikirkan ulang tujuan hidup ini. Filsuf besar Yunani Kuni, Aristoteles, percaya bahwa satu-satunya hal tertinggi yang dapat dicapai di dalam hidup ini adalah *eudaimonia*—biasanya diterjemahkan sebagai "kebahagiaan" atau "kemajuan yang baik".

Aristoteles mengatakan bahwa *eudaimonia* bukanlah sesuatu yang kita rasakan pada momen-momen konkret kesenangan

atau kesakitan (yang kerap kita ekspresikan dengan mengatakan, “aku bahagia”), tetapi pada evaluasi menyeluruh terhadap hidup yang kita jalani. Di penghujung hayat, kita melihat ke belakang dan bertanya, “apakah saya sudah menjalani hidup yang baik?” Keseluruhan hidup kita, setiap alasan eksistensi diri ini, dapat disimpulkan pada jawaban “ya” ketika waktu kita sudah tiba.

Aristoteles memiliki idenya sendiri tentang hidup yang ideal, atau hidup yang memiliki *eudaimonia* tertinggi. Menurut Aristoteles, *eudaimonia* tertinggi adalah ketika kita hidup sesuai dengan karakteristik yang membuat manusia menjadi makhluk yang unik, yakni kemampuan menggunakan *reason* (akal sehat). Oleh karena itu, hidup yang terbaik adalah hidup yang penuh dengan kontemplasi. Maka tidak heran apabila salah satu filsuf terbesar di dalam sejarah mengatakan bahwa kebahagiaan mengalir dari hidup yang berfilsafat.

Tetapi, sebagaimana kita harus menyadari keterbatasan pengetahuan kita mengenai dunia eksternal, kita juga harus menyadari keterbatasan pengetahuan kita tentang resep hidup yang baik. Kebahagiaan versiku mungkin tidak sama dengan kebahagiaan versimu. Tidak ada kebahagiaan yang generik. Kebahagiaan mungkin dapat kita temukan pada akal sehat, tetapi kebahagiaan juga bisa kita dapatkan dari membesarkan anak, menikmati karya seni, membangun bisnis yang sukses, menjadi atlet, atau bahkan dari aktivitas menolong orang-orang yang kurang mampu. Dan jika hidup yang ideal bagi masing-masing orang dapat berbeda-beda, maka cara untuk mencapainya pun bisa berbeda-beda pula. Bagaimana saya membangun hidup yang ideal dapat sangat berbeda dengan cara yang kamu tempuh.

Meski saya berpendapat bahwa Aristoteles keliru, tetapi secara garis besar ia benar. Mayoritas orang ingin hidup yang baik—dan bisa dibilang bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dipakai

untuk mengejar kebaikan itu sendiri. Sebagaimana ditulis oleh para bapak bangsa Amerika Serikat di Deklarasi Kemerdekaan, "*... the pursuit of happiness* (hak untuk mengejar kebahagiaan)". Upaya mengejar kebahagiaan tersebut mungkin dapat berbeda-beda bagi masing-masing orang, tergantung pada situasi, minat, dan nilai-nilai yang dianut. Tetapi "upaya pengejaran" itu sendiri yang sebetulnya paling penting.

Sikap saling menghormati satu sama lain—yakni menghormati orang lain sebagai makhluk yang otonom—berarti menghormati cara masing-masing orang dalam mengejar kebahagiaannya sendiri-sendiri. Itu berarti tidak ikut campur atau menghalang-halangi mereka—dan memahami bahwa masing-masing orang punya hak untuk memilih jalannya masing-masing.

Saya sampai pada kesimpulan bahwa pemahaman semacam itu pada akhirnya akan berujung pada situasi yang serba terbatas, terutama jika dibandingkan dengan dunia aktual yang kita hadapi sehari-hari. Untuk memahaminya, kita perlu memiliki persepsi yang realistis tentang bagaimana pemerintah bekerja.

Pada prakteknya, orang-orang seringkali bertindak buruk, hanya mengejar kepentingannya pribadinya masing-masing, dan terkadang di dalam prosesnya justru menyakiti dan merugikan orang lain. Terkadang ada orang yang menyakiti orang lain hanya karena alasan yang sepele. Para pencopet mencuri harta orang lain, para tukang tipu mengelabui orang-orang yang polos dan naif. Bagi banyak orang, ketika berpikir mengenai pemerintah, berasumsi bahwa karakter-karakter buruk manusia semacam itu bisa hilang ketika mereka menjabat sebagai pejabat publik. Para politisi dianggap bisa meninggalkan sisi egois mereka dan hanya berpikir tentang bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan publik.

Tentu saja pemikiran semacam itu konyol. Manusia tetaplah manusia, bahkan ketika ia diberikan jabatan dan kekuasaan untuk mengatur hajat hidup orang banyak. Menjadi seorang birokrat atau politisi tidak otomatis menjadikan kita lebih cerdas dan lebih baik dari kebanyakan orang. Ada sekelompok pemikir yang menggunakan pendekatan realistis semacam ini untuk memahami hakekat pemerintah, bahwa orang tidak akan berubah sifatnya ketika diberikan jabatan; mereka hanya memiliki hambatan institusional yang berbeda dari kebanyakan orang. Aliran pemikiran realis ini dikenal sebagai "*public choice*" (teori pilihan publik, TPP).

TPP mengajarkan bahwa para politisi dan pejabat publik menggunakan pengetahuan yang mereka punya untuk membuat keputusan yang paling baik, yang mana "paling baik" diartikan sebagai produk dari pemikiran dan kepentingan-kepentingannya sendiri. Kepentingan ini termasuk, tentu saja, uang dan ketenaran, tetapi lebih sering berupa hasrat untuk mempertahankan kekuasaan.

Hasilnya: proses politik seringkali disederhanakan menjadi sebuah proses memenangkan suara kelompok-kelompok yang paling vokal, sambil di saat yang bersamaan meminggirkan kepentingan-kepentingan kelompok lain. Inilah sebabnya mengapa politisi seringkali membuat kebijakan-kebijakan yang buruk—seperti subsidi agrikultur yang mmebuat harga-harga pangan menjadi naik dan menghasilkan misalokasi sumber daya pangan—meski bukti-bukti empiris menentang kebijakan tersebut. Sebetulnya nyaris tidak ada politisi yang secara aktif mendukung kebijakan-kebijakan yang buruk. Hanya saja mereka termotivasi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang paling vokal, misalnya para pengusaha agrikultur yang diuntungkan oleh kebijakan subsidi pangan di atas. Mereka meloloskan kebijakan semacam itu karena tidak bisa melihat dampak

tidak langsung dari kebijakan tersebut (inflasi harga pangan, berkurangnya varietas, dan lain sebagainya).

Bahkan, kelompok masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan tersebut tidak serta-merta menyadari kerugian tersebut. Ada ongkos tinggi yang mesti dibayar apabila masyarakat ingin menjadi terdidik—mungkin jauh lebih tinggi dari keuntungan yang bisa kita dapat dari mencabut kebijakan merugikan tersebut. Inilah sebabnya mengapa kita, meminjam istilah para ekonom TPP, terus-menerus menjadi "bodoh rasional" (*rationally ignorant*). Dan karena kita tidak menyadari kerugian dari kebijakan-kebijakan yang dibuat politisi, kita juga otomatis tidak memiliki kesadaran untuk menyampaikan keberatan-keberatan kita pada politisi yang bersangkutan. Pada situasi semacam ini, kepentingan-kepentingan yang didengar hanyalah dari kelompok-kelompok berkepentingan khusus (*special interests*).

Patut diketahui bahwa ini bukanlah soal kualitas pejabat publik. Persoalan semacam ini tidak bisa dikoreksi dengan "memilih pemimpin yang lebih baik pada pemilu berikutnya". Pada kenyataannya, persoalan ini memang berasal dari cara pemerintah beroperasi di luar batas-batas yang ditentukan.

Fakta lain mengenai pemerintah yang seharusnya membuat libertarian khawatir adalah betapa luas jangkauan kuasa yang dimiliki pemerintah. Misalkan saya punya ide dan cara saya sendiri dalam mendidik anak, dan saya punya metode yang saya rasa paling tepat untuk melaksanakan ide tersebut. Jika saya tidak punya kekuasaan politik seperti pemerintah, maka jangkauan kuasa saya hanya terbatas pada anak saya sendiri—atau anak dari orang lain yang tertarik menerapkan ide saya.

Tetapi jika saya punya kekuasaan politik seperti pemerintah untuk menerapkan ide saya sebagai kebijakan publik, maka jangkauan kuasa saya tidak hanya berhenti pada anak saya,

tetapi juga pada semua anak-anak di kota, provinsi, atau bahkan di seluruh negeri. Orang lain tidak akan punya pilihan selain mendidik anak mereka dengan ide dan cara yang saya terapkan.

Jika kita adalah seorang skeptis, hal ini seharusnya akan sangat menganggu pikiran kita, karena apa yang dianggap sebagai ide terbaik untuk mendidik anak-anak tersebut bisa saja sebetulnya merupakan ide yang buruk. Dan bagaimana jika banyak orang tua yang tidak setuju dengan ide dan metode pendidikan tersebut? Bagaimana jika masing-masing orang tua punya ide mereka sendiri-sendiri tentang bagaimana seharusnya anak-anak mereka mendapatkan pendidikan? Pemerintah yang tidak kenal batas akan memaksa masyarakat untuk menerima satu jenis solusi tertentu, dengan asumsi bahwa apa yang baik bagi sebagian orang tentu akan baik pula bagi semua orang. Kita harus skeptis dengan klaim-klaim semacam itu. Kita harus menjadi rendah hati dengan "klaim kebenaran" versi tertentu.

Jadi apa batas bagi kekuasaan pemerintah? Apa jadinya negara yang didasarkan pada sifat skeptis dan kerendahan hati? Negara semacam itu adalah negara di pemerintahnya membebaskan masyarakatnya untuk mengejar kebaikan dan kebahagiaannya mereka masing-masing dengan cara mereka sendiri-sendiri.

Kita tidak akan pernah bisa mengejar kebahagiannya kita masing-masing jika masih hidup di bawah ancaman kekerasan dari orang lain. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk melindungi diri kita dari siapa pun juga yang ingin menyakiti kita secara fisik. Dan kita tentu saja tidak akan pernah bisa mengejar kebahagiaan kita sendiri apabila kita tidak bebas menggunakan segala sumber daya yang kita punya. Oleh sebab itu, pemerintah wajib mencegah dan menghukum tindakan pencurian.

Jika pemerintah berhasil melaksanakan dua tugas tersebut, maka ia telah memenuhi fungsinya dalam menyediakan kebebasan bagi masyarakat untuk dapat mengejar kebaikan dan kebahagiaan masing-masing dengan cara mereka sendiri-sendiri.

Tetapi ketika pemerintah melakukan hal-hal yang melebihi dua tugas utama tersebut—misalkan ketika mereka mengambil kekayaan kita untuk melaksanakan "program" selain dua tugas utama tersebut atau untuk memaksa kita untuk hidup berdasarkan nilai-nilai pihak lain—maka pemerintah sudah gagal memberikan kebebasan yang pantas kita dapatkan sebagai makhluk yang rasional dan otonom. Dalam kasus ini, mereka menyediakan keputusan bagi kita dan mendirikan hambatan bagi kita untuk mengejar kebahagiaan versi diri kita masing-masing.

Pada akhirnya, jika kita betul-betul membutuhkan negara, itu hanya karena kita harus dapat merasakan manfaat kehadiran negara di dalam upaya kita dalam mengejar kebahagiaan masing-masing. Menjadi rendah hati (dan berarti menjadi libertarian) berarti mengakui bahwa seberapa yakin pun kita dengan nilai-nilai dan gaya hidup yang kita anut, kita tidak bisa memaksa negara untuk menerapkan nilai-nilai tersebut kepada orang lain yang mungkin punya nilai dan gaya hidup sendiri-sendiri. Jika kita melakukannya, itu berarti kita sudah jatuh pada sikap angkuh dan melupakan pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sejarah: apa yang baik saat ini dapat dianggap buruk di masa depan.

Jika kita terlatih untuk menjadi rendah hati, kita akan melihat dunia ini sebagai sebuah arena yang kompleks, dipenuhi oleh orang-orang yang sedang menjalani perjuangannya sendiri-sendiri untuk mencapai kebahagiaan. Jika terlatih untuk menjadi rendah hati, kita akan selalu curiga terhadap setiap ajakan untuk memberikan negara dan pemerintah kekuasaan lebih untuk

melakukan hal-hal di luar tugas utamanya melindungi hak-hak kita untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Sebagaimana dikatakan John Locke, “Karena semua manusia (diciptakan) setara dan bebas, maka tidak boleh ada seseorang yang mencederai hak orang lain terkait hidup, kebebasan, dan harta-benda mereka”. Menggunakan kekerasan untuk memaksakan nilai-nilai kita kepada orang lain adalah kebalikan dari sikap rendah hati. Cara yang dipakai kelompok libertarian untuk menyebarkan nilai dan gagasannya adalah lewat kerja sama yang berbasiskan asas sukarela atau voluntarisme.

Kebijaksanaan tertinggi tidak hanya terletak pada saat kita menyadari seberapa besar kekuasaan yang kita punya, tetapi juga pada saat kita menyadari batasan-batasannya.

9.
Janji Kebebasan di Afrika

Oleh Olumayowa Okediran

Libertarianisme di Afrika semakin meluas dan memiliki keterhubungan dengan nilai-nilai lokal masyarakat di sana. Mentalitas sosialistik yang diimpor oleh para kolonialis, yang juga telah membelah masyarakat Afrika berdasarkan peta pembagian wilayah yang dibuat di Berlin, akhirnya mulai banyak ditolak oleh masyarakat Afrika sendiri. Kelompok libertarian di Afrika berupaya membangun sebuah visi tentang Afrika yang modern, makmur, dan bebas. Olumayowa Okediran adalah salah seorang anggota Dewan Eksekutif Students for Liberty, pendiri African Liberty Students Organization, dan mahasiswa di Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria.

Afrika menderita akibat berbagai bentuk kolonialisme. Pertama, mereka menderita akibat kolonialisme yang sudah kita kenal, yakni ketika berbagai penjelajah Eropa dan Arab datang dan membagi wilayah-wilayah di Afrika sebagai koloni. Kolonialisme jenis pertama ini, kurang-lebih, sudah berakhir. Lalu ada kolonialisme jenis kedua yang masih berlangsung saat ini, yakni kolonialisme di dalam pikiran. Mayoritas kelompok intelektual di Afrika "dijajah" oleh ideologi statisme, yang melihat pasar bebas sebagai sesuatu yang anti-Afrika. Mereka senang menggunakan batas-batas wilayah yang dibuat oleh pihak penjajah untuk mencegah perdagangan bebas demi menjaga kelestarian "identitas Afrika". Mereka juga gemar melihat dan menafsirkan masyarakat Afrika melalui paradigma

yang dirumuskan oleh ideolog Jerman, Karl Marx, yang bahkan tidak mengenal dan tidak peduli terhadap orang-orang Afrika.

“Kapitalisme”, yang mana maksudnya adalah sebuah sistem di mana orang-orang memproduksi barang dan jasa untuk dipertukarkan demi profit, kerap dicap sebagai sistem asing yang datang dari Barat, dan oleh karena itu tidak cocok dengan budaya Afrika. Kita kerap mendengar argumen usang yang terus diulang-ulang: kapitalisme akan berujung pada runtuhnya struktur sosial, yang mana kekayaan dikuasai oleh segelintir kaum “burjois” di atas penderitaan kelas pekerja dan rakyat miskin. Para pemikir Marxis dan Leninis mengatakan bahwa dalam modus produksi kapitalisme, yang mana barang diproduksi demi profit, maka marjinalisasi dan pemiskinan rakyat adalah hal yang tidak terhindarkan.

Orang-orang nyaris tidak pernah bertanya “apa itu betul?” Banyak orang-orang Afrika yang mengenyam pendidikan di Eropa justru pulang dengan mata yang tertutup. Mereka tidak lagi mengenal masyarakat Afrika. Mereka menjadi malas menengok sejarah mereka sendiri. Mereka tidak dapat melihat apa yang terpampang di depan mata mereka.

Para cendekiawan seperti Profesor George Ayittey telah banyak meneliti sejarah ekonomi, sosial, dan politik masyarakat Afrika. Penemuan Profesor Ayittey akan mengejutkan para Marxis yang mengatakan bahwa masyarakat Afrika adalah masyarakat yang hidup berdasarkan prinsip akumulasi komunal primitif. Realitasnya bagaimana? Orang Afrika justru sudah lama mengenal perdagangan bebas di dalam kerangka pasar bebas, di mana barang dan jasa dipertukarkan pada harga yang disepakati bersama oleh penjual dan pembeli. Masyarakat Afrika juga sudah

mengenal konsep kewiraswastaan dan inovasi, perdagangan jarak-jauh, sistem kredit, manajemen perusahaan, dan hukum perdagangan.

Ayittey di dalam bukunya yang berjudul *Defeating Dictators: Fighting Tyranny in Africa and Around the World* mengatakan bahwa sistem ekonomi masyarakat Afrika di jaman dulu memiliki banyak kesamaan dengan "kapitalisme" yang berkembang di Eropa dan wilayah lain, meskipun memiliki perbedaan pada aspek struktural. Kamus *Merriam-Webster* mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang bercirikan kepemilikan privat atau korporatis terhadap kapital. Masyarakat Afrika sudah memiliki hal semacam itu sejak dulu. Sebagaimana dijelaskan Ayittey,

> Para petani mengumpulkan sumber daya yang mereka punya bersama-sama, melakukan kerja sama, dan membantu satu sama lain. Ini bisa kita rujuk sebagai komunalisme atau komunitarianisme, tetapi keduanya tidak sama dengan sosialisme dan komunisme. Suatu masyarakat dapat menjadi komunal tanpa menjadi sosialis... . Para petani menjalankan aktivitas ekonomi mereka berdasarkan kehendak sendiri, bukan atas perintah kepala suku. Komunisme mengandaikan kepemilikan alat-alat produksi, dan tentu saja semua hasil produksi, oleh negara. Dalam masyarakat tani (Afrika), alat-alat produksi dimiliki oleh klan silsilah... . yang bertindak sebagai sebuah unit korporasi. Tetapi, klan ini tidak sama dengan unit pemerintahan kesukuan; klan ini adalah entitas privat dan, oleh sebab itu, alat-alat produksi dimiliki secara privat pula. Kepemilikan komunal (di dalam masyarakat Afrika) adalah mitos.[61]

Sawah atau unit usaha lain yang dimiliki secara privat oleh keluarga atau suku untuk memproduksi komoditas demi profit adalah aktivitas kapitalistik. Ayittey mengatakan bahwa banyak pihak yang telah salah menafsirkan komunalisme masyarakat Afrika untuk menyiratkan pesan bahwa sifat alamiah dari masyarakat Afrika adalah sosialistik. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang kerap kita asosiasikan dengan "kapitalisme" justru lebih telat datang di masyarakat Eropa.

Robert Hessen, ahli sejarah, menunjukkan, penjelasan bahwa "lahirnya perseroan terbatas adalah alasan mengapa korporasi-korporasi di Amerika mampu menyerap banyak modal yang mendorong terjadinya industrialisasi" adalah mitos belaka. "Pada kenyataannya," tulis Hessen, "revolusi industri dipacu oleh *partnerships* dan perusahaan saham-gabungan non-korporasi."[62] Perusahaan yang dimiliki secara privat oleh keluarga juga bukan hal yang asing di luar Afrika. Entitas bisnis semacam itu merupakan salah satu pendorong utama produksi, perdagangan, dan inovasi di dalam ekonomi pasar mana pun.

Pasar dan perdagangan telah menjadi bagian instrinsik dalam kultur masyarakat Afrika selama berabad-abad. Ini adalah pengetahuan yang sudah umum. Afrika pada jaman dulu dikenal berkat level perdagangannya yang meningkat drastis pada abad ke tujuh sampai sebelas masehi, ketika perdagangan trans-Sahara mengalami booming secara eksponensial. Perekonomian wilayah Mediterrania membutuhkan banyak suplai emas untuk diperdagangkan dengan garam, yang nilai jualnya saat itu sangat tinggi. Profit dan kewiraswastaan merupakan tulang punggung bagi banyak kerajaan seperi Mali, Ghana, dan Songhai. Perdagangan merupakan kehidupan rakyat Afrika sejak dulu. Masing-masing profesi yang dipilih secara bebas oleh tiap-tiap individu—petani, pandai besi, nelayan, pedagang pasar, sampai saudagar—bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan dan

perkembangan ekonomi; motif laba/profit merupakan bahan bakar bagi semua aktivitas tersebut.

Apakah semua hal tersebut merupakan hasil dari perencanaan pemerintah? Tidak. Pasar terjadi secara natural ketika para pedagang bertemu satu sama lain, seringkali transaksi terjadi secara sederhana di perempatan di mana dua jalan besar saling bersinggungan. Petani kecil dan para pedagang saling bertransaksi dengan tujuan untuk mendapatkan untung, bukan karena menuruti perintah kepala suku.

Di dunia ini, ada banyak jenis karakteristik perusahaan; perusahaan Jerman, perusahaan Korea Selatan, perusahaan Jepang, dan perusahaan Amerika Serikat, di mana masing-masing punya karakteristiknya sendiri. Masyarakat Afrika juga punya karakter bisnisnya sendiri. Bisnis keluarga merupakan karakteristik penting di Italia. Begitu juga di Afrika. Tetapi ini semua tidak berarti bahwa prinsip-prinsip yang mendasari aktivitas bisnis tersebut berbeda, atau bahwa komunisme, yang tidak berhasil dijalankan di Eropa dan China, dapat lebih sesuai diterapkan di Afrika.

Ayittey mencatat beberapa perbedaan karakteristik di berbagai kebudayaan: “di Amerika Serikat, individu dapat dengan mudah memulai bisnisnya sendiri, sedangkan di Afrika ada kebiasaan untuk melanjutkan bisnis keluarga atau klan.” Profit di dalam entitas bisnis di masyarakat Afrika dibagi kepada seluruh anggota keluarga, sementara dalam perseroan terbatas, profit disisakan bagi pemodal utama, atau dibagikan secara adil kepada para pemegang saham. Ada juga perbedaan dalam hal skala produksi. Kemampuan untuk berproduksi dalam skala jumlah yang amat besar merupakan karakteristik dari kapitalisme masyarakat Barat, sedangkan “dalam kapitalisme pedesaan skala produksi dilimitasi secara brutal”.[63]

Salah satu warisan kolonialisme dan statisme di Afrika adalah buruknya institusi hukum dan kekuasaan negara yang nyaris tanpa batas. Ini menyebabkan banyak aktivitas ekonomi di Afrika termasuk masuk ke sektor informal. Tanpa adanya supremasi hukum, tentu akan sulit bagi orang-orang di Afrika untuk mencari penghidupan. Oleh karena itu mereka mengandalkan hukum adat tradisional. Pada prosesnya, masyarakat Afrika mesti menginvestasikan sumber daya yang mereka punya untuk menghindari kleptokrasi birokrasi negara, "dewan pemasaran" pemerintah sosialis (warisan kolonialisme lainnya yang untungnya sekarang sudah mulai terkikis) yang kerap digunakan penguasa untuk mengopresi petani dan menyubsidi koalisi mereka.

Aktivitas ekonomi informal berkontribusi sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Afrika. Expert Group on Informal Sector Statistics melaporkan bahwa kontribusi sektor informal (termasuk sektor agrikultur informal) terhadap PDB di wilayah Sub-Sahara Afrika mencapai 55 persen. Angka ini akan menjadi 60 persen apabila Botswana dan Afrika Selatan ikut dihitung.[64] Profit, perdagangan, dan kewiraswastaan merupakan aspek inheren di dalam sistem ekonomi masyarakat asli Afrika.

Kota-kota di Afrika adalah sebuah pasar yang besar; silakan datang ke Lagos, Nigeria, kamu akan melihat spirit entrepreneurship masyarakat Nigeria; kota tersebut adalah pusat kegiatan entrepreneurship paling ramai. Mulai dari anak-anak muda menawarkan kudapan di pinggir jalan, penjual minuman botolan, *kenek* bis yang berteriak-teriak memanggil penumpang, atau sekelompok petani di wilayah pedesaan terdekat menanam melon bersama keluarga mereka. Semua ini merupakan aktivitas individual yang dilakukan dengan motif profit. Inilah Afrika yang saya kenal sejak dulu.

Aktivitas-aktivitas tersebut yang menjadi fondasi Afrika masa depan, sebuah wilayah untuk orang-orang yang bebas dan hidup dalam damai. Masa depan Afrika bukan dibangun oleh para birokrat lembaga donor internasional, para eks-kolonialis (entah itu Perancis atau Inggris), atau oleh para pejabat negara yang korup. Yang membangun masa depan Afrika adalah para perempuan di pasar, para pengusaha, dan anak-anak muda yang termasuk ke dalam apa yang disebut oleh Profesor Ayittey sebagai Generasi Cheetah, yakni generasi yang membenci korupsi, menuntut akuntabilitas, dan "yang tidak mau pemeirntah melakukan segala sesuatunya bagi mereka."[65]

Pengusaha Nigeria, Tony Elumelu, menjelaskan bagaimana masyarakat Afrika dapat mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang kronis melalui inisiatif privat dan kewiraswastaan ketimbang inisiatif pemerintahan. Elumelu memperkenalkan konsep Africapitalism: "Afrika 'baru': menghidupkan kembali sektor privat untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan membangun bisnis dan menciptakan kemakmuran sosial. Ini adalah sebuah pendekatan baru yang jauh meninggalkan model sentralisasi pemerintah untuk mengatur industri-industri nasional yang kerap direkomendasikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional".

Di dalam manifestonya yang berjudul *Africapitalism: The Path to Economic Prosperity and Social Wealth*, Elumelu memberikan argumen yang sangat brilian tentang mengapa sektor privat dan kapitalisme, melalui "proses investasi jangka-panjang yang membangun komunitas, dapat menciptakan kesempatan (bagi banyak orang) untuk keluar dari jurang kemiskinan". Elumelu pada dasarnya sedang mengadvokasi ekonomi pasar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di Afrika dan

mendukung kapitalisme pasar bebas sebagai pendekatan untuk "membangun kembali Afrika sebagai tanah bagi kewiraswastaan, inovasi, dan investasi".[66]

Saya percaya bahwa, untuk dapat menjadi lebih makmur, Afrika harus menjadi lebih modern terlebih dahulu, meskipun ini bukan berarti harus berkiblat pada "Barat". Profesor Olúfémi Táíwó, di dalam berbagai tulisannya, termasuk yang ada di dalam bukunya *How Colonialism Preempted Modernity in Africa*, menolak "tradisi yang menempatkan masyarakat Afrika di luar batasan-batasan kemanusiaan pada umumnya". Modernitas bukan hanya milik masyarakat Barat atau Eropa. Profesor Táíwó mengatakan bahwa dengan memahami bagaimana "kolonialisme menghambat modernisasi di Afrika, kita dapat membuat dakwaan yang lebih kuat terhadap kolonialisme sambil sekaligus mengambil manfaat dari apa yang dapat ditawarkan oleh modernisasi yang gagal akibat dari penerapan kolonialisasi secara formal".[67]

Kita perlu membedakan antara modernisasi dengan Westernisasi. Keduanya berbeda. Apa yang kita anggap sebagai hasil modernisasi saat ini pada dasarnya adalah hasil dari interaksi berbagai kebudayaan dan peradaban—Afrika, Amerika (Utara, Tengah, dan Selatan), Asia, dan Eropa. Proteksionisme dan pembatasan perdagangan membuat bangsa Afrika terputus dari dunia luar. Sama sekali tidak ada "nilai Afrika yang otentik" dari kesetiaan terhadap batas-batas negara yang dibentuk oleh para kolonialis Eropa di konferensi Berlin tahun 1884-1885. Para intelektual Afrika harus menolak ideologi-ideologi absurd seperti Marxisme yang kerap menyerukan wacana anti-Barat yang hipokrit dan slogan-slogan konyol seperti "nilai keaslian Afrika". Afrika harus ikut arus modernisasi dan menolak untuk ditempatkan "di luar batas-batas kemanusiaan yang umum".

Modernitas artinya menerima nilai-nilai individualitas manusia; menerima modus produksi melalui kerja sama dan pertukaran sukarela; menerima akal sehat dan menolak takhayul; menerima supremasi hukum di atas pemaksaan, dan produksi di atas perampasan. Modernitas artinya menerima prinsip kebebasan diri sendiri dan kebebasan bagi setiap manusia lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Profesor Táíwó di dalam buku *Africa Must Be Modern*, “Kita menghormati individu lain bukan hanya karena kita setuju dan mendukung pilihan-pilihan yang mereka ambil. Justru sebaliknya: kita harus menghormati pilihan-pilihan orang lain ketika kita tidak suka, bahkan mungkin membenci, pilihan-pilihan yang mereka ambil. Menghormati orang lain karena kita sama-sama anggota spesies manusia adalah penanda modernitas”.[68]

Libertarianisme di Afrika sedang tumbuh dan berkembang. Bukan cuma Generasi Cheetah yang akan mengubah Afrika, Tetapi juga generasi saya, yang saat ini sedang mengenyak bangku pendidikan. Kami tidak tahan melihat korupsi, kleptokrasi, dan pemerintahan yang brutal. Kami ingin semua penguasa otokratik menjadi lebih akuntabel. Kami menginginkan pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi, pasar bebas, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers. Kami menginginkan kebebasan dan tanggung jawab untuk menjalankan hidup kami sendiri-sendiri, untuk membuat pilihan-pilihan bebas, untuk mengejar kebahagiaan kami masing-masing. Libertarianisme akan mengubah Afrika menjadi lebih baik, dan bangsa Afrika akan mengubah dunia menjadi lebih baik.

10.

Dinamika Kusut Intervensionisme Negara: Kasus Subsidi Kesehatan

Oleh: Sloane Frost

Apakah intervensi dan perencanaan terpusat oleh pemerintah lebih rasional, atau justru menghasilkan "kekacauan"? Sejarah kebijakan intervensionis negara di bidang kesehatan di Amerika Serikat dapat menjadi contoh kasus yang menarik untuk melihat dinamika campur tangan negara, yang menghasilkan hasil yang inkoheren dan irasional. Kebebasan untuk memilih dari opsi-opsi yang disediakan oleh penyedia jasa, meski tidak terencana, justru lebih dapat memberikan hasil yang rasional dan terkoordinir ketimbang kebijakan intervensionistik. Sloane Frost adalah direktur dan salah satu pendiri Students for Liberty dan seorang peneliti di sebuah lembaga penelitian kebijakan publik yang berbasis di Princeton, New Jersey. Sloane mendapatkan gelar master dalam bidang Kebijakan Publik dan sertifikat dalam bidang Kebijakan Administrasi Kesehatan dari Universitas Chicago.

Kebanyakan dari kita pasti tahu bahwa hidup kita diarahkan, didesain, dan diatur oleh keputusan-keputusan yang dibuat oleh para politisi dan birokrat. Peran kebijakan publik telah begitu tertanam di dalam keseharian kita sehingga perlu upaya lebih untuk menyadari kehadiran mereka.

Kita bisa menyebut banyak contoh kasus, misalnya: wajib militer, pajak, undang-undang tindak pidana tanpa korban (*victimless crime laws*), dan sebagainya. Biasanya kebijakan-kebijakan tersebut punya tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk memaksa kita membela negara di dalam situasi perang, memaksa kita membiayai proyek-proyek yang diinginkan politisi, atau untuk mencegah kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh kepercayaan para politisi. Tetapi terkadang intervensi-intervensi pemerintah yang tidak disengaja. Intervensi semacam ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu sistem tersendiri.

Itu karena intervensi biasanya memiliki konsekuensi-konsekuensi yang tidak diniatkan. Mengontrol harga susu, misalnya, ditujukan untuk membuat harga susu tetap rendah. Tetapi kebijakan semacam ini akan berakibat pada berkurangnya suplai susu di pasaran, sehingga masyarakat justru kesulitan mendapatkan susu, memaksa mereka mencari susu di pasar gelap yang harganya bisa jauh lebih mahal ketimbang jika susu sejak awal dijual pada harga wajar. Konsekuensi-konsekuensi yang tidak diniatkan semacam itu seringkali berujung pada lebih banyak intervensi pemerintah, dengan tujuan untuk memperbaiki "kerusakan" yang terjadi akibat intervensi sebelumnya, dan intervensi-intervensi perbaikan ini pada gilirannya akan akan menimbulkan persoalan-persoalan lain untuk diintervensi.

Pada titik ini, kita akan hidup di dalam intervensi yang satu di atas yang lain, yang mana dasar dari tumpukan intervensi ini telah begitu jauh di bawah tanpa seorang pun ingat bagaimana kekusutan ini dimulai. Kita terbiasa hidup di dalam sistem semacam ini sehingga nyaris tidak ada orang yang terusik untuk mengubahnya. Parahnya, oleh karena intervensi-intervensi tersebut tidak didesain dengan koheren, tetapi dibuat dari krisis ke krisis, banyak orang menganggap semua kekusutan itu berasal dari "pasar bebas" atau "kapitalisme *laissez faire*" tanpa pernah

mereka mau memahami bagaimana jejaring intervensi negara dalam kehidupan masyarakat telah menimbulkan insentif-insentif yang salah dan berujung pada konsekuensi-konsekuensi negatif yang tidak pernah diniatkan oleh pemerintah.

Kita tidak akan pernah bisa memahami asal-usul krisis finansial jika kita tidak memahami bagaimana intervensi negara yang saling berkelindan dapat menghasilkan "gelembung kredit perumahan" yang masif di Amerika Serikat, dan bagaimana kebijakan intervensi telah mendorong bank untuk menurunkan standar pemberian kredit, menghasilkan tumpukan hutang, dan menyebarkan resiko tersebut ke seluruh dunia dengan menjual hutang-hutang ini sebagai instrumen investasi yang "bebas resiko". Tidak ada satu pun politisi beserta penasehat ekonomi mereka yang merencanakan krisis ekonomi, tetapi lapisan demi lapisan kebijakan intervensionis punya konsekuensi semacam itu (proses terjadinya krisis finansial 2008 dijelaskan pada salah satu bab buku *After the Welfare State*, salah satu buku dalam seri libertarianisme dari Atlas Network.[69])

Intervensionisme vs. "Regulasi"

Banyak orang berpendapat bahwa, karena pasar bebas tidak diatur oleh aturan sistematis dari pemerintah, pasar bebas lebih tidak rasional ketimbang intervensi negara. Ini masuk akal: pasar bebas, tidak seperti kebijakan pemerintah, tidak terencana. Hal ini mengasumsikan bahwa aktivitas pemerintah didasarkan pada perencanaan yang koheren, rasional, dan konsisten. Sayangnya, sejarah justru membuktikan sebaliknya. Meskipun intervensi pemerintah biasanya disebut "regulasi" ("*regulation*"), tetapi pada kenyataannya jauh dari makna sesungguhnya dari "regulasi". Kata "*regulate*" di dalam bahasa inggris punya arti "*to make regular*" ("menjadikan sesuatu reguler/teratur/rapi/tetap") dan "*to subject to a rule*" ("tunduk pada peraturan

tertentu").[70] Itulah makna sesungguhnya dari kata "regulasi". Sayangnya, ketika kita terapkan pada intervensi pemerintah, kata tersebut menjadi kehilangan arti: regulasi menjadi "campur tangan sekehendak hati".

Persoalan terkait intervensi pemerintah sudah pernah ditulis oleh James Madison, penulis utama Konstitusi AS, di dalam *Federalist* No. 62,

> Dampak dari kebijakan yang plin-plan dan berubah-ubah bisa sangat buruk. Hal itu bisa menjadi racun bagi kebebasan kita. Tidak akan ada gunanya bagi masyarakat apabila undang-undang dibuat terlalu banyak sehingga tidak diketahui oleh masyarakat, atau terlalu rumit sehingga sulit dipahami: jika undang-undang tersebut dicabut atau direvisi sebelum ia benar-benar diterapkan, tidak akan ada orang yang bisa menebak seperti apa undang-undang tersebut besok. Undang-undang diberlakukan menjadi seperti aturan penindakan; tetapi bagaimana ia bisa menjadi sebuah peraturan apabila tidak dipahami publik dan tidak tetap?
>
> Dampak lain dari kebijakan yang berubah-ubah adalah privilese berlebih bagi anggota masyarakat yang lebih kaya, terdidik, dan memiliki akses informasi lebih besar, sambil menafikan anggota masyarakat yang marjinal dan dan kurang terdidik. Setiap regulasi baru yang disahkan pemerintah terkait aktivitas komersial dapat memberikan kesempatan bagi bagi orang-orang yang memahami konsekuensi dari regulasi tersebut untuk mengambil berbagai keuntungan; keuntungan ini tidak muncul dari kerja keras mereka sendiri, melainkan diambil dari kerja dan upaya anggota masyarakat yang lain. Pada konteks ini, bisa kita katakan dengan tegas bahwa hukum dibuat hanya untuk segelintir orang, bukan untuk semua orang.[71]

Sistem intervensionistik, di mana undang-undang dapat diubah sesuka hati oleh para birokrat dan politisi, bukanlah sistem regulasi. (Sebagaimana telah diperingatkan oleh Madison, intervensionisme juga menyuburkan praktek *rent-seeking*, yakni upaya mendapatkan keuntungan pribadi melalui kekuasaan negara. Tetapi kita tidak akan membahas aspek ini.) Ketertiban hukum adalah syarat untuk menjadikan pasar menjadi "reguler"; bukan intervensionisme negara. Menumpuk kebijakan intervensionistik di atas kebijakan intervensionistik yang lain akan menghasilkan sebuah sistem yang gagal mencapai tujuan apapun yang koheren, rapuh terhadap krisis periodik, dan compang-camping.

Oleh sebab itu, kita perlu memahami dinamika intervensionisme melalui sebuah contoh kasus konkret. Contoh kasus terbaik adalah intervensionisme negara pada salah satu hal yang paling fundamental dalam hidup kita: mendapatkan layanan kesehatan, baik bagi diri sendiri dan orang lain. Di seluruh dunia, keputusan terkait layanan kesehatan dikontrol, dimanipulasi, dan diregulasi oleh negara. Di beberapa negara, negara punya monopoli mengelola rumah sakit dan layanan kesehatan profesional. Di beberapa negara lain, negara hanya menyediakan pendanaan, yang didapat melalui pajak, untuk membayar jasa dokter dan pekerja kesehatan lainnya. Hampir di semua negara dokter dan perawat hanya dapat bekerja jika sudah mengantongi ijin dari pemerintah. Ada banyak jenis intervensi negara di bidang kesehatan. Salah satu pekerjaan saya sebagai peneliti dan profesional di bidang kesehatan adalah mempelajari kebijakan kesehatan yang diterapkan pemerintah AS.

Subsidi Kesehatan di Amerika Serikat

Bayangkan kamu adalah seorang mahasiswa di Amerika Serikat. Lalu bayangkan apa yang terjadi jika kamu jatuh sakit. Hal

pertama yang menjadi beban pikiranmu mungkin tugas-tugas kuliah yang tidak dapat selesai, atau kehilangan waktu *nongkrong* bareng teman-teman di malam hari. Tetapi jika sakitmu sangat berat, kamu pasti berpikir untuk pergi ke dokter. Untuk itu, kamu harus tahu biaya kesehatan apa saja yang ditanggung oleh jaminan kesehatan yang kamu punya. Jika sakitmu sangat parah, kamu mungkin perlu pergi ke UGD di rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan dari sejumlah dokter, suster, dan pekerja kesehatan lainnya. Tanpa kamu sadari, keputusan dan tindakan yang kamu ambil sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dan regulasi di bidang kesehatan. Mari kita lihat bagaimana pemerintah mempengaruhi tindakanmu dalam soal kesehatan secara bertahap.

Salah satu pertanyaan yang mesti kamu jawab ketika kamu jatuh sakit adalah tipe asuransi kesehatan macam apa yang kamu punya. Perusahaan asuransi kesehatan beroperasi dengan cara menjalin kontrak kerja sama dengan pihak rumah sakit atau penyedia jasa kesehatan (misalnya dokter) untuk membayar sejumlah uang agar rumah sakit atau dokter tersebut terdaftar sebagai salah satu opsi di dalam skema asuransi kesehatan yang ditawarkan kepada nasabah. Sebagai contoh, Dr. Nozick ingin ditanggung oleh Asuransi Hayek. Kedua belah pihak akan menegosiasikan bagaimana Asuransi Hayek akan membayar jasa Dr. Nozick, misalnya dalam bentuk gaji per bulan, per pasien, atau per konsultasi. Jika sudah bersepakat, Asuransi Hayek akan memasukkan Dr. Nozick sebagai salah satu penyedia jasa kesehatan di dalam jejaring yang mereka miliki. Ketika kamu sebagai nasabah mencari seorang dokter yang ditanggung oleh Asuransi Hayek, Dr. Nozick akan menjadi salah satu pilihan.

Proses sederhana semacam itu bisa menjadi kompleks dan rumit dalam sekejap. Mengapa? Mayoritas warga AS memiliki asuransi kesehatan melalui perusahaan tempat mereka bekerja,

dan mayoritas mahasiswa memiliki asuransi kesehatan melalui asuransi keluarga. Mengapa kamu tidak bisa membeli sendiri asuransi kesehatan pilihanmu sendiri? Mengapa kamu tidak bisa membeli asuransi kesehatan secara *online* sebagaimana kamu membeli asuransi mobil? Ada jejaring kusut intervensi negara yang membatasi pilihan-pilihan tersebut. Tidak ada yang merencanakan sistem semacam itu; tetapi sistem ini punya logikanya sendiri. Logika ini adalah logika insentif dan krisis yang diciptakan oleh intervensionisme.

Selama Perang Dunia II, pemerintah AS mengeluarkan kebijakan kontrol harga dan pendapatan yang melarang pemberi kerja untuk menaikkan gaji karyawan. Untuk menarik pegawai baru, pihak pemberi kerja akhirnya menawarkan berbagai benefit non-tunai, salah satunya asuransi kesehatan. Di tahun 1943, "Dewan Kepegawaian Perang", yang memahami bahwa kebijakan kontrol pemerintah dapat menghambat penyerapan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan untuk memproduksi alat-alat perang, menetapkan bahwa kebijakan kontrol harga dan pendapatan yang terkandung dalam UU Stabilisasi 1942 tidak berlaku untuk pemberian asuransi, sehingga para pemberi kerja dapat menawarkan gaji yang tinggi tanpa melanggar peraturan. Pada tahun 1954, Internal Revenue Service menetapkan secara definitif bahwa pemberian asuransi kepada pegawai bukan merupakan objek pajak.[72] (Lagipula, jika pemberian asuransi tidak melanggar kebijakan kontrol pendapatan, maka itu bukan gaji, dan oleh sebab itu tidak dapat dipajaki.) Bisa kamu bayangkan insentif macam apa yang muncul akibat kebijakan-kebijakan tersebut. Jika sebuah perusahaan menawarkan $1,000 kepada kamu untuk datang dan bekerja bagi mereka, kamu masih harus membayar pajak untuk $1,000 yang kamu dapatkan. Tetapi jika mereka menawarkan $1,000 dalam bentuk asuransi kesehatan, pendapatan ini tidak kena pajak. Bahkan, jauh setelah kebijakan

kontrol harga dan pendapatan dihapus, masih ada insentif bagi pemberi kerja untuk menawarkan gaji pegawai dalam bentuk asuransi kesehatan. Kita telah menjadi begitu terbiasa dengan skema semacam ini sampai-sampai kita menerimanya sebagai sesuatu yang begitu adanya.

Kebiasaan ini kemudian diundangkan. Beberapa perusahaan bahkan mewajibkan pegawainya untuk menabung di sebuah rekening khusus non-pajak yang hanya bisa digunakan untuk keperluan kesehatan. Jika kamu bekerja di bidang yang tidak kena pajak, asuransi kesehatan yang kamu terima praktis menjadi komoditas yang disubsidi. Dengan begini, pegawai didorong untuk membeli asuransi yang disediakan oleh perusahaan, meskipun para pegawai mungkin lebih ingin menggunakan pendapatan tersebut untuk keperluan-keperluan lain. Terlebih lagi, berkat berbagai bentuk kebijakan dan intervensi, isi dari asuransi yang dibeli pegawai sangat dipengaruhi oleh arahan pemerintah.

Skema pembelian asuransi melalui pemberi kerja ini juga membuat pegawai tidak punya suara: pihak pemberi kerjalah yang menegosiasikan isi asuransi dengan pihak perusahaan asuransi, bukan si pegawai itu sendiri. Ini berarti pegawai "terpaksa" menerima paket asuransi yang tidak mereka pilih sendiri. Para pegawai disamaratakan oleh pemberi kerja, ketimbang diberikan kebebasan untuk membeli asuransi bersama kelompok lain yang mereka pilih sendiri. Pihak perusahaan asuransi sendiri tidak memiliki insentif untuk menegosiasikan isi asuransi per indvidual. Kesemua hal ini membuat para pekerja terjebak ke dalam situasi yang disebut sebagai "*job lock*". Jika mereka ingin pindah kerja, mereka harus menemukan pemberi kerja yang menawarkan benefit asuransi, karena membeli asuransi secara individual sangat sulit. Pekerja tidak lagi bekerja atas

dasar kepuasan atau insentif finansial. Pindah pekerjaan berarti menempatkan diri pada resiko tidak memiliki asuransi.

Situasi ini menjadi lebih rumit lagi: pemerintah juga melakukan intervensi besar-besaran terhadap pasar asuransi kesehatan. Masing-masing negara bagian memiliki kebijakan khusus yang mengatur berbagai komponen asuransi, misalnya: jaminan asuransi kehamilan (yang belum tentu dibutuhkan semua perempuan), terapi kecanduan alkohol, konseling kesehatan jiwa, dan lain sebagainya. Semua komponen tersebut merupakan layanan asuransi yang menarik, tetapi tidak semua orang membutuhkannya. Sayangnya, warga negara diwajibkan untuk membeli paket layanan tersebut. Terlebih lagi, karena masing-masing negara bagian menerapkan kebijakan yang berbeda pula, maka perusahaan asuransi harus mendapatkan lisensi khusus dari masing-masing negara bagian. Warga negara New Jersey, misalnya, dilarang untuk membeli asuransi dari perusahaan yang berbasis di Illinois. Pemberi kerja juga harus memberikan benefit kesehatan dari perusahaan asuransi yang berlokasi di negara bagian yang sama. Ini berarti pemberi kerja di New Jersey harus memberikan benefit kesehatan melalui perusahaan asuransi di New Jersey, meskipun mayoritas pegawainya tinggal di seberang sungai Pennsylvania. Akhirnya pasar asuransi dibatasi secara geografis, sehingga kompetisi di antara perusahaan asuransi menjadi berkurang—sehingga harga asuransi menjadi mahal bagi warga AS.

Kembali ke persoalan awal: apa yang kamu lakukan jika jatuh sakit? Andaikan kamu sudah punya asuransi kesehatan. Sekarang kamu perlu mencari seorang dokter. Generasi kita yang akrab dengan internet biasanya akan melakukan dua hal ini: mencari dokter melalui mesin pencari atau bertanya di situs jejaring sosial. Dengan begitu kita bisa menemukan dokter terbaik berdasarkan rekomendasi dan reputasi yang diberikan oleh banyak orang.

Pada titik ini kamu akan menyadari bahwa kamu tidak punya banyak pilihan. Hanya ada sejumlah kecil dokter yang dapat kamu pilih. Hanya ada sejumlah kecil perawat yang diijinkan untuk merawatmu. Bahkan jika kamu hanya mengalami infeksi telinga, hanya dokter yang punya ijin saja yang boleh menuliskan resep antibiotik untukmu. Bahkan seorang suster yang sudah berpengalaman lebih dari dua puluh tahun dan telah belajar selama tiga tahun di sekolah keperawatan tidak diijinkan untuk menuliskan resep yang sama. Tentu saja, ada banyak kasus di mana kamu memerlukan dokter yang berpengalaman lebih dari dua puluh tahun—misalnya ketika kamu memerlukan operasi otak—tetapi kenapa suster berlisensi tidak bisa sekedar menuliskan resep untuk infeksi telinga? Alasannya karena pemerintah tidak memberi ijin. Kamu harus menunggu lama dan membayar mahal untuk mendapatkan resep antibiotik dari seorang dokter yang kamu temui tidak lebih dari 10 menit (dan mengambil keputusan berdasarkan catatan dan laporan seorang suster).

Dan karena pemerintah memaksamu untuk bertemu Dokter Keynes meskipun sebetulnya penyakitmu cukup ditangani oleh Suster Sowell, sekarang Dokter Keynes bisa menentukan tarif yang sangat tinggi karena ia tahu kamu tidak punya pilihan lain. Memang ada upaya dari para dokter untuk membatasi persaingan; mereka, misalnya mengucilkan sekolah kedokteran yang melatih siswa berkulit hitam dan perempuan, sehingga suplai dokter menjadi sangat rendah. Inilah kenapa American Medical Association (Asosiasi Dokter Amerika) senang sekali dengan kebijakan intervensionistik.[74] Asosiasi inilah yang punya kuasa untuk menentukan siapa-siapa saja yang layak mendapatkan ijin praktek dan siapa saja yang tidak.

Kebijakan intervensi pemerintah juga membuat kamu tidak bisa memilih sembarang dokter. Para dokter biasanya memiliki

kontrak dengan perusahaan asuransi untuk menangani satu jenis asuransi kesehatan tertentu, dan mereka biasanya hanya mau menangani pasien yang memiliki jenis asuransi tersebut. Misalnya, kamu ingin dirawat oleh Dr. Ostrom tetapi beliau terikat kontrak dengan Asuransi Paterson ketimbang Asuransi Hayek, maka Dr. Ostrom tidak bisa menerimamu sebagai pasien. Tentu saja Dr. Ostrom punya pilihan untuk menangani para pasien yang membeli Asuransi Hayek, tetapi insentifnya sangat kecil: ada kemungkinan Asuransi Hayek menerapkan tarif yang berbeda dengan Asuransi Paterson, ada hambatan dan biaya administatif yang bertele-tele, atau bahkan ada resiko Asuransi Hayek tidak akan meng-*cover* Dr. Ostrom sama sekali. Oleh sebab itu, Dr. Ostrom memilih untuk tidak menangani pasien yang memiliki Asuransi Hayek. Tentu saja: akan sulit bagi seorang dokter untuk terus bekerja jika ia tidak dibayar secara layak.

Akan lebih sulit bagi kamu untuk pergi ke dokter apabila kamu tidak memiliki asuransi. Fakta bahwa kamu tidak memiliki asuransi adalah “sinyal” bagi seorang dokter bahwa kamu mungkin pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga besar kemungkinan kamu tidak akan mampu membayar biaya perawatan. (Membayar dokter secara lunas di awal tidak menjamin akses 100 persen.[75]) Produk asuransi pemerintah juga bukan pilihan yang baik, karena butuh enam bulan lebih lama bagi perusahaan asuransi negara untuk membayar seorang dokter dengan tarif yang jauh lebih murah. Oleh karena itu, tidak banyak dokter yang mau menerima pasien dengan asuransi negara.

Andaikan kamu akhirnya memilih untuk menegosiasikan sendiri biaya konsultasi dan perawatan dengan dokter yang bersangkutan. Bukankah dalam banyak hal, misalnya ketika membeli komputer atau barang lainnya, kita bisa melakukan

tawar-menawar langsung dengan penjual? Lain kali kamu pergi ke dokter, coba lakukan hal berikut: tanyakan kepada si dokter berapa biaya spesifik dari jasa yang ia berikan. Mayoritas dokter tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa? Mereka tidak tahu. Tidak pernah ada pasien di rumah sakit yang bisa berkeliling membandingkan harga jasa dokter yang satu dengan yang lainnya sebagaimana di toko perbelanjaan. Tidak ada "daftar menu" di rumah sakit. Tidak ada cara bagi pasien untuk membandingkan tarif antar dokter, bahkan untuk prosedur perawatan yang paling umum sekalipun.

Tidak ada insentif bagi para dokter untuk mengetahui tarif jasa mereka ketika pihak asuransi yang membayar semua biaya kesehatan. Kebanyakan pasien hanya perlu membayar biaya tambahan sebesar $20 yang diwajibkan perusahaan asuransi kepada pasien setiap kali berobat. Tak peduli seberapa lama kamu berkonsultasi dengan dokter, apakah hanya 10 menit atau 45 menit, kamu hanya perlu membayar $20. Tak peduli tipe perawatan apa yang kamu terima, apakah sekedar tes darah, foto rontgen, atau MRI, kamu hanya perlu membayar $20. Ini karena seluruh "biaya wajar" dari perawatan tersebut ditagihkan oleh para dokter ke perusahaan asuransi, dan pihak asuransi yang membayar semuanya.

Semua intervensi tersebut menghasilkan insentif-insentif yang tidak seimbang. Misalnya, dokter semakin punya alasan untuk melakukan prosedur-prosedur yang tidak diperlukan—dan mungkin berbahaya—dan pasien tidak berada pada posisi yang lebih tinggi untuk menanyakan itu semua. Kita biasanya berasumsi bahwa semua hal yang dikerjakan dokter pada tubuh kita memang perlu, padahal seringkali dokter melakukan tes-tes tambahan hanya untuk menghindari protes dan tuntutan dari pasien-pasiennya. (Akibat kebijakan intervensi, dokter-dokter juga menjadi sulit untuk melakukan mitigasi resiko, sehingga

mereka harus membeli asuransi malpraktek yang harganya sangat mahal.) Kita punya insentif untuk pergi ke dokter spesialis walaupun seorang internis (dokter yang fokus pada seluruh tubuh) dapat memberikan pelayanan yang sama baiknya. Kita hanya membayar $20, tetapi si dokter spesialis mendapat ratusan dolar untuk proses konsultasi yang hanya berlangsung lima menit. Itu sebabnya dokter cenderung melebih-lebihkan resep dan perawatan yang ia berikan, dan kita sebagai pasien tidak punya informasi dan pengetahuan untuk mempertanyakan itu semua.

Pada akhirnya, semua kebijakan intervensi yang dilakukan pemerintah AS membuat perusahaan asuransi berfungsi bukan sebagai perusahaan asuransi lagi. Sistem asuransi yang mana kita membeli asuransi kesehatan melalui pemberi kerja telah melahirkan sistem pembiayaan "pihak-ketiga" yang mirip dengan sistem kesehatan prabayar. Bayangkan kamu punya "asuransi makanan" sehingga kapan pun kamu lapar kamu tinggal pergi ke restoran dan biar perusahaan "asuransi makanan"-mu yang membayar tagihannya. Dalam sistem semacam itu, tidak ada insentif bagi kamu untuk menolak setiap porsi ekstra dan tidak ada insentif bagi pemilik restoran untuk memberitahukan harga makanan yang sesungguhnya. Untuk menanggulangi tagihan yang membengkak, perusahaan asuransi akan membuat kontrak dan kesepakatan dengan berbagai restoran. Bayangkan apa jadinya industri makanan jika menerapkan sistem pembayaran semacam itu. Sebagai gambaran, kamu bisa lihat apa yang terjadi pada industri kesehatan.

Kita seringkali mengeluhkan premi asuransi kesehatan yang semakin mahal, dan bukan tanpa alasan. Menghitung premi adalah persoalan teknis yang rumit, tetapi komponen paling utama dalam perhitungan premi adalah bahwa perusahaan asuransi diwajibkan untuk meng-*cover* berbagai macam layanan

kesehatan. Sebagai contoh, perusahaan asuransi wajib menebus biaya pengecekan berbagai tipe kanker. Tetapi komponen ini biasanya hanya direkomendasikan jika si calon pembeli asuransi berada pada rentang usia tertentu, atau berjender tertentu saja. Setiap kali komponen tersebut dimasukkan ke dalam layanan yang di-*cover* asuransi, premi yang harus dibayar pelanggan akan naik. Kenapa? Karena ada kebijakan intervensi dari pemerintah yang melarang perusahaan asuransi mendiskriminasi pelayanan berdasarkan usia, jender, dan faktor-faktor demografi lain. Ini berarti kita harus terus membayar berbagai layanan kesehatan yang kemungkinan besar tidak akan pernah kita gunakan. Bagi banyak orang, skema semacam ini masuk akal sebagai cara untuk membantu orang lain untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sangat mahal. Tetapi, di dalam konteks asuransi kesehatan, semua orang mendapatkan "subsidi" tersebut secara merata. Ini berarti uang yang kamu bayarkan sebagai pemuda berusia dua puluhan bisa jadi digunakan untuk membayar proses mammogram untuk seorang perempuan berusia enam puluhan yang kaya raya, atau untuk seorang perokok dan peminum kelas berat. Kamu tidak punya kebebasan untuk tidak membayar premi tersebut karena perusahaan asuransi diwajibkan oleh pemerintah untuk meng-*cover* berbagai layanan tersebut. Yang terjadi sesungguhnya: pemerintah sedang memajaki kamu melalui premi asuransi yang sangat tinggi, dan menyalurkan uang tersebut sebagai "subsidi" kepada orang lain tanpa pandang bulu. (Perhatikan bahwa subsidi silang semacam ini tidak terjadi pada kasus asuransi kecelakaan mobil: pemilik mobil berusia tua yang rendah-resiko tidak dipaksa untuk membayar premi lebih tinggi untuk menanggung pengemudi berusia muda yang suka berkendara ugal-ugalan.)

Bisa kita lihat bahwa ada jejaring insentif yang amat kusut di dalam skema asuransi kesehatan di AS. Tidak banyak orang yang

menyadari hal ini, tetapi hidup mereka diarahkan, dimanipulasi, dan dikontrol oleh kebijakan-kebijakan intervensionistik dari pemerintah. Kebijakan-kebijakan ini membuat kita semakin sulit mengambil keputusan-keputusan rasional terkait hidup kita sendiri. Dalam mengambil keputusan-keputusan penting seperti memilih layanan kesehatan terbaik, kita ingin menyeimbangkan berbagai aspek: kualitas, kenyamanan, harga, akses, reputasi, dan lain sebagainya. Sayangnya, kebijakan pemerintah dengan insentif-insentif yang ditimbulkannya menghadang kita untuk mencapai keseimbangan pilihan yang paling tepat. Harga asuransi kesehatan menjadi begitu mahal karena adanya larangan membeli asuransi antar negara bagian dan kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk meng-*cover* berbagai layanan kesehatan yang tidak diperlukan oleh nasabah. Kebijakan-kebijakan tersebut sebetulnya bisa dengan mudah dicabut tanpa mengorbankan kesehatan dan kondisi keuangan masyarakat. Justru: mengijinkan orang-orang untuk membeli asuransi antar negara bagian membuat perusahaan asuransi harus berkompetisi lebih ketat untuk menyediakan layanan dan pilihan yang lebih bervariatif dan murah.

Sistem harga pasar akan mendorong kita untuk melawan berbagai insentif disfungsional dan memastikan bahwa kita mendapatkan layanan yang benar-benar kita perlukan. Undang-undang sertifikasi membuat suplai tenaga kerja kesehatan menjadi sedikit. Para dokter menggunakan tangan negara untuk memaksa masyarakat menggunakan jasa mereka, ketimbang berkompetisi satu sama lain untuk menyediakan layanan kesehatan yang paling baik dan murah. Kompetisi antar penyedia jasa kesehatan akan meningkatkan pengetahuan pelanggan jasa kesehatan (yang lebih sering dirujuk oleh para dokter sebagai “pasien”) mengenai pelayanan kesehatan yang akan mereka terima. Juga: kompetisi akan mengeliminasi berbagai absurditas yang mana kita harus

membayar mahal jasa dokter untuk sekedar menuliskan resep antibiotik yang sebetulnya bisa dilakukan oleh seorang suster.

Sistem layanan kesehatan di AS sebetulnya bukan yang terburuk di dunia. Setidaknya kita masih punya banyak pilihan dan, selama punya asuransi, kita bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik untuk berbagai kondisi kritis dan kompleks. Tetapi jejaring kebijakan intervensionistik pemerintah telah menghasilkan kekacauan, inkohenrensi, dan krisis yang ongkosnya jauh lebih mahal dari seharusnya. Kebijakan-kebijakan tersebut juga telah mengubah kita dari seorang partisipan yang aktif menjadi sekedar "pasien" yang pasif menerima apa pun yang disediakan oleh sistem yang ada.

Teknologi kesehatan modern telah menghasilkan berbagai "mukjizat" kedokteran yang tidak pernah dibayangkan oleh para leluhur kita. Tetapi kita tidak akan pernah 100 persen menikmati mukjizat ini jika kita tidak membebaskan diri dari sistem intervensionisme negara yang mengekang, mencegah kompetisi, dan melahirkan berbagai jejaring insentif yang menyesatkan. Kita bertanggung jawab penuh atas masa depan dan seluruh keputusan hidup yang kita ambil. Termasuk dalam soal kesehatan: kontrol penuh seharusnya ada di tangan masing-masing individu. Kesehatan adalah aspek penting dalam hidup, dan kebebasan adalah fondasi dasar agak kita dapat mencapainya.

11. Pengetahuan dan Asumsi Kebebasan

Oleh: Lode Coassaer dan Maarten Wegge

Bagaimana hal-hal yang hanya diketahui secara terpisah oleh jutaan orang dapat menjadi berguna bagi semua orang? Apa kelebihan masyarakat yang bebas dibandingkan dengan masyarakat yang dikontrol oleh seorang diktator? Bagaimana penegakan hukum, hak milik pribadi, pertukaran bebas, dan mekanisme harga pasar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak bisa dipecahkan oleh pemerintah terpusat? Maarten Wegge belajar ilmu politik di ETH Zurich dan Universitas Antwerp, di mana ia menerima gelar master bidang ilmu politik dan aktif sebagai anggota Liberaal Vlaams StudentenVerbond (LVSV, Asosiasi Mahasiswa Liberal Klasik Flemis). Saat ini Maarten menjabat sebagai direktur akademik di Murray Rothbard Institute di Belgia. Lode Cossaer mendapatkan gelar master dalam bidang filsafat dari Universitas Antwerp dan Universitas Katolik Leuven dan saat ini sedang sibuk menulis disertasi doktoral. Lode mengajar ekonomi di Brussels. Seperti Maarten Wegge, Lode juga anggota aktif di LVSV. Lode merupakan anggota dewan eksekutif Students for Liberty Eropa dan presiden Murray Rothbard Institute di Belgia.

Andaikan kamu diminta untuk membuat semua keputusan hidup untuk orang tua dan saudara-saudaramu. Bisakah kamu melakukannya? Bayangkan kamu juga diminta untuk melakukan hal yang sama untuk teman-temanmu beserta keluarga mereka.

Bisakah kamu? Bagaimana jika kamu diminta untuk membuat keputusan untuk jutaan orang, baik yang masih hidup sekarang maupun yang akan lahir di masa depan. Nyaris mustahil, bukan?

Untuk melakukan itu semua, kamu tidak hanya perlu untuk mencari tahu soal-soal faktual saja, tetapi juga tujuan hidup dari masing-masing orang yang keputusan hidupnya kamu ambil alih. Tujuan macam apa yang ingin mereka ambil? Dan, setelah tujuannya sudah ditetapkan, bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut? F. A. Hayek menyebut persoalan ini sebagai "*the knowledge problem*", yakni "persoalan tentang bagaimana cara memperoleh penggunaan terbaik dari sumber-sumber daya yang diketahui oleh setiap anggota masyarakat, untuk tujuan-tujuan yang hanya dipahami oleh masing-masing individu di dalam masyarakat."[76]

Agar lebih jelas, kita bisa membagi *the knowledge problem* ke dalam tiga pertanyaan:

- Pertama, bagaimana suatu masyarakat dapat mengoptimalisasi penggunaan pengetahuan?
- Kedua, bagaimana kita dapat membangun insentif bagi masing-masing orang agar pengetahuan yang mereka punya dapat tersedia bagi individu yang lain?
- Ketiga, bagaimana kita dapat memproduksi pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengkoordinasi keputusan dan tindakan yang diambil orang-orang dan menciptakan kemajuan ekonomi dan sosial?

Ketiga pertanyaan tersebut akan bermuara pada pertanyaan yang lain lagi, yakni soal tipe proses sosial macam apa yang paling cocok untuk menghasilkan pengetahuan dan untuk mengoptimalisasi penggunaan pengetahuan tersebut. Jawaban yang diberikan oleh kelompok liberal (atau liberal klasik atau

libertarian) adalah apa yang disebut oleh Adam Smith sebagai "sistem kebebasan alamiah."[77] Elemen-elemen dasar dari sistem ini adalah: hak milik pribadi yang terdefinisikan dengan jelas, dilindungi secara legal, dan dapat dipindahtangankan; kebebasan untuk melakukan pertukaran; dan penegakan hukum untuk mendefinisikan, melindungi, dan memfasilitasi aktivitas pertukaran tersebut.

Persoalan ini tidak saja berkaitan dengan cara-cara terbaik untuk mengorganisir masyarakat, tetapi juga dengan soal moralitas dan etika. Apakah kebebasan masih penting apabila kita punya pengetahuan yang komplit tentang hasrat, keinginan, dan tujuan-tujuan hidup orang lain? Jika pengetahuan semacam itu bisa diraih, maka peran diktator yang mengontrol hidup orang banyak setidaknya menjadi sedikit lebih masuk akal (tentu saja dengan catatan bahwa diktator tersebut maha baik dan seratus persen bebas kepentingan). Sayangnya, tidak satu pun dari kita yang maha tahu, meskipun mungkin ada beberapa orang yang *benevolent* dan mampu memisahkan kepentingan diri dari kepentingan publik.

Apakah kamu mau orang lain untuk mengatur-atur dan membuat keputusan-keputusan penting dalam hidupmu? Kemungkinan besar tidak. Masing-masing dari kita biasanya memiliki pengetahuan yang spesifik tentang tujuan-tujuan yang ingin kita capai beserta cara-cara untuk mencapainya. Orang lain akan kesulitan untuk memahami dan mengetahui detail-detail dari pengetahuan tersebut. Tidak ada orang yang memahami situasi dan kondisi yang kamu hadapi kecuali diri kamu sendiri. Begitu juga sebaliknya: kamu tidak mengetahui secara spesifik apa yang dialami dan dihadapi oleh orang lain. Antara diri kita dan orang lain, ada asimetri fundamental yang sulit untuk dijembatani. Tetapi, asimetri ini merupakan titik berangkat yang sangat baik

untuk mempromosikan ide kebebasan. Salah satu argumen terkuat untuk liberalisme datang dari pemahaman mengenai *the knowledge problem*.

Mari kita lihat lebih jauh bagaimana *the knowledge problem* berkaitan dengan proses terciptanya keteraturan sosial yang berkelanjutan. Dengan "keteraturan sosial", yang dimaksud adalah situasi yang mana orang-orang dapat mengkoordinasi tindakan-tindakan mereka menjadi keuntungan bersama, entah itu untuk hal-hal yang sepele maupun yang lebih besar seperti aktivitas ekonomi dan produksi. Untuk menciptakan keteraturan sosial, yang dibutuhkan adalah apa yang oleh Hayek sebut sebagai "tata tindakan". Hayek mengatakan, "Apa yang dibutuhkan agar tindakan-tindakan individual manusia dapat menghasilkan keteraturan yang lebih besar adalah tidak hanya jika masing-masing tindakan tersebut tidak mengintervensi satu sama lain, tetapi juga ketika kesuksesan tindakan individual tersebut bergantung pada kecocokkan dengan tindakan-tindakan individu yang lain..."[78]

Sebaliknya, ketidakteraturan atau kekacauan sosial ditandai dengan banyaknya kriminalitas, penipuan, pencurian, pembunuhan, bahkan perang. Keteraturan sosial memungkinkan kita untuk mengejar tujuan hidup kita masing-masing dengan damai melalui kerja sama voluntaristik dengan orang lain, sehingga kita bisa menggunakan seluruh daya dan potensi kita tidak hanya sekedar untuk bertahan hidup (terutama ketika kita dihadapkan pada individu-individu lain yang mencoba untuk merampas hidup, kebebasan, dan harta-benda kita), tetapi juga untuk hal-hal lain yang membuat hidup ini jadi lebih berarti: persahabatan, cinta, kreatifitas, interaksi sosial, seni, olahraga, petualangan, penciptaan, dan berbagai hal-hal lain yang menjadi tujuan hidup orang-orang merdeka.

Kerja sama voluntaristik hanya dapat kita bangun melalui institusi yang tepat. Mari kita mulai pembahasan mengenai institusi dengan membedakan antara institusi ekonomi, politik, dan hukum.

Institusi Pasar: Pertukaran dan Harga

Tata hukum dan ekonomi macam apa yang dapat mengatasi *the knowledge problem* secara efektif? Sistem peraturan macam apa yang dapat mengoptimalisasi penggunaan pengetahuan? Sistem macam apa yang dapat mendorong orang-orang untuk menjadikan pengetahuan mereka tersedia dan berguna bagi orang banyak? Dan insentif macam apa yang dapat memproduksi lebih banyak pengetahuan, bukan justru membatasinya?

Sistem kebebasan alamiah yang didirikan di atas prinsip hak milik pribadi dan kebebasan untuk membuat kontrak/kesepakatan melahirkan dua energi yang tampaknya saling bertentangan satu sama lain: kompetisi dan kerja sama sosial. Kami tulis "tampaknya" karena pada prakteknya kita tidak perlu memilih satu di antara keduanya. Di dalam pasar, entrepreneur, pedagang, dan perusahaan saling berkompetisi satu sama lain untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan pelanggan. Kebebasan untuk berdagang juga mencakup kebebasan untuk memilih dengan siapa kamu mau berdagang dan dengan siapa kamu menolak untuk melakukannya.

Hak milik pribadi merupakan titik mula perdagangan; ketika kamu berdagang, kamu saling tukar-menukar hak milik, dan jika kamu tidak berdagang, kamu tetap memiliki apa yang jadi milik kamu. Jadi, pertukaran yang berbasis kesepakatan merupakan peningkatan atas titik mula tersebut. Hak milik pribadi juga menunjukkan siapa-siapa saja yang berhak untuk menggunakan suatu properti tertentu, selama tidak menghalang-halangi atau melanggar hak dan kebebasan orang lain.

Ketika seseorang punya kebebasan untuk melakukan apa pun yang ia mau terhadap suatu properti atau sumber daya tertentu, lalu ia punya juga kebebasan untuk memiliki hasil produksi apa pun yang muncul dari properti tersebut untuk dijual, maka orang tersebut akan punya insentif untuk mempertimbangkan apa yang orang lain inginkan terhadap hasil produksi tersebut. Tentu saja, pada prakteknya orang-orang bisa salah menebak apa yang diinginkan oleh orang lain (konsumen). Tetapi hak kepemilikan pribadi atas suatu properti atau sumber daya akan mendorong si pemilik properti untuk terus terlibat di dalam aktivitas produksi yang disukai oleh orang banyak. Dan harga modal (*capital prices*), yakni harga jual suatu properti atau sumber daya, akan menghasilkan insentif bagi pemilik properti/sumber daya dan calon pembeli untuk mempertimbangkan kondisi di masa depan (seberapa menguntungkan untuk memiliki properti tersebut di masa depan). (Secara teknis, harga sebuah rumah merupakan total potensi keuntungan sewa yang dapat diraih si pemilik rumah di masa depan setelah dipotong suku bunga. Dengan kata lain: nilai suatu barang di masa depan dapat kita kalkulasikan saat ini. Akan tetapi, apabila harga modal tidak bisa kita tentukan saat ini karena hak milik pribadi dan pertukaran bebas dilarang, maka barang-barang di masa depan tidak akan memiliki nilai saat ini atau *present value*, dan tidak ada insentif bagi orang-orang untuk memelihara barang-barang tersebut; inilah fenomena yang di dalam konteks ekologi disebut sebagai *the tragedy of the commons*."[79])

Aktivitas menjual dan membeli di dalam pasar menciptakan harga. Di dalam harga, tersimpan pengetahuan yang penting: ada seseorang di luar sana yang rela membayar suatu komoditas dengan harga tersebut. Harga berfungsi sebagai "wakil" bagi valuasi orang-orang terhadap komoditas atau barang tertentu. Jika saya memutuskan untuk memproduksi suatu barang, saya

bisa membandingkan harga yang digunakan orang-orang untuk menilai bahan mentah barang tersebut ketika digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Maka, untuk mendapatkan profit dari barang tersebut, saya harus menghasilkan nilai yang jauh lebih tinggi daripada harga tersebut. Jika para konsumen menilai barang produksi saya bernilai lebih rendah daripada ketika ia masih menjadi barang mentah, maka saya akan mengalami rugi, di mana hal ini dapat menjadi sinyal bagi saya untuk segera menghentikan atau mengubah produksi.

Harga muncul dari tindakan jual-beli, atau tawar-menawar, yang menjadi karakteristik ekonomi pasar. Kemunculan harga adalah efek samping dari aktivitas pertukaran, dan bersamaan dengan itu harga mentransmisikan informasi secara efektif dan universal dalam bahasa angka yang dipahami oleh semua pembeli dan penjual, baik yang aktual maupun yang potensial. Inilah sebabnya mengapa tidak diperlukan seorang perencana terpusat yang mengumpulkan semua agregat informasi di dalam ekonomi pasar. Setiap orang dalam masyarakat yang berkontribusi di dalam proses jual-beli mempunyai sepotong kecil informasi, tetapi tindakan dan keputusan yang mereka ambil menjadi sinyal yang memandu tindakan individu lain. Harga (pasar) mengkoordinasikan rencana dan tindakan banyak individu; dengan motif profit, keuntungan mutualisme dapat tercipta dan jutaan orang (yang masing-masingnya memiliki akses terhadap potongan informasi terbatas dan saling mengejar tujuannya sendiri-sendiri) dapat berkooperasi dengan damai dengan menyediakan informasi yang mereka miliki kepada satu sama lain, bukan hanya terkait tujuan-tujuan diri sendiri, tetapi juga terkait fakta objektif, teknologi, ketersediaan sumber daya, dan lain sebagainya. Ini semua hanya dapat terjadi apabila upaya masing-masing orang untuk mengejar kepentingan dirinya sendiri dibatasi oleh hak milik orang lain. Jika kepentingan

diri atau *self-interest* berkombinasi dengan kekuasaan koersif, yang terjadi adalah pencurian, kekerasan, dan kekacauan sosial lainnya.

Itulah mengapa baik kompetisi dan kerja sama sosial adalah sebuah proses, bukan kondisi ideal dari ekonomi pasar. Hak milik pribadi, pertukaran bebas, dan harga pasar menyediakan insentif bagi kita semua untuk membuka informasi yang kita punya kepada orang lain dan membantu kita mengkoordinasi perilaku masyarakat tanpa harus ada paksaan atau perintah terpusat. Kebanyakan pemilik perusahaan, tentu saja, tidak menyukai kehadiran pesaing dan kompetisi usaha. Tetapi pengusaha yang sama akan merasa senang sekali ketika pengusaha-pengusaha lain saling berkompetisi satu sama lain untuk melayani dia sebagai konsumen. Kita umumnya senang dengan harga beli yang murah dan harga jual yang tinggi. Jadi tidak heran jika kita menyukai kompetisi usaha di antara orang-orang yang memproduksi barang yang kita beli, tetapi kita tidak menyukai apabila ada pengusaha lain yang memproduksi barang yang sama dengan yang kita jual. Tetapi, secara umum, kita semua menjadi lebih diuntungkan ketika perdagangan bebas dan kompetisi usaha menjadi norma dalam masyarakat. (Segala bentuk upaya untuk mengamankan hak monopoli, subsidi, dan privilese-privilese lain melalui kekuasaan negara disebut oleh para ekonom dengan istilah "*rent-seeking*".[80] Studi ekonomi dan politik yang banyak membahas mengenai fenomena ini adalah "teori pilihan publik" atau "*public choice theory*".[81])

Pasar bebas adalah soal penciptaan nilai bagi orang banyak, bukan cuma soal "maksimalisasi profit".[82] Profit yang diterima perusahaan bisa menjadi penanda apakah suatu perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi masyarakat (konsumen) atau tidak. Profit adalah selisih antara harga jual dengan ongkos produksi: ketika ongkos produksi diekspresikan dalam

nominal uang, kita bisa melihat (melalui profit) nilai-tambah apa yang telah diciptakan seorang produsen melalui suatu barang mentah. Sedangkan kerugian, yang terjadi ketika suatu barang dijual dengan harga di bawah ongkos produksinya, juga menjadi sinyal bahwa, ketimbang menciptakan nilai-tambah, produsen atau perusahaan justru "merusak" nilai komoditas. Profit dan kerugian sama-sama menyediakan informasi dan insentif yang mengkoordinasi perilaku para pelaku pasar untuk mendistribusikan sumber daya kepada pihak-pihak yang paling menghargai sumber daya tersebut.

Institusi Politik

Bagaimana interaksi politik jika dibandingkan dengan interaksi pasar bebas? Apa keuntungan dan kerugian dari tindakan negara dalam mengatasi *the problem of knowledge*? Apakah ada mekanisme politik—entah itu diktatorial atau demokratik, sewenang-wenang atau berdasarkan konstitusi, terbatas atau tak terbatas—yang dapat mengoptimalisasi distribusi pengetahuan atau mendorong orang-orang untuk memproduksi pengetahuan dan membaginya dengan individu-individu lain? Apakah ada analogi mekanisme profit dan kerugian di dalam aspek politik agar kita dapat mengukur kesuksesan/kegagalan interaksi politik, sebagaimana kita mengukur kinerja ekonomi berdasarkan *profit/ loss* di dalam aspek ekonomi? Apakah interaksi politik—di antara para politisi, birokrat, dan para pemilih di dalam pemilu—dapat memberitahu kita tentang keinginan dan kebutuhan masyarakat dan mendorong kita untuk memenuhi itu semua?

Hal yang membedakan politik dari aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya adalah bahwa interaksi politik didirikan di atas prinsip pemaksaan atau koersi ketimbang prinsip kesukarelaan atau voluntarisme. Undang-undang yang diterbitkan pemerintah wajib dipatuhi dan berlaku untuk semua, tak peduli apakah

kita setuju atau tidak dengan isi undang-undang tersebut. Kita wajib membayar pajak, tak peduli apakah kita suka atau tidak; menolak untuk membayar pajak dapat berujung pada penyitaan aset, dijebloskan ke penjara, dan sebagainya. Dalam politik, kamu harus "membeli" apa yang ditawarkan kepadamu, tak peduli apakah kamu suka atau tidak. Kamu juga tidak bisa pilih-pilih: kebijakan luar negeri, kebijakan pajak, kebijakan anti-narkoba, kebijakan perkawinan, pendidikan, dan kesehatan, dan semua kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah wajib kamu terima. Tidak bisa kamu memilih untuk menerima sebagian isi dari undang-undang pendidikan, menerima secara penuh kebijakan luar negeri, dan menolak mentah-mentah undang-undang kesehatan.

Bayangkan kamu wajib membeli satu paket besar yang mencakup semua hal: rumah, peralatan mandi, belanjaan bulanan, *handphone*, kaca mata atau lensa kontak (bahkan jika matamu baik-baik saja), anjing atau kucing peliharaan (bahkan jika kamu alergi terhadap bulu kucing atau anjing), kaus kaki, koleksi musik, dan lain sebagainya tanpa ada pilihan untuk membeli itu semua secara terpisah dari *supplier* lain, atau bahkan untuk menolak membelinya sama sekali. Dan karena tidak berdasarkan asas kesukarelaan, maka besar kemungkinan transaksi tersebut tidak bersifat mutualistik (menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat). Ini berbeda dengan transaksi ekonomi di dalam pasar bebas yang mana transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berniat melakukan pertukaran.

Meskipun misalnya masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat kepada pemerintah, seberapa efektif mereka dapat menyampaikan semua hal yang menjadi aspirasi dan kebutuhan mereka? Dengan kata lain: pengetahuan apa saja terkait keinginan dan aspirasi kita yang secara efektif dapat kita komunikasikan melalui surat suara? Ketika kita mencoblos surat suara dalam

pemilu, kita diminta untuk mengkomunikasikan preferensi kita mengenai begitu banyak hal pada saat yang bersamaan, sehingga sulit bagi seseorang untuk menjelaskan alasan mengapa para pemilih memilih kandidat A dan bukan kandidat B, atau apa yang sebetulnya pemilih inginkan dari seorang kandidat. Hari-hari ini para politisi dipilih untuk membuat keputusan mengenai pajak, relasi diplomatik dan militer, lingkungan, pendidikan, imigrasi, kesehatan, perdagangan, perumahan, pernikahan, dan seterusnya dan seterusnya.

Seorang pemilih biasanya mendukung seorang kandidat karena menyetujui semua pendapat sang kandidat di semua isu-isu tersebut, atau sangat menyetujui pendapat sang kandidat pada satu isu tertentu yang dianggap penting. Pemilih juga biasanya memilih kandidat karena sang kandidat terlihat amanah, cerdas, santun, atau bahkan ganteng. Nyaris tidak ada cara pasti untuk mengetahui motivasi pemilih dalam pemilu. Bahkan jika seorang pemilih mengatakan pada lembaga survei, “saya memilih kandidat X karena X terlihat cerdas” (atau “saya setuju dengan sikap X terhadap kenaikan pajak”, atau “X sangat tegas dalam isu kriminalitas”), tetap akan sulit mengetahui sikap atau perilaku pemilih tersebut terhadap kandidat secara keseluruhan. Pemilu bukanlah metode yang paling efisien untuk mengetahui preferensi dan keinginan para pemilih (masyarakat). (Dan perhatikan bahwa salah satu hal yang perlu dipilih oleh para pemilih di dalam pemilu adalah apakah orang lain, terutama kelompok minoritas, perlu diberikan kebebasan yang sama dengan kelompok lain yang lebih besar; inilah sebabnya mengapa banyak orang mengatakan bahwa sistem demokrasi tanpa batas akan menjadi seperti dua ekor serigala dan seekor domba melakukan voting untuk memilih apa yang harus dimakan nanti malam).

Jika sebuah perusahaan memproduksi barang atau jasa yang tidak bernilai di mata konsumen, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian dan bangkrut. Sebaliknya, dalam politik para politisi dapat membayar suara kita untuk terus-menerus memilih kebijakan yang buruk. Kamu mungkin tidak suka pada kebijakan pemerintah, tetapi kamu wajib menerimanya. Dalam pasar bebas, seorang konsumen bebas untuk membeli barang atau jasa yang tidak diinginkan oleh konsumen lain, bahkan apabila barang atau jasa tersebut dianggap buruk atau "berselera rendah" oleh orang kebanyakan. Dalam pasar bebas, aktivitas membeli dan konsumsi mengeskpresikan preferensi dan selera individu dengan jujur, bahkan untuk preferensi dan selera yang paling tidak biasa sekalipun, selama aktivitas konsumsi tersebut tidak merugikan orang lain. Tetapi, ketika pemerintah yang menyediakan barang atau jasa, kita biasanya harus menerima produk yang sifatnya generik: *one-size-fits-all*. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita hanya ingin kebijakan yang ini tetapi tidak mau menerima kebijakan yang itu. Dalam politik, kamu mendapatkan satu paket: tidak ada pilihan untuk membeli sebagian produk atau jasa dari "produsen" alternatif. Akibatnya, kita tidak bisa menunjukkan preferensi dan selera kita yang sesungguhnya.[83]

Institusi Hukum

Peraturan dibutuhkan untuk menjamin terciptanya proses kerja sama yang damai. Pasar, sebagaimana pemerintah, diatur oleh peraturan. Sebagaimana dikatakan oleh John Locke: "Tidak ada kebebasan tanpa hukum".[84]

Kita tidak bisa membebaskan orang untuk melakukan pelanggaran hak seperti mengkhianati kontrak, mencuri, menyerang orang lain, dan berbagai pelanggaran hak lainnya. Tetapi peraturan tidak perlu menjadi kompleks dan rumit agar

efektif. Sebaliknya, peraturan yang sederhana untuk melindungi hak milik dan kontrak akan melahirkan harga pasar yang mengkoordinasikan perilaku sosial yang kompleks.[85] Dari studi mengenai ekologi hingga pergerakan burung dan ikan, para ilmuwan telah memahami bahwa prinsip-prinsip sederhana dapat menghasilkan pola yang rumit dan kompleks. Ini juga berlaku pada perilaku manusia: prinsip sederhana di dalam masyarakat yang bebas dan terbuka lebih mungkin menghasilkan keteraturan yang kompleks ketimbang intervensi yang detail dan menyeluruh dari para perancang masyarakat sosialis.

Agar dapat dikualifikasikan sebagai "liberal" atau "libertarian", peraturan atau undang-undang publik harus memiliki beberapa karakteristik: minimal, peraturan tersebut harus jelas dan dapat dimengerti; harus diaplikasikan secara imparsial; dan harus memisahkan ruang diskresi personal di mana setiap orang terbebas dari perintah dan kekuasaan yang semena-mena.[86] Ketiga hal ini sangat penting. Bayangkan apabila sebuah peraturan tidak jelas, sehingga sulit dipahami, bersifat retroaktif, dan bahkan kontradiktif. Ini berarti orang-orang tidak dapat mengetahui sejak awal apa yang legal dan ilegal. Konsekuensinya, ketidakjelasan hukum akan berujung pada rapuhnya perencanaan sosial, termasuk koordinasi rencana sosial yang bersifat suka rela. Peraturan legal harus dapat menginformasikan substansi hukum dengan benar. Jika tidak, maka hukum telah gagal menciptakan tata hukum sama sekali.

Tetapi peraturan yang jelas saja tidak cukup. Hukum juga membutuhkan hakim yang netral. Jika hakim menerapkan suatu peraturan kepada sekelompok masyarakat tetapi tidak menerapkannya pada kelompok yang lain, maka peraturan tersebut telah gagal menjadi hukum. Atau ketika hakim memutus suatu perkara atas motif suap, tekanan politik (yang kerap disebut sebagai "keadilan telepon", karena hakim menerima telepon

dari “Kementerian Kehakiman” untuk memutus suatu perkara tertentu), diskriminasi rasial, agama, bahasa, etnis, atau berbagai motif lain di luar semangat keadilan dan legal, maka peraturan juga telah gagal menjadi hukum. (Ini bukan berarti peran hakim harus bersifat mekanis; selalu ada ruang untuk kebijaksanaan praktis yang di dalam bahasa latin disebut *prudentia* dan di dalam bahasa Yunani disebut *prhonesis*. Tetapi keleluasaan ini tidak boleh bersifat semena-mena dan bertentangan dengan semangat keadilan sebagaimana suap, rasisme, dan kroniisme di dalam pengadilan). Kejelasan hukum yang ditopang oleh kepastian bahwa peraturan akan ditegakkan secara imparsial akan menghasilkan sebuah fondasi yang kuat bagi masyarakat yang adil dan merdeka.

Tetapi kerangka hukum bagi masyarakat yang bebas membutuhkan lebih dari sekedar peraturan yang jelas dan imparsial. Hukum juga harus dapat mendefinisikan dan melindungi ruang-ruang diskresi privat. Seseorang baru bisa disebut sebagai individu yang merdeka apabila, di dalam upayanya mengejar kebahagiaannya masing-masing, ia “tidak berada di bawah Kehendak dan Kuasa orang lain,” sebagaimana ditulis oleh Locke.[87] Setiap orang membutuhkan apa yang disebut Hayek sebagai “domain yang dilindungi”, di mana masing-masing orang bebas mengambil keputusannya sendiri. Tanpa perlindungan semacam itu, tidak akan ada inovasi atau produksi pengetahuan. Kebebasan menjadi penting bukan karena dengan itu kamu bisa melakukan apa yang kamu suka; tetapi justru karena dengan kebebasan orang lain dapat melakukan apa yang mereka suka. Sebagaimana dikatakan Hayek: “Yang terpenting bukanlah kebebasan bagi diriku sendiri, tetapi kebebasan yang dibutuhkan oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Kebebasan semacam ini hanya bisa kita berikan kepada orang lain hanya jika kita berikan secara penuh kepada semua orang.”[88]

The knowledge problem juga ada di dalam aspek hukum. Tidak ada orang yang benar-benar tahu apa dan bagaimana hukum yang terbaik bagi semua orang beserta implementasinya. Ini adalah persoalan yang kompleks. Inilah mengapa para pemikir liberalisme klasik mendukung mekanisme desentralisasi untuk merumuskan peraturan dan perundang-undangan yang baik, serta prosedur yang transparan dan terbuka untuk memutus suatu perkara. Mekanisme desentralisasi mencakup: otonomi daerah, federalisme, serta yurisdiksi yang saling tumpang-tindih dan berkompetisi agar kesalahan dapat segera dikoreksi; sedangkan prosedur yang transparan dan terbuka mencakup: pengadilan publik, publikasi hasil pengadilan, diskusi parlemen yang terbuka, kebebasan pers, dan berbagai praktek lain yang menjamin transparansi agar korupsi, ketidakadilan, dan kecurangan dapat segera diekspos. Kita tidak bisa sekedar percaya pada niat baik pemerintah. Institusi hukum di dalam masyarakat bebas harus dapat terus berfungsi bahkan ketika ada instrusi dari pihak-pihak yang memiliki niat jahat; hukum harus dapat terus bertahan dalam kondisi yang paling ideal (imparsial dan dijalani oleh hakim-hakim bersih) maupun dalam kondisi yang paling buruk (bersifat parsial dan dijalani oleh orang-orang bermotif buruk). Kondisi semacam ini bisa disebut sebagai kondisi yang "*robust*" ("kokoh").[89] Tetapi institusi hukum juga harus dapat beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi, bukan hanya sekedar menjadi kokoh; hukum harus dapat tumbuh dari kesalahan, sebagaimana pasar bebas di dalam ekonomi (ingat bahwa kompetisi pasar pada dasarnya adalah soal "*trial and error*", dan *error* atau kesalahan merupakan aspek penting bagi kemajuan dan pertumbuhan di dalam pasar bebas). Kondisi ini baru-baru ini diberi nama "antifragile".[90]

Kesimpulan

Mari kembali pada pertanyaan awal:

- Pertama, bagaimana suatu masyarakat dapat mengoptimalisasi penggunaan pengetahuan?
- Kedua, bagaimana kita dapat membangun insentif bagi masing-masing orang agar pengetahuan yang mereka punya dapat tersedia bagi individu yang lain?
- Ketiga, bagaimana kita dapat memproduksi pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengkoordinasi keputusan dan tindakan yang diambil orang-orang dan menciptakan kemajuan ekonomi dan sosial?

Pengalaman sejarah mengajarkan bahwa sistem komando dan kontrol *top-down* sebagaimana yang dibayangkan oleh kelompok sosialis, fasis, Sosialisme Nasionalis, Sosialisme Internasionalis, dan berbagai kelompok kolektivis lainnya, tidak pernah berfungsi dengan baik. Tidak ada satu orang pun yang mampu mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan untuk mengkoordinasi hidup jutaan orang yang memiliki tujuan hidup dan cita-citanya masing-masing. Inilah mengapa kebebasan dan penegakan hukum menjadi penting. Keduanya mampu melaksanakan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh perencanaan terpusat.

12.

Asal-usul Negara dan Pemerintah

Oleh: Tom G. Palmer

Apakah negara bertanggung jawab terhadap kemakmuran dan keteraturan sosial? Apa itu negara dan apa itu pemerintah? Kajian singkat mengenai sosiologi negara menunjukkan bahwa negara muncul ketika "bandit keliling" menjelma menjadi "bandit mangkal" dan mendirikan perampokan reguler. Salah satu capaian ideologi kebebasan adalah menempatkan negara di bawah hukum, sebuah proses perjuangan yang masih terus berlangsung hingga saat ini. (Esai ini pertama kali ditulis sebagai bahan kuliah pada Seminar Musim Panas Cato University tahun 2012).

Banyak orang percaya bahwa negara bertanggung jawab terhadap semua hal. Menurut Cass Sunstein, profesor hukum dari Universitas Harvard dan mantan pejabat Departemen Informasi dan Regulasi Gedung Putih, "Pemerintah 'terlibat' di dalam semua hal yang dimiliki masyarakat... . Jika orang kaya mendapatkan banyak uang, itu karena pemerintah berhasil mendirikan sistem yang memungkinkan orang kaya tersebut untuk mendapatkan dan menyimpan banyak uang."

Pernyataan tersebut sebetulnya merupakan formulasi akademik yang kerap diulang-ulang, hanya saja disampaikan dalam bentuk yang sederhana. "Jika kamu menjadi sukses, itu bukan karena hasil upaya kamu sendirian... . ada banyak pihak yang membantumu menjadi sukses... . Ada orang yang menciptakan

sistem hebat ini agar kamu dapat tumbuh dan berkembang. Ada orang yang membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Anda punya usaha? Itu bukan anda yang bangun sendirian. Ada peran orang lain yang memungkinkan itu terjadi". Itu kata-kata atasan Cass Sunstein, Presiden Obama.

Bahkan jika kita menggunakan penafsiran yang paling longgar sekalipun, tidak bisa dipungkiri bahwa Presiden Obama tidak memahami konsep kontribusi marjinal terhadap output, misalnya, nilai tambah yang muncul dari satu jam kerja tambahan. Obama tidak memahami bagaimana kemakmuran diciptakan.

Sunstein dan rekan-rekannya kemudian berpikir, oleh karena negara bertanggung jawab terhadap munculnya kemakmuran, maka negara juga berhak atas kemakmuran tersebut, dan siapa saja yang secara naif menganggap diri mereka pekerja atau produsen tidak memiliki klaim atasnya.

Apa sesungguhnya negara? Definisi kanonikal diberikan oleh Max Weber: negara adalah "suatu komunitas yang (secara sukses) mendapatkan klaim monopoli untuk melakukan kekerasan fisik yang terlegitimisasi di dalam suatu wilayah tertentu".

Pada kenyataannya, tidak mungkin semua kemakmuran yang ada di dunia ini dapat ditelusuri asal-usulnya kepada negara. Secara historis, kemunculan aparatus negara menyaratkan adanya surplus kemakmuran untuk membiayai kehadiran aparatus tersebut. Dengan kata lain, negara tidak akan pernah muncul tanpa adanya kemakmuran yang tercipta sebelum kemunculannya. Mari kita telusuri argumen ini lebih jauh.

Mengapa orang-orang dapat memiliki kemakmuran? Charles Dunoyer, seorang sosiolog libertarian awal, menjelaskan bahwa "hanya ada dua kelompok orang di dunia ini: yang pertama adalah orang-orang yang hidup dari hasil kerja atau produksi mereka sendiri, dan yang kedua adalah orang-orang yang ingin hidup

dari hasil kerja dan properti milik orang lain”. Sederhananya, para produsen/pekerja menghasilkan kemakmuran sementara para pengambil mengapropriasi kemakmuran.

Di dalam bukunya yang berjudul *The State*, sosiolog Franz Oppenheimer membedakan antara cara ekonomi dan cara politik dalam mendapatkan kemakmuran, yakni antara “kerja atau perampokan”. “Negara,” tulis Ferdinand, “bekerja dalam cara-cara politik”.

Cara-cara ekonomi harus lebih didahulukan ketimbang cara-cara politik. Namun, tidak semua bentuk kerja memproduksi sejumlah kemakmuran dalam jumlah yang cukup untuk membiayai negara. Tidak akan pernah muncul negara melalui masyarakat berburu dan meramu, misalnya, karena mereka tidak menghasilkan cukup kemakmuran untuk membiayai keberlangsungan hidup aparatus negara yang predatoris. Begitu juga dalam masyarakat agrikultur primitif. Negara baru bisa muncul dalam masyarakat agrikultur mapan, di mana masyarakat dapat menghasilkan surplus kemakmuran. Masyarakat semacam ini biasanya akan segera dikuasai oleh masyarakat nomaden (khususnya yang mengendarai kuda). Kita bisa melihat hal ini terjadi berkali-kali semenjak terjadinya erupsi invasi masyarakat nomaden dari Asia Tengah di masa lampau.

Memori mengenai hal ini salah satunya terekam di dalam Kitab Kejadian, terutama di dalam kisah pembunuhan keluarga antara Kain dan Abel. Dikisahkan bahwa “Abel adalah seorang penggembala domba, sementara Kain adalah petani yang membajak tanah”, sebuah gema atas konflik berkepanjangan antara masyarakat agrikulturalis dengan masyarakat penggembala yang nomaden.

Proses pembentukan negara juga merepresentasikan transformasi negara dari “bandit keliling” menjadi “bandit

pangkalan”. Sebagaimana ditulis oleh ekonom Mancur Olson, “Ketika seorang pemimpin bandit keliling menjadi cukup kuat untuk mengusir bandit-bandit lain dan menguasai suatu wilayah, dia dapat memonopoli daerah tersebut dan menjadi bandit pangkalan”.

Negara, pada dasarnya, adalah sebuah institusi predatoris. Tetapi, dilihat dari sisi tertentu, negara juga menandakan sebuah kemajuan, termasuk bagi pihak-pihak yang dirugikan olehnya. Ketika dihadapkan pada pilihan untuk melawan bandit keliling (yang merampok, membunuh, dan menjarah apapun yang bisa mereka ambil lalu kembali lagi tahun depan) dan bandit pangkalan (yang berdiam diri di wilayah kekuasaan memungut upeti dalam jumlah sedikit sepanjang tahun), maka pilihannya jelas: bandit pangkalan lebih jarang membunuh dan mereka dapat mengusir bandit-bandit lain. Ini jelas sebuah kemajuan—bahkan dilihat dari perspektif orang-orang yang sedang dirampok oleh si bandit pangkalan.

Negara lahir sebagai organisasi yang berfungsi untuk mengambil kelebihan kemakmuran yang dihasilkan oleh proses kerja dan produksi. Di dalam bukunya yang berjudul *The Art of Not Being Governed*, antropologis dan ilmuwan politik James C. Scott dari Universitas Yale mempelajari wilayah-wilayah di dunia yang tidak pernah berhasil ditundukkan oleh kekuasaan negara. Konsep sentral dari penelitian James Scott adalah “friksi kekuasaan”: kekuasaan tidak mudah bergerak ke wilayah tinggi. Ketika para bandit menginvasi sebuah lembah, para warga yang berhasil melarikan diri pergi ke wilayah pegunungan yang sulit dijangkau dan kurang menarik perhatian. Di sana mereka membangun institusi sosial, legal, dan religi yang sulit untuk dikuasai. Masyarakat semacam ini banyak muncul di daerah pegunungan dan rawa-rawa. (Saya sangat menyayangkan banyak pemimpin dunia tidak membaca buku James Scott sebelum

menguasai Afghanistan dan membangun “negara modern” di sana).

Apa insentif yang menjadi motif utama para penguasa negara? Biasanya orang akan mengatakan bahwa penguasa suatu negara berupaya untuk memaksimalisasi kemakmuran, atau produk domestik bruto. Tetapi James Scott mengatakan bahwa motif utama penguasa negara bukanlah memaksimalisasi PDB, namun “SAP”, yakni *state-accessible product* atau produk yang dapat diakses oleh negara. Secara spesifik, SAP adalah produk-produk yang mudah diidentifikasi, dimonitor, dikalkulasi, dan disita untuk kepentingan penarikan pajak: “Penguasa negara ... memaksimalisasi SAP, jika perlu dengan mengorbankan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan”.

Ambil contoh di bidang agrikultur. Para penguasa negara di Asia menekan produksi umbi-umbian “yang telah menjadi beban bagi para penguasa negara, baik tradisional dan modern” untuk meningkatkan produksi beras. Ini mungkin terdengar aneh. Mengapa penguasa negara peduli terhadap apa yang ditanam oleh para petani? Alasannya, tulis Scott, adalah karena para penguasa tidak bisa dengan mudah memajaki tanaman-tanaman yang tumbuh di bawah tanah. Para petani memanen umbi-umbian kapan pun mereka suka, tidak ada jangka waktu kapan umbi-umbian harus dipanen. Sebaliknya, tanaman padi harus dipanen pada jangka waktu tertentu oleh orang banyak, sehingga lebih mudah bagi penguasa untuk memonitor dan memajaki hasil panen dan merekrut para pekerja yang handal untuk masuk tentara. Insentif dan motif para penguasa memiliki dampak sistematis terhadap bagaimana wajah dan bentuk kehidupan bermasyarakat.

Sistem kontrol sosial yang diterapkan negara—mulai dari wajib militer hingga wajib sekolah—telah membentuk kesadaran

kita. Ambil contoh paspor. Kamu tidak bisa sembarangan pergi keliling dunia tanpa dokumen yang dikeluarkan oleh negara. Bahkan kamu sudah tidak bisa lagi pergi keliling Amerika Serikat tanpa dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian. Paspor sebetulnya adalah inovasi baru. Selama ribuan tahun, orang-orang telah bepergian ke mana pun mereka suka tanpa harus mendapatkan ijin dari negara. Di dinding kantor saya ada sepotong poster iklan dari sebuah majalah Jerman yang menggambarkan sepasang laki-laki dan perempuan di dalam sebuah kompartemen kereta sedang berhadapan dengan seorang petugas imigrasi yang berkata "silakan tunjukkan paspor anda". Poster itu ingin menyampaikan betapa paspor adalah barang berharga karena menjadi "kunci" bagi kita untuk melihat dunia luar.

Poster itu tentu saja *absurd*. Paspor justru membatasi kebebasan kita untuk melihat dunia luar. Kehadiran paspor menunjukkan bahwa kita tidak diperbolehkan bepergian tanpa ijin. Tetapi ideologi negara-bangsa telah terinternalisasi begitu dalam di kepala kita sehingga kita melihat paspor sebagai alat pemberi kebebasan, bukan sebaliknya. Di sebuah kesempatan saya pernah ditanya apakah saya setuju dengan adanya akta kelahiran bagi warga negara. Setelah berpikir sebentar, saya tidak melihat ada alasan kuat bagi negara untuk menerbitkan akta lahir, dan bahwa hal ini bisa dikerjakan oleh institusi lain selain negara. Maka saya menjawab "tidak". Si penanya begitu terkejut. "Lalu bagaimana kamu tahu siapa kamu sebenarnya tanpa akta kelahiran?" Bahkan identitas personal kita tidak ada artinya tanpa kehadiran negara.

Negara modern juga mengklaim diri mereka sebagai satu-satunya sumber hukum. Tetapi, secara historis, negara hanya sekedar mengganti hukum adat dan kebiasaan dengan hukum legal. Ada banyak hukum di dalam masyarakat yang sebetulnya

bukan produk negara, karena hukum pada dasarnya adalah efek samping dari interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh ahli hukum Bruno Leoni: "Individu membuat hukum selama mereka berhasil membuat klaim". Seseorang yang membuat kontrak pada hakekatnya sedang membuat hukum.

Di abad keenam belas, pemikir berpengaruh Jean Bodin mempelajari konsep mengenai kedaulatan, yang ia definisikan sebagai "kekuasaan tertinggi dan absolut atas warga negara di suatu wilayah persemakmuran". Bodin membedakan antara "kekuasaan yang tak dapat dibagi" dengan tata sosial lain yang muncul dari hukum adat dan kebiasaan. Bodin menolak hukum adat dan kebiasaan karena "penegakannya sedikit demi sedikit melalui kesepakatan semua pihak ... sementara hukum undang-undang muncul seketika, dan mendapatkan kekuatannya dari satu orang yang punya kuasa untuk memerintah orang lain". Dengan kata lain, Bodin memahami bahwa hukum adat dan kebiasaan menciptakan keteraturan sosial, namun ia menganggap hukum membutuhkan kekuatan imposisi hierarkis, yang pada gilirannya membutuhkan sebuah kedaulatan—sebuah kekuasaan yang absolut, tanpa syarat, dan oleh sebab itu berada di atas hukum.

Kedaulatan semacam itu secara inheren kontradiktif dengan supremasi hukum itu sendiri, dan juga kontradiktif dengan prinsip federalisme sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat, di mana kekuasaan dibagi ke dalam berbagai cabang pemerintahan yang berbeda. Di dalam rejim konstitusional, hukumlah yang menjadi kekuatan tertinggi, bukan kekuasaan absolut.

Perjuangan untuk kebebasan mencakup perjuangan untuk menempatkan kekuasaan (politik) di bawah hukum. Tetapi besarnya kekuatan negara telah meninggalkan bekas yang begitu nyata di dalam otak kita. Alexander Rustow, sosiolog

terkenal dan salah satu bapak kebangkitan liberalisme di Jerman, mengatakan ini terkait kekuasaan negara beserta dampak yang ditinggalkannya bagi masyarakat: “Semua dari kita, tanpa terkecuali, membawa racunnya masing-masing. Semua dari kita, secara kolektif maupun individual, merupakan aksesoris dari dosa terbesar sepanjang sejarah, dosa asal yang sesungguhnya, sebuah cacat herediter yang hanya dapat dihapus dengan kesakitan dan waktu yang lama, dengan pengetahuan kita sendiri atas patologi tersebut, dengan kehendak yang kuat untuk sembuh, dan dengan penyesalan yang tulus dari semua orang”. Dibutuhkan upaya yang tidak sedikit untuk membebaskan pikiran kita dari ketergantungan terhadap negara.

Ketika merefleksikan makna dari hidup sebagai orang yang bebas, kita tidak boleh lupa bahwa bukan negara yang memberikan identitas dan hak-hak kita. Deklarasi Kemerdekaan Amerika menyatakan bahwa “Untuk menjamin hak-hak ini, maka dibentuklah Pemerintahan”. Kita telah mendapatkan apa yang telah menjadi hak-hak kita. Negara menjadi bernilai ketika mereka membantu kita mendapatkan hak-hak tersebut, tetapi hak-hak kita berada di atas eksistensi negara. Ingat-ingatlah hal tersebut setiap kali ada orang yang mengatakan “itu bukan hasil upayamu sendirian”.

Bacaan Lebih Lanjut

Kebebasan bukan hanya konsepsi ideal mengenai interaksi antar umat manusia. Kebebasan juga dapat menjadi alat untuk mempelajari dan memahami dunia. Para pelajar dan mahasiswa dapat dengan mudah mengakses sumber-sumber bacaan mengenai kebebasan yang berdasar pada berbagai ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

Menggunakan kebebasan sebagai alat analisis akan membantu kita melihat berbagai hal-ihwal yang luput diamati oleh orang lain. Misalnya, banyak orang menerima begitu saja keteraturan yang terjadi di masyarakat sebagai sesuatu yang sudah seharusnya; mereka tidak memahami bahwa keteraturan tersebut bisa muncul melalui interaksi yang bersifat sukarela karena mereka tidak menggunakan "kaca mata" kebebasan. Orang-orang berinteraksi satu sama lain setiap hari tanpa ada perintah terpusat dari seorang pemimpin. Kaca mata kebebasan membantu kita melihat "keteraturan spontan" yang terjadi di sekitar kita, dan juga membantu kita memahami daya rusak dari campur tangan pemerintah terhadap keteraturan tersebut, menggantinya dengan "kekacauan perencanaan".

Kaca mata kebebasan juga dapat membantu kita melihat indahnya kesetaraan hak dan betapa tidak enaknya jika hak-hak tersebut dilanggar. Adalah kaca mata kebebasan yang telah membantu orang-orang untuk melihat bahwa perbudakan adalah sesuatu yang salah ketika banyak orang lain menerimanya sebagai suatu kenyataan yang apa adanya. Kaca mata kebebasan membantu kita untuk fokus pada ketidakadilan dan kesadaran moral untuk terus membuat dunia yang jauh lebih baik, lebih adil, lebih damai, dan lebih makmur. Pendeknya: sebuah dunia dengan kebebasan untuk semua.

Ada banyak sumber bacaan yang tersedia di banyak media. Ini adalah beberapa yang mungkin berguna:

Situs Web (Berbahasa Inggris):

Libertarianism.org menyediakan perpustakaan digital berisi video, esai, buku, dan berbagai bahan bacaan lain bagi siapa saja yang ingin menjelajahi ide-ide libertarian.

StudentsforLiberty.org menyediakan artikel, blog buatan pelajar, dan banyak materi lainnya. Situs ini menyediakan versi penuh dari buku-buku yang termasuk ke dalam rangkaian buku ini, termasuk *The Economics of Freedom, The Morality of Capitalism*, dan *After the Welfare State* dalam format PDF.

Oll.libertyfund.org (The Online Library of Liberty) tidak hanya menyediakan rujukan dan panduan kepada blog dan sumber-sumber bacaan kontemporer lainnya, tetapi juga merupakan perpustakaan digital raksasa yang menyimpan ribuan buku, mulai dari judul-judul populer hingga teks-teks akademik klasik.

Cato.org dibuat oleh Cato Institute, *think-tank* libertarian terkemuka, dan menyediakan berbagai hasil kajian yang menerapkan prinsip-prinsip libertarianisme ke dalam berbagai isu-isu yang spesifik dan kebijakan publik—mulai dari isu pajak hingga legalisasi ganja, keamanan internasional, dan subsidi kesehatan. Cato juga menyelenggarakan program khusus bagi pelajar yang dapat dilihat di www.facebook.com/CatoOnCampus.

TheIHS.org dibuat oleh Institute for Humane Studies, menyediakan beasiswa, seminar, dan berbagai hal lain bagi pelajar dan mahasiswa.

FEE.org dibuat oleh Foundation for Economic Education, salah satu *think-tank* paling tua di Amerika Serikat dan organisasi yang bertanggung jawab di balik penerbitan majalah *The Freeman*. FEE juga menyelenggarakan seminar untuk pelajar.

IES-Europe.org situs web resmi dari Institute of Economic Studies, Eropa, yang menyelenggarakan berbagai seminar untuk pelajar-pelajar di Eropa.

LearnLiberty.org menyediakan video kuliah singkat yang menghibur dan dibuat secara profesional yang menampilkan sejumlah profesor liberal dan libertarian.

AtlasNetwork.org dibuat oleh Atlas Network, menyediakan tautan kepada ratusan organisasi dan situs web dari seluruh dunia bagi siapa saja yang ingin mempelajari ide-ide mengenai kebebasan dalam bahasa Rusia, Arab, China, Spanyol, Portugis, Vietnam, Lithuania, Hindi, Perancis, dan puluhan bahasa lainnya.

Buku

Selain karya-karya yang dikutip melalui catatan kaki, buku-buku ini juga dapat membantu pembaca yang ingin mempelajari ide-ide kebebasan secara lebih mendalam.

Libertarianism: A Primer, oleh David Boaz (New York: Free Press, 1998), mengintegrasikan ide-ide libertarian ke dalam berbagai topik dan ditulis dalam bahasa yang sangat jelas. (Edisi baru akan terbit tahun 2014).

The Libertarian Reader, disunting oleh David Boaz (New York: Free Press, 1998), memuat berbagai tulisan klasik dan kontemporer terkait tema-tema libertarianisme.

Realizing Freedom: Libertarian Theory, Practice, and History, oleh Tom G. Palmer (Washington, DC: Cato Institute, 2009; edisi baru 2014), memuat esai-esai populer dan akademis terkait berbagai topik seperti sejarah, teori politik, filsafat moral, ekonomi, pembangunan, dan lain sebagainya.

Robust Political Economy, oleh Mark Pennington (Cheltenham: Edward Elgar, 2011), ditulis berdasarkan teori baru mengenai pilihan publik (*public choice*) untuk menyediakan pendekatan baru bagi ekonomi politik yang bergantung pada kondisi realistik untuk menilai berbagai sistem pemerintahan alternatif.

The System of Liberty: Themes in the History of Classical Liberalism, oleh George H. Smith (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), menawarkan sebuah pendekatan terhadap ide kebebasan yang mudah dibaca namun bersifat akademis.

Free Market Fairness, oleh John Tomasi (Princeton: Princeton University Press, 2013), menawarkan solusi teknis bagi berbagai isu akademik kontemporer terkait filsafat politik dan mengajukan tesis bahwa pasar bebas dan pemerintahan terbatas pada kenyataannya mampu memenuhi kriteria-kriteria "keadilan sosial" secara lebih baik ketimbang intervensi negara yang memang sengaja mengupayakan hasil-hasil "yang adil secara sosial".

Tentang Penyunting

Dr. Tom G. Palmer adalah wakil presiden eksekutif program internasional Atlas Network. Tugas utama Tom adalah mengawasi kinerja tim internasional yang bekerja di berbagai negara di dunia dalam memajukan ide liberalisme klasik, juga menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi riset dan think-tank internasional. Tom juga merupakan anggota senior di Cato Institute, di mana sebelumnya ia menjabat posisi wakil presiden untuk program internasional dan direktur Pusat Sosialisasi Hak Asasi Manusia (Center for the Promotion of Human Rights).

Tom merupakan penerima H. B. Earhart Fellow di Hertford College, Universitas Oxford, dan menjabat wakil presiden pada Institute for Humane Studies di Universitas George Mason. Tom juga aktif sebagai dewan penasehat Students for Liberty. Di bidang kepenulisan, Tom telah menerbitkan berbagai artikel dan kajian mengenai politik dan moralitas di berbagai jurnal akademik seperti *Harvard Journal of Law and Public Policy, Ethics, Critical Review,* dan *Constitutional Political Economy*, juga di berbagai media populer seperti *Slate*, *Wall Street Journal, New York Times, Die Welt, Al Hayat, Caixing, Washington Post*, dan *The Spectator* edisi London.

Tom mendapatkan gelar Bachelor of Arts di bidang liberal arts dari St. Johns College di Annapolis, Maryland; gelar Master of Arts di bidang filsafat dari Catholic University of America, Washington, DC; dan gelar doktor di bidang politik dari Universitas Oxford. Karya-karya akademis Tom telah diterbitkan dalam bentuk buku oleh Princeton University Press, Cambridge University Press, Routledge, dan berbagai penerbit akademis lainnya. Tom adalah penulis buku *Realizing Freedom: Libertarian Theory, History, and Practice,* yang terbit pada tahun 2009; juga penyunting buku *The Morality of Capitalism,* terbit tahun 2011, dan *After the Welfare State* yang terbit tahun 2012.

Catatan Akhir

1. Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*, terj. oleh Alan Cranston (New York: Penguin Books, 1968), h. 72.

2. Ibid., h. 64.

3. Kutipan lengkap Spencer dari esainya yang berjudul "*The Right to Ignore the State*" adalah sebagai berikut: "Mungkin bisa dikatakan bahwa kesepakatan ini bersifat spesifik, bukan umum, dan bahwa warga negara diasumsikan sudah menyetujui apa pun yang dilakukan oleh wakilnya (di parlemen), ketika mereka memilih wakil tersebut di pemilu. Tetapi andaikan posisi orang-orang yang tidak memilih wakil tersebut, dan bahkan telah melakukan berbagai cara untuk memilih wakil lain yang berseberangan pendapat dengan wakil yang terpilih—lalu bagaimana? Jawaban yang mungkin diberikan adalah bahwa, dengan berpartisipasi di dalam pemilu, para pemilih ini sudah setuju untuk patuh pada apa pun pilihan suara mayoritas. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memilih? Kalau begitu orang-orang ini tidak punya hak untuk komplain terhadap [hasil akhir pemilu], karena mereka tidak melakukan upaya apa pun untuk mencegahnya. Jadi, anehnya, orang-orang sudah dipastikan bersepakat dengan hasil akhir pemilu apa pun pilihannya—entah itu memilih ya, tidak, atau bahkan netral! Ini adalah doktrin yang sangat janggal. Bayangkan seorang warga negara yang malang sedang diminta pendapatnya apakah ia rela membayar pajak dalam suatu jumlah tertentu; dan terlepas apakah warga negara ini setuju atau tidak setuju, kita diberitahu bahwa ia secara praktis harus setuju dengan apa pun hasil yang muncul; terutama ketika jumlah orang yang setuju sedikit lebih besar daripada orang yang tidak setuju. Pada titik ini kita melihat sebuah prinsip mutakhir di mana persetujuan A tidak ditentukan oleh apa yang A katakan, tetapi ditentukan oleh apa yang B mungkin katakan!" Herbert Spencer, *Social Statics: or, The Conditions essential to Happiness specified, and the First of them Developed*, (London: John Chapman, 1851). Chapter: CHAPTER XIX: The Right to Ignore the State. Diakses melalui http://oll.libertyfund.org/title/273/6325 pada 23 Maret 2013.

4. Joaquim Nabuco, *Abolitionism: The Brazilian Antislavery Struggle*, terj. dan peny. oleh Robert Conrad (1883; Urbana, University of Illinois Press, 1977), h. 172. (Di dalam terjemahan

Conrad, kutipannya seperti ini: “Biarkan mereka mendidik anak-anak mereka—dan, tentu saja, biarkan mereka mendidik diri mereka sendiri—agar dapat menikmati kebebasan orang karena tanpanya kebebasan mereka sendiri akan menjadi seperti hadiah acak yang ia terima sebagai keberuntungan. Biarkan mereka mempelajari bahwa kebebasan adalah sesuatu yang bernilai, biarkan mereka mempelajari keberanian untuk mempertahankan kebebasan tersebut.”)

5. John Locke, *The Second Treatise of Government*, dalam *Two Treatise of Government*, peny. Peter Laslett (1690; Cambridge: Cambridge University Press, 1988), h. 306.

6. Michael Hummer, *The Problem of Political Authority* (New York: Palgrave Macmillan, 2013), h. 177.

7. Ibid., h. 178.

8. Ibid., h. 323. Locke melacak akar hak milik properti secata umum kepada “Hak milik Diri sendiri. Di sini, tidak satu orang pun punya hak kecuali dirinya sendiri.” Ibid., h. 287.

9. Madison, James. 1983. “Property.” Dalam *The Papers of James Madison,* jilid 14: 6 April, 1791–16 Maret, 1793. Charlottesville: University Press of Virginia. h. 266. Pernyataan lengkapnya (tersedia daring di http://oll.libertyfund.org/title/875/63884): “Istilah ini dalam penggunaannya yang spesifik berarti “klaim kekuasaan seseorang terhadap hal-hal yang ada di dunia, dengan mengeksklusi individu lain.’ Dalam konteks yang lebih umum dan luas, istilah ini mencakup semua hal yang diberi nilai oleh seseorang dan ia berhak atasnya; dan *sesuatu yang meninggalkan kepada orang lain manfaat yang mirip.* Dalam pengertian yang pertama, tanah, harta-benda, dan uang adalah properti bagi seseorang. Sedangkan dalam pengertian yang kedua, orang tersebut memiliki properti terhadap opini yang ia miliki dan kebebasan untuk mengkomunikasikannya. Ia memiliki properti terkait pandangan-pandangan relijiusnya, beserta kebebasan untuk menjalankannya. Ia memiliki properti dalam bentuk keamanan dan kebebasannya sebagai seorang manusia. Ia memiliki properti dalam bentuk kebebasan untuk menggunakan akalnya terhadap objek apa pun yang ia inginkan. Dalam rumusan lain, sebagaimana bisa dikatakan bahwa seseorang memiliki hak atas properti yang ia miliki, maka orang tersebut juga memiliki properti (hak milik) atas hak-haknya.”

10. Data yang dikumpulkan selama puluhan tahun oleh para peneliti di Fraser Institute of Canada dan dipublikasikan di dalam *Economic Freedom of the World Report* (dan dapat dilihat di www.freetheworld.com) secara jelas menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kebebasan maka akan menghasilkan kondisi yang lebih baik di mana pun, entah itu di Eropa, Asia, Afrika, atau pun Amerika Latin.

11. Richard Epstein, *Simple Rules for a Complex World* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1995).

12. Ilmu ekonomi muncul ratusan tahun yang lalu ketika orang-orang mulai menyadari bahwa negara-negara yang memiliki pasar yang lebih bebas cenderung lebih tertib dan sejahtera dan bahwa perintah raja tidak diperlukan untuk mengkoordinasi penawaran dan permintaan. Sebagai dicatat oleh sejarawan Joyce Appleby: "Para penulis ekonomi menemukan regularitas yang menopang aktivitas ekonomi. Sementara para moralis menyatakan bahwa kondisi bebas tidak teratur, para penulis ekonomi, yang menelusuri [asal-usul] harga pada permintaan, justru melihat keteraturan di dalam kondisi bebas. Dari situ, mereka sampai pada suatu hipotesa dan kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa individu-individu yang membuat keputusan untuk diri mereka sendirilah yang membentuk harga di dalam pasar. Sedangkan hipotesanya adalah rasionalisme ekonomi para pelaku pasar dapat menghasilkan keteraturan di dalam masyarakat yang sebelumnya diatur melalui otoritas kekuasaan." Joyce Appleby, *Economic Thought and Ideology in Seventeenth-Century England* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1978). h. 187-188.

13. John Emerich Edward Dahlberg, Lord Acton, *Historical Essays and Studies*, oleh John Emerich Edward Dahlberg-Acton, disunting oleh John Neville Figgis dan Reginald Vere Laurence (London: MacMillan, 1907). Bab: APPENDIX, Letter to Bishop Creighton, diakses melalui http://oll.libertyfund.org/title/2201/203934 pada 19 Mei 2013.

14. Untuk kasus pemilih di Amerika Serikat, lihat David Boaz, David Kirby, dan Emily Eakins, *The Libertarian Vote: Swing Voters, Tea Parties, and the Fiscally Conservative, Socially Liberal Center* (Washington, DC: Cato Institute, 2012).

15. "An Introduction to Libertarian Thought," video di www.libertarianism.org/introduction.

16. Fareed Zakaria, “The 20 Percent Philosophy”, *Public Interest* 129 (Fall 1997), h. 96-101, dikutip dalam Tom G. Palmer, “Classical Liberalism and Civil Society”, dalam *Realizing Freedom: Libertarian Theory, History, and Practice* (Washington, DC: Cato Institute, 2009). h. 221.
17. “Sharon Statement”, dapat dilihat pada http://en.wikipedia.org/wiki/Sharon_Statement.
18. Pidato penerimaan Barry Goldwater tahun 1964, dapat dilihat di www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/daily/may98/goldwaterspeech.htm.
19. Port Huron Statement, dapat dilihat di http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Huron_Statement.
20. Carl Oglesby, *Ravens in the Storm, A Personal Story of the 1960s Anti-War Movement* (New York: Scribner, 2008), h. 120.
21. Carl Oglesby, *ibid*, h. 173.
22. Milton Friedman, “It’s Time to End the War on Drugs”, dapat dilihat di www.hoover.org/publications/hoover-digest/article/7837; Jeffrey A. Mirron dan Jeffrey Zwiebel, “The Economic Case Against Drug Prohibition”, *Journal of Economic Perspective*, Vol. 9, No. 4 (Fall 1995), h. 175-192.
23. Lysander Spooner, *Vices Are Not Crimes: A Vindication of Moral Liberty*, tersedia pada http://lysanderspooner.org/node/46.
24. Daftar petugas dan pejabat penegak hukum yang bersedia untuk berbicara mengenai dampak buruk dari kebijakan pelarangan dapat dilihat di Law Enforcement Against Prohibition, http://www.leap.cc.
25. Untuk analisis yang lebih panjang mengenai isu ini, saya sangat menyarankan untuk membaca George H. Smith, *The System of Liberty: Themes in the History of Classical Liberalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).
26. Joseph Schumpeter, *History of Economic Analysis* (New York: Oxford University Press, 1974), h. 394.
27. Saya telah menulis tentang kemunculan dan pertumbuhan masyarakat sipil secara lebih detail di dalam esai yang berjudul “Classical Liberalism and Civil Society: Definitions, History, and Relations” di dalam buku *Civil Society and Government*, peny. Nancy L. Rosenblum dan Robert C. Post (Princeton:

Princeton University Press, 2002), h. 48-78, diterbitkan ulang di dalam Tom G. Palmer, *Realizing Freedom: Libertarian Theory, History, and Practice* (Washington, DC: Cato Institute, 2009).

28. Henri Pirenne mencatat bahwa "*burghers* (warga negara-kota) pada dasarnya adalah sekelompok *homines pacis*—makhluk pencinta perdamaian". *Medieval Cities: Their Origins and the Revival of Trade*. (Princeton: Princeton University Press, 1969), h. 200

29. Henri Pirenne, *Economic and Social History of Medieval Europe* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1937), h. 50. Di dalam bahasa-bahasa Eropa, ada dua kata yang muncul untuk mendeskripsikan fenomena baru ini: *burgenses* dan *civitas*. "Kata burgenses digunakan pertama kali digunakan apabila sebuah kota bukan sebuah civitas, dan civitas awalnya hanya digunakan untuk merujuk pada kursi keuskupan ('Bischofsstadt')". Hans Planitz, *Die Deutsche Stadt im Mittelalter: Von der Römerzeit bis zu den Zünftkämpfen* (Graz, Austria, and Köln, Germany: Böhlau, 1954), h. 100. *Burgensis* dan *bürgerlich* masuk ke dalam bahasa Inggris melalui bahasa Perancis sebagai "bourgeois". Kemudian, turunan dari istilah tersebut—bürgerlich/bourgeois dan sipil—digunakan sebagai sinonim. (Kata "burg" sendiri bertahan di dalam bahasa Inggris dan dapat ditemukan pada kata-kata seperti HillsBorough dan Pittsburgh, atau pada nama majelis perwakilan paling tua di koloni Inggris: the House of Burgesses).

30. Lihat Brian M. Downing, *The Military Revolution and Political Change* (Princeton: Princeton University Press, 1992) dan Charles Tilly, *Coercion, Capital, and European States* (Oxford: Blackwell, 1992).

31. Lihat Hendrik Spruyt, *The Sovereign State and Its Competitors* (Princeton: Princeton Universoty Press, 1994).

32. "The Trew Law of Free Monarchies", Raja James VI dan I, *Political Writings*, peny. Johann P. Sommerville (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), h. 75.

33. Adam Smith, di dalam karya masyhurnya yang terbit tahun 1776, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, tidak hanya menelusuri *sebab-sebab* dari "kemakmuran bangsa-bangsa", tetapi juga *hakekat* dari kemakmuran. "Kemakmuran bangsa" bukanlah kemakmuran

elit penguasa, atau kemakmuran kerajaan, atau jumlah emas yang dipegang bendahara negara. "Oleh karenanya, selama produksi ini, atau apa yang dibeli dengannya, memiliki proporsi yang lebih besar atau lebih kecil terhadap jumlah orang yang akan mengkonsumsinya, sebuah bangsa akan menjadi lebih makmur atau lebih miskin terkait berbagai kebutuhan atau fasilitas yang dibutuhkannya." Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, vol. I, peny. R. H. Campbell dan A. S. Skinner (Indianapolis: Liberty Fund, 1981), h. 10. Dengan demikian, Smith mengidentifikasi kemakmuran bangsa-bangsa bukan pada kemakmuran kerajaan, tetapi pada produksi tahunan yang dihasilkan oleh daya kerja gabungan bangsa tersebut kemudian dibagi berdasarkan jumlah konsumen, sebuah konsep yang saat ini kita kenal sebagai produk domestik bruto per kapita. Smith menyatakan sebab-sebab kemakmuran bangsa-bangsa di dalam suatu kuliah sebagai berikut: "Hanya perlu sedikit hal untuk mengangkat derajat suatu negara ke tingkat tertinggi kemakmuran dari barbarisme yang paling rendah, yakni perdamaian, pajak yang rendah, dan lembaga peradilan yang berfungsi dengan baik; sisanya akan terjadi secara alamiah. Setiap pemerintahan yang mencoba menghalang-halangi proses alamiah ini, dengan memaksakannya menuju ke arah lain, atau yang mencoba menangkap kemajuan yang terjadi di dalam masyarakat pada satu titik tertentu, adalah [distorsi] yang tidak wajar, dan agar dapat tetap eksis, mereka harus bertindak opresif dan lalim." Dikutip oleh Dugald Stewart dari manuksrip (yang sekarang telah hilang) "Account of the Life and Writings of Adam Smith, LLD", dalam Adam Smith, *Essays on Philosophical Subjects*, peny. W. P. D. Wightman dan J. C. Bryce, vol. 3 dari *Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith* (Indianapolis: Liberty Fund, 1982), h. 322.

34. Lihat *The English Levellers*, peny. Andrew Sharp (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

35. E. L. Godkin, "The Eclipse of Liberalism", *The Nation*, 9 Agustus 1900, dipublikasi ulang dalam David Boaz, peny., *The Libertarian Reader* (New York: The Free Press, 1997), h. 324-326, h. 326. Analisa Godkin mengenai sebab-sebab kemunduran liberalisme patut kita perhatikan lebih seksama: "Terhadap prinsip-prinsip dan resep Liberalisme kemajuan material yang pesat di masa lalu menjadi mungkin. Bebas dari

campur-tangan pemerintah yang menjengkelkan, orang-orang dapat melakukan tugas alamiah mereka, yakni meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri-sendiri. Hasilnya adalah kemajuan yang ada di sekitar kita saat ini. Tetapi sayangnya kenyamanan material ini membutakan mata generasi muda terhadap sebab-sebab yang melahirkan kenyamanan tersebut. Dalam konteks konstelasi politik dunia, Liberalisme sedang mengalami kemunduran, dan hampir menjadi daya politik yang disfungsional."

36. Beberapa kajian terbaru dan penting terkait pembunuhan massal dan penindasan yang dilakukan oleh rejim Komunis dan Sosialis Nasional (Nazi) di antaranya adalah Anne Applebaum, *Gulag: A History* (New York: Random House, 2003), Timothy Snyder, *Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin* (New York: Basic Books, 2010), dan Frank Dikötter, *Mao's Great Famine, The History of China's Most Devastating Catastrophes, 1958-1962* (New York: Walker & Co., 2010).
37. Cerita-cerita mengenai ini ditulis dengan penuh warna, dari perspektif orang Amerika, oleh Bryan Doherty dalam *Radicals for Capitalism: A Freewheeling History of the Modern American Libertarian Movement* (New York: Public Affairs, 2007).
38. Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia* (New York: Basic Books, 1974), h. ix.
39. Fransisco de Vitoria, "On the American Indians", *Political Writings*, peny. Anthony Pagden dan Jeremy Lawrence (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), h. 250-251.
40. Dikutip dalam Perez Zagorin, *How the Idea of Religious Toleration Came to the West* (Princeton: Princeton University Press, 2003), h. 119.
41. John Milton, "Areopagitica: A Speech of Mr. John Milton for the Liberty of Unlicenc'd Printing, to the Parliament of England" [1644], dalam *Areopagitica and Other Political Writings of John Milton* (Indianapolis: Liberty Fund, 1999), h. 23. John Locke kemudian menyatakan di dalam suratnya yang terkenal tentang toleransi, "[P]ersuasi dan perintah adalah dua hal yang berbeda; yang satu adalah usaha menekan orang lain dengan argumen, sedangkan yang lainnya dengan hukuman." John Locke, "A Letter on Toleration", dalam *The Sacred Rights of Conscience*, peny. oleh Daniel L. Dreisbach dan Mark David Hall (Indianapolis: Liberty Fund, 2009), h. 47.

42. Di dalam eleginya untuk kematian Gournay, Anne-Robert-Jacques Turgot menulis bahwa Gournay memahami betapa bodohnya menerapkan monopoli dan "standar" pada pasar yang tidak diminta oleh konsumen. Sebagaimana ditulis Turgot, Gournay "terkejut melihat masyarakat tidak bisa melakukan jual-beli tanpa terlebih dahulu membeli hak untuk melakukan kegiatan tersebut," dengan kata lain, warga pada saat itu pertama-tama harus membeli hak jual-beli dari suatu serikat monopolistik. "Ia tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa barang ini, karena tidak selaras dengan regulasi yang ada, harus dipotong menjadi beberapa keping yang panjangnya masing-masing tiga elo, dan orang malang yang membuatnya masih harus dikenakan denda hukuman yang jumlahnya cukup untuk membuat ia dan keluarganya jatuh miskin menjadi pengemis." Turgot, "Éloge de Gournay", dalam *Western Liberalism: A History in Documents from Locke to Croce*, peny. E. K. Bramsted dan K. J. Melhuish (London: Longman, 1978), h. 305.
43. James Buchanan, "Order Defined in the Process of Its Emergence: A note stimulated by reading Norman Barry, 'The Tradition of Spontaneous Order'", *Literature of Liberty*, v. 5, n. 4 (1982) diakses melalui http://oll.libertyfund.org/title/1305/100453 pada 23 Maret 2013.
44. Sejumlah libertarian percaya bahwa tata konstitusional tanpa monopoli hukum atau penggunaan kekuatan defensif negara adalah mungkin dan ideal. Lihat, misalnya, Randy E. Barnett, *The Structure of Liberty: Justice and the Rule of Law* (Oxford: Oxford University Press, 2000), Micheal Huemer, *The Problem of Political Authority, op. cit.*, Bruce L. Benson, *The Enterprise of Law: Justice Without the State* (Oakland: Independent Institute, 2011). Pernyataan singkat saya dalam "The Case for Ordered Liberty Without the States" dapat dibaca pada http://www.libertarianism.org/publications/essays/case-ordered-liberty-without-states. Apakah kebebasan dapat terjadi tanpa negara masih terus diperdebatkan di antara kelompok libertarian, tetapi sekedar ketidakhadiran negara tidaklah sama dengan kehadiran kebebasan, karena kebebasan bergantung pada institusi hukum dan peradilan. Yang menjadi perdebatan sengit sebetulnya adalah apakah hukum dan peradilan dapat eksis tanpa harus melalui peran monopoli negara.

45. Saya membedakan prinsip kebebasan dengan “kesetaraan dalam hasil”, bukan dengan prinsip “kesetaraan”, karena di dalam prinsip kebebasan terkandung prinsip “kesetaraan kebebasan untuk semua”.
46. St. Thomas Aquinas, “Treatise on Law, Q. 96, Art. 2”, *Summa Theologica* (Westminster, Maryland: Christian Classics, 1981), h. 1018.
47. Agelina Grimke, “Slavery and the Boston Riot”, *The Liberator*, 12 Agustus 1837.
48. Orlando Patterson, *Slavery and Social Death: A Comparative Study*, (Cambridge: Harvard University Press, 1982), vii.
49. Untuk kontribusi era Pencerahan terhadap konsep kebebasan individu dan hak alamiah, lihat M. Zafirovski, *The Enlightment and Its Effect on Modern Society*, ((New York: Springer, 2011), khususnya halaman 40: “Tidak diragukan lagi, kebebasan individu dan kebebasan untuk memilih, hak-hak sipil, ruang privat atau privasi, otonomi personal, kesejahteraan, kehidupan yang manusiawi, dan kebahagiaan, adalah hal-hal yang diterima begitu saja dan dianggap sesuatu yang wajar dalam masyarakat demokrasi Barat modern dan masyarakat lainnya, khususnya, tetapi bukan pengecualian, Amerika Serikat... . Jika begitu, maka kesemuanya itu adalah produk dan warisan jaman Pencerahan dengan konsep individualisme sekular-liberalnya.”
50. Frederick Douglas, “What to the Slave is the Fourth of July?” 5 Juli 1852; L. M. Child, *An Appeal in Favor of that Class of Americans Called Africans*, 1833.
51. Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman*, 1792, dalam Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Men* dan *A Vindication of the Rights of Woman*, peny. Sylvana Tomaselli (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), h. 74.
52. Declaration of Sentiments and Resolutions, Seneca Falls Convention 1848. http://ecssba.rutgers.edu/docs/seneca.html. Diakses pada 18 Februari 2013.
53. Frederick Douglas, “West India Emancipation Address”, 3 Agustus 1857.
54. Declaration of Sentiments.

55. Richard Cobden, *Speeches on Questions of Public Policy by Richard Cobden*, peny. J. E. T. Rogers, www.econlib.org/library/YPDBooks/Cobden/cbdSPP14.html. Diakses pada 22 Februari 2013.
56. James G. Birney, *A Letter on the Political Obligations of Abolitionists, with a Reply by William Lloyd Garrison* (Boston: Dow and Jackson, 1839), h. 32.
57. W. Phillips, “Philosophy of the Abolition Movement” (1853), *Speeches, Lectures, and Letters* (Boston: Lee and Shepard, 1884), h. 113.
58. L. Menand, *The Metaphysical Club: A Story of Ideas in America*, (New York: Farrar, Sraus, Giroux, 2001), h. 13.
59. B. Dylan, “The Times They Are A-Changin’”, Columbia Records, 1964.
60. W. L. Garrison, *The Liberator*, 31 Januari 1831.
61. George B. N. Ayittey, *Defeating Dictators: Fighting Tyranny in Africa and Around the World* (New York: Palgrave Macmillan, 2011), h. 43.
62. Robert Hessen. “Corporations”, *The Concise Encyclopedia of Economics*. 2008. Library of Economics and Liberty. Diakses pada 19 Mei 2013, dari www.econlib.org/library/Enc/Corporations.html
63. George B. N. Ayittey, ibid., h. 76.
64. Jacques Charmes, “Measurement of Contribution of Informal Sector and Informal Employment to GDP in Developing Countries: Some Conceptual and Methodological Issues”, tersedia pada www.unescap.org/stat/isie/reference-materials/National-Accounts/Measurement-Contribution-GDP-Concept-Delhi-Group.pdf
65. Lihat Professor George B. N. Ayittey presentasi di TED, www.ted.com/talks/george_ayittey_on_cheetahs_vs_hippos.html
66. Tony O. Elumelu, *Africapitalism: The Path to Economic Prosperity and Social Wealth*, www.tonyelumelufoundation.org/sites/tonyelumelufoundation.org/files/Africapitalism%20%White%Paper%20FINAL.pdf
67. Olúfémi Táíwò, *How Colonialism Preempted Modernity in Africa* (Bloomington: Indiana University Press, 2010).

68. Olúfémi Táíwò, *Africa Must be Modern* (Ibadan, Nigeria: Bookcraft, 2011), h. 48.

69. *After the Welfare State*, peny. Tom G. Palmer (Ottawa, IL: Jameson Books, 2012). Lihat khususnya esai “The Tragedy of the Welfare State” oleh Tom G. Palmer dan “How the Right to ‘Affordable Housing’ Created the Bubble that Crashed the World Economy” oleh Johan Norberg.

70. Lihat analisis sejarah istilah tersebut dala Randy E. Barnett, “The Original Meaning of the Commerce Clause”, 68 *University of Chicago Law Review* 101 (2001), dapat diakses melalui www.bu.edu/rbarnett/Original.htm. *Arkansas Law Review* 847 (2003), dapat diakses pada http://randybarnett.com/55ark847.html

71. James Madison, dalam George W. Carey, *The Federalist* (The Gideon Edition). Disunting dengan bab Pendahuluan, Pedoman Pembaca, Referensi-silang Konstitusional, Index, dan Glosarium oleh George W. Carey dan James McClellan (Indianapolis: Liberty Fund, 2001). Chapter: No. 62: Terkait konstitusi senat, perihal kualifikasi anggota; cara-cara penunjukan; kesetaraan perwakilan; jumlah senator, dan jangka-waktu penunjukan. Diakses dari http://oll/libertyfund.org/title/788/108681

72. Lihat Laura A. Scofea, “The Development and Growth of Employer-Provided Health Insurance”, *Monthly Labor Review*, Maret 1994, dapat diakses di www.bls.gov/,lr/1994/03/art1full.pdf www.nber.org/papers/w14839.pdf

73. Lihat Circular Letter No. 23 (1976), “Re: Mandatory Maternity Coverage”, “The law specifically requires maternity care coverage be provided in “Every policy...” without restriction based on age, sex, marital status”, dapat dilihat pada www.dfs.ny.gov/insurance/circltr/1976/cl1976_23.htm

74. Kisah mengerikan ini ditulis dengan detail di dalam artikel klasik yang ditulis oleh Reuben Kessel, “The A.M.A and the Supply of Physicians”, 35 *Law and Contemporary Problems* (Spring 1970), dapat dilihat pada http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3288%content=lcp%sei-redir=1

75. Membayar tunai tidak selalu dianggap sebagai transaksi legal. Para dokter yang menerima Medicare tidak boleh menerima

tunai atas jasa yang ditanggung oleh Medicare. Brent R. Asplin, MD; Bradley P. Carlin, PhD; Arthur L. Kellermann, MD, MPH, "Insurance Status and Access to Urgent Ambulatory Care Follow-up Appointments", *Journal of the American Medical Association*, 14 September 2005, http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=201518

76. Friedrich A. Hayek, "The Use of Knowledge in Society", *American Economic Review*. XXXV, No. 4 h. 519-30. American Economic Association. 1945. Library of Economics and Liberty [Online] dapat diakses pada www.econlib.org/library/Essays/hykKnw1.html *Knowledge and Decisions* (New York: Basic Books, 1996).

77. Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Edwin Cannan, peny. London: Methuen & Co., Ltd. 1904. Library of Economics and Liberty [Online] dapat diakses di www.econlib.org/library/Smith/smWN19/html

78. F. A. Hayek, *Law, Legislation, and Liberty: Volume I, Rules and Order* (Chicago: University of Chicago Press, 1973). h. 98-99.

79. www.econlib.org/library/Enc/TragedyoftheCommons.html

80. www.econlib.org/library/Enc/RentSeeking.html

81. www.econlib.org/library/Enc/PublicChoice.html

82. Untuk penjelasan dan bukti-bukti lebih banyak, lihat esai-esai di dalam buku *The Morality of Capitalism*, peny. Tom G. Palmer (Ottawa, IL: Jameson Books, 2011), khususnya bagian "Interview with an Entrepreneur" (wawancara dengan pendiri Whole Foods Market, John Mackey) dan "The Paradox of Morality", oleh cendekiawan libertarian asal China, Mao Yushi.

83. Untuk bacaan pengantar yang baik terhadap studi pilihan di dalam politik, lihat *Public Choice: A Primer*, oleh Eamonn Butler (London: Institute of Economic Affairs, 2012) dan *Government Failure: A Primer in Public Choice*, oleh Gordon Tullock, Gordon Brady, dan Arthur Seldon (Washington, DC: Cato Institute, 2002).

84. John Locke, *Second Treatise of Government*, chapter VI, section 57.

85. Lihat Richard Epstein, *Simple Rules for a Complex World* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995).
86. Cendikiawan liberal dalam bidang hukum Lon Fuller mengidentifikasi delapan cara seseorang dapat gagal membuat hukum di dalam bukunya *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1939), h. 33-37. Hayek mengelaborasi lebih jauh: "Hukum terdiri dari aturan-aturan yang berdiri sendiri yang mengatur tingkah laku individu terhadap sesamanya, diterapkan terhadap berbagai hal-ihwal ke depannya yang jumlahnya tidak diketahui, dan dengan mendefinisikan domain spesifik masing-masing, memungkinkan terjadinya keteraturan tindakan muncul dengan sendirinya yang mana masing-masing individu dapat membuat rencana-rencana yang layak." F. A. Hayek, *Law, Legislation, and Liberty: Volume I, Rules and Order* (Chicago: University of Chicago Press, 1973), h. 85-86.
87. John Locke, *Second Treatise of Government*, chapter VI, section 57.
88. F. A. Hayek, *The Constitution of Liberty*, peny. Ronald Hamowy (Chicago: University of Chicago Press, 2011).
89. Untuk diskusi mengenai *robustness* atau kekokohan, lihat P. J. Boettke dan P. T. Leeson, "Liberalisme, Socialism, and Robust Political Economy", dalam *Journal of Markets & Morality* (2004), 7:1. h. 99-111 dan Mark Pennington, *Robust Political Economy: Classical Liberalism and the Future of Public Policy* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011).
90. Lihat Nassim Nicholas Taleb, *Antifragile: Things That Gain from Disorder* (New York: Random House, 2012).

Profile Suara Kebebasan

Sebuah website untuk kebebasan, itulah suarakebebasan.org. Website ini memiliki misi untuk mempromosikan ide-ide tentang kebebasan dan memberikan pemahaman lebih jauh mengenai kebebasan dan pasar bebas melalui website yang aktif dan interaktif. Kami juga mendorong upaya ini melalui promosi informasi lewat media sosial dan publikasi, serta kerja sama dengan jaringan strategis baik individu maupun organisasi yang juga mendorong ide-ide tentang kebebasan. Visi suarakebebasan.org adalah meningkatnya kesadaran generasi muda Indonesia tentang pentingnya kebebasan dan semangat bersama untuk mempromosikan kebebasan di Indonesia.

Target utama kami adalah kawula muda Indonesia dan masyarakat Indonesia yang peduli dan tertarik dengan ide-ide kebebasan. Suarakebebasan.org memulai kiprahnya di bulan Maret 2015 dengan dukungan dari **Atlas Network dan Youth Freedom Network**. Website ini hadir untuk memenuhi kebutuhan akan langkanya sumber informasi mengenai kebebasan dalam bentuk website, khususnya untuk kawula muda di Indonesia. Tidak hanya memberikan informasi, suarakebebasan.org juga memberikan wadah bagi para pembacanya untuk ikut berkontribusi dalam menyuarakan ide dan pendapat mengenai kebebasan khususnya terkait dengan konteks Indonesia. Kami percaya dengan melibatkan para pembaca, suarakebebasan.org akan mendapatkan lebih banyak dukungan untuk mempromosikan kebebasan di Indonesia. Kami juga mendorong persemaian komunitas muda libertarian melalui **Indo-Libertarian,** kerjasama dengan mitra lainnya seperti **Yayasan Politik** dari Jerman **Frederich Naumann Foundation** for Freedom, **Amagi Indonesia**, dan **Students for Liberty**.

Editor: Adinda Tenriangke Muchtar (*Editor-In-Chief*), Muhamad Iksan dan Rofi Uddarojat (Editor Pelaksana).